

DUKUNG KERJASAMA SISTER CITY ASTANA-IKN NUSANTARA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.07/TH.XVIII/VII/2024



Indonesia Darurat Judi Online

PERANGI DAN BERANTAS Judi Online Hingga Akarnya

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

18 Nasional
Silaturahmi Kebangsaan
Bisa Menjadi Tradisi Politik

32 Kajian MPR
Badan Pengkajian Bahas
Uji Sahih Tata Tertib MPR

39 Selingan
Ke Gaza Pasukan
Indonesia Akan Kembali

58 Sosialisasi
Jaga Persatuan dan Kesatuan
Bangsa di Tengah Keberagaman



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Daftar Isi

EDISI NO.07/TH.XVIII/VII/ 2024



08 BERITA UTAMA

Indonesia Darurat Judi Online

Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat judi online. Pemerintah hendaknya bisa menyelesaikan persoalan judi online ini dengan cepat. Artinya, perlu kemauan politik pemerintah secara menyeluruh untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya.



16 Nasional
Dukung Kerjasama Sister City Astana- IKN Nusantara



60 Sosialisasi
Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



39 SELINGAN
Ke Gaza Pasukan Indonesia Akan Kembali



76 Profil
MY Esti Wijayanti

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	36
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Diskusi Majelis	50
Varia MPR	62
Wawancara	70
Figur	74
Ragam	76
Dari Rumah Kebangsaan	82
Rehal	84



COVER

Edisi No.07/TH.XVIII/VII/ 2024
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Indonesia Darurat Judi Online, Korban Judi Online Sudah Banyak

BELAKANGAN ini judi daring atau judi online menjadi *concern* berbagai pihak, termasuk Presiden RI, Pimpinan MPR, anggota DPR, agamawan, dan lainnya. Peralnya, keberadaan judi daring atau judi online saat ini sudah sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan dan meresahkan. Sederet fakta tentang judi online dan dampaknya pada masyarakat membuat kita miris.

Sebut saja data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan, pemain judi di Indonesia telah mencapai 3,2 juta orang. Dari jumlah itu, 80% berasal dari masyarakat menengah bawah yang sehari-hari sudah kesulitan hidup. Para pemain judi ini mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, pegawai golongan rendah, pekerja lepas, pengemudi Ojol, tukang parkir, pedagang kaki lima, tukang bangunan, dan lainnya.

Lebih miris lagi, anak-anak di bawah 10 tahun sudah ada yang terkena virus judi online. Jumlahnya mencapai 8.000 orang. Sedangkan penduduk usia muda, antara 10-20 tahun yang bermain judi online sudah mencapai 400 ribu orang. Untuk anak-anak, judi online sudah merusak masa depan mereka. Lalu, bagaimana kita membayangkan bonus demografi dan generasi emas pada saat Indonesia Emas tahun 2045, sementara anak-anak sudah terkena virus judi online?

Yang lebih mengejutkan, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, pada Rabu 28 Juni 2024, Ketua PPATK Ivan Yustiananda mengungkapkan sekitar 1.000 orang di antaranya anggota DPR, DPRD, serta pegawai Sekretariat Jenderal terlibat transaksi judi online. Selain itu, judi online sudah merambah ke semua profesi, baik Polri, TNI, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lainnya termasuk juga para jurnalis.

PPATK juga menyebutkan, perputaran uang judi online sungguh mencengangkan. Dalam lima tahun terakhir, perputaran uang judi online menembus Rp 600 triliun. Pada tahun 2023, perputaran judi online mencapai Rp 327 triliun. Pada empat bulan pertama tahun 2024, uang judi online sudah mencapai Rp 100 triliun.

Dampak judi online sudah tampak di masyarakat. Judi daring atau judi online sudah memakan banyak korban tidak hanya masyarakat sipil biasa, namun juga aparat. Di Mojokerto, beberapa waktu lalu seorang Polwan membakar suaminya karena suaminya yang juga anggota Polri, tersangkut judi online. Intinya, judi online memberi mudharat bagi masyarakat, mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga (perceraian), hingga tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Padahal, pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan upaya menutup situs judi online. Dalam kurun waktu 2023-2024 Kemenkominfo telah menghapus 1.904.246 konten judi online di ruang maya. Sejak 2018 hingga Juli 2023, Kemenkominfo sudah memblokir sebanyak 846.047 situs judi online secara bertahap. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melaporkan telah membekukan 5.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Tetapi, ibarat pepatah "hilang satu tumbuh seribu," situs atau aplikasi judi online tetap bermunculan dan dapat diakses dengan mudah oleh para pemain judi.

Kita mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024, dan disahkan pada Jumat, 14 Juni 2024. Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Menkopolkam Hadi Tjahjanto ini diharapkan bisa mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.

Tentu kita berharap banyak pada Satgas Pemberantasan Judi Online ini. Satgas hendaknya fokus pada akar atau inti permasalahan yang terjadi, bukan hanya menyentuh pada permukaan atau residunya saja, tetapi memerangi dan memberantas judi online sebagai sebuah kejahatan terorganisir. Karena itu, Satgas Pemberantasan Judi Online harus menisyrir dari akarnya, yakni si bandar, jaringan, dan kroninya, termasuk "orang dalam" yang berasal dari Indonesia sendiri. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

REDAKTUR PELAKSANA

Anies Mayangsari Muninggar

KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

FOTOGRAFER

Tim Medvis

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

STAF DISTRIBUSI

Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan
Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



HUT BHAYANGKARA KE-78 1 JULI 2024



Negara Wajib Peduli Masa Depan dan Tantangan Gen-Z

DATA resmi tentang 10 juta remaja atau generasi Z (Gen-Z) yang tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja harus ditanggapi dengan bijak, dengan menghadirkan pendekatan solutif. Berpijak pada titah konstitusi dan tujuan pembangunan itu sendiri, negara wajib peduli pada fakta itu dengan melakukan intervensi untuk mengatasi masalahnya.

Pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, salah satu titahnya sangat jelas, yakni kewajiban negara mencerdaskan bangsa. Kemudian, dalam Pasal 31 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, pernyataan konstitusionalnya pun sangat tegas; bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Makna titah konstitusional ini jangan dipersempit. Sebaliknya, titah tentang kewajiban negara mencerdaskan bangsa itu harus dihayati dan diimplementasikan dalam arti yang seluas-luasnya, seturut perkembangan dan kebutuhan zaman.

Dalam konteks itu, contoh historis tentang intervensi pemerintah layak untuk dikedepankan. Karena alasan kebutuhan, pada awal dasawarsa 60-an, pemerintah melakukan intervensi melalui keputusan Presiden Soekarno mengirimkan ribuan mahasiswa belajar di negeri lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, Tiongkok, Jepang, dan sejumlah negara di kawasan Eropa Timur. Alasannya, belasan tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan, negara kekurangan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Jadi, tujuan ideal penugasan belajar ke luar negeri itu jelas; selesai menimba ilmu di negeri lain, ribuan mahasiswa itu diwajibkan kembali ke Indonesia untuk membangun negaranya. Itulah Impian negara-bangsa pada era itu. Memang, sejarah mencatat bahwa setelah menyelesaikan tugas belajarnya, banyak dari mereka yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena perubahan politik di dalam negeri sejak 1965.

Catatan historis ini patut dikedepankan untuk menjelaskan bahwa negara idealnya terpanggil untuk melakukan intervensi, ketika jutaan

putera-puteri bangsa era terkini – yang karena beberapa alasan – tidak memiliki daya dan akses untuk mengembangkan bakat dan membangun kompetensi pada bidang-bidang keahlian yang menjadi minat mereka. Bukankah negara wajib mencerdaskan putera-puteri bangsa?

Sebaliknya, kalau 10 juta Gen-Z yang tidak sekolah dan tidak bekerja itu hanya dibiarkan seperti apa adanya sekarang, di kemudian hari pun negara harus peduli pada mereka. Sebab, ketika sebagian dari mereka sungguh-sungguh menjadi tak berdaya sehingga terperangkap dalam kemiskinan, negara tidak bisa lepas tangan. Bukankah konstitusi memerintahkan negara harus peduli. Menurut Pasal 34 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Karena itu, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang 10 juta remaja atau Gen-Z yang tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja itu jangan sampai menjadi catatan untuk sekadar diratapi atau dijadikan bahan obrolan. Bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semua pihak didorong untuk lebih menunjukkan kepedulian.

Sesuai titah konstitusi dan sejalan dengan kehendak membangun kompetensi sumber daya manusia Indonesia, pemerintah berwenang mengintervensi masalah ini dengan menghadirkan pendekatan yang solutif. Telah menjadi pemahaman bersama bahwa pembangunan negara-bangsa selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Komunitas Gen-Z butuh akses dan ruang untuk membangun kompetensi mereka seturut perubahan zaman. Sangat relevan jika persoalan ini dikaitkan dengan proyeksi bonus demografi dan mewujudkan profil Indonesia emas 2045.

Harus diakui bahwa tantangan Gen-Z sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Masa depan permasalahan yang akan dihadapi Gen-Z pun hendaknya tidak disederhanakan. Artificial intelligence (AI) dan semakin pesatnya perkembangan atau progres

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI



digitalisasi terus mengubah mekanisme kerja pada hampir semua sektor, termasuk aktivitas produksi sektor industri manufaktur, perdagangan dan jasa lainnya.

Perubahan itu menghadirkan sejumlah konsekuensi, seperti berubahnya lanskap dunia kerja karena permintaan pasar kerja akan kualifikasi pekerja juga berubah. Maka, menuju bonus demografi dalam satu-dua dekade mendatang, Indonesia harus menanggapi perubahan lanskap dunia kerja itu dengan program-program yang adaptif dan berfokus pada kompetensi Gen-Z sebagai angkatan kerja masa depan.

Pun, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa aktivitas sektor industri manufaktur, proses produksi, dan juga sektor jasa-jasa terus beradaptasi dengan progres digitalisasi yang didukung oleh ragam platform digital. Perubahan yang didorong oleh perkembangan teknologi itu juga ditandai dengan hilangnya banyak pekerjaan lama akibat digitalisasi.

Sebaliknya, pada saat bersamaan, muncul pekerjaan atau profesi baru yang lahir dari digitalisasi. Maka, kepada Gen-Z harus ditanamkan pemahaman bahwa progres digitalisasi dan pemanfaatan AI tidak akan menimbulkan bencana atau disrupsi pada aspek ketenagakerjaan. AI atau digitalisasi hanya mengubah lanskap dunia kerja. Konsekuensinya, permintaan pasar kerja akan kualifikasi pekerja pun banyak berubah. Permintaan pasar kerja era terkini atau Industri 4.0 tidak sama lagi dengan era sebelumnya.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) dalam laporan

bertema Future of Work 2023 memberi gambaran tentang perubahan drastis lanskap dunia kerja akibat digitalisasi dan pemanfaatan AI. Menurut Peneliti WEF, 23% dari tenaga kerja di segala bidang industri bakal berubah total dalam lima tahun ke depan, karena banyak pekerjaan pola lama yang tereliminasi akibat tampilnya peran profesi baru.

Pada 2027, masih menurut perkiraan WEF, 69 juta posisi pekerjaan baru tercipta. Namun, dalam rentang waktu yang sama, sekitar 83 juta pekerjaan akan hilang. Perkiraan ini menjelaskan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan AI menyebabkan pasar kerja butuh pekerja dengan kualifikasi baru untuk mengimplementasi perangkat AI. Sebab, munculnya sejumlah profesi baru berbasis AI menyebabkan pekerjaan administratif pola lama semakin minim pemanfaatannya.

Didorong oleh kecenderungan yang tak terelakkan itu, kesadaran serta pemahaman tentang perubahan lanskap dunia kerja itu perlu semakin diintensifkan di dalam negeri, utamanya kepada komunitas Gen-Z. Dan, negara hendaknya menjadi instrumen terdepan yang menyebarkan pemahaman dan kesadaran di kalangan Gen-Z.

Karena dunia kerja berubah, orang-orang muda harus diberi ruang dan kesempatan untuk membangun kompetensi, agar mereka tidak gagap menanggapi perubahan zaman. Untuk Gen-Z, misalnya, mereka harus memperoleh informasi yang lebih mendetil tentang kebutuhan pasar kerja pada era digitalisasi dan pemanfaatan AI, termasuk profesi baru dengan ragam kualifikasinya. □

Perangi dan **Berantas** Judi Online Hingga Akarnya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat judi online. Pemerintah hendaknya bisa menyelesaikan persoalan judi online ini dengan cepat. Artinya, perlu kemauan politik pemerintah secara menyeluruh untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya.

JANGAN JUDI.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. baik secara offline maupun online,” pinta Presiden Joko Widodo. Presiden secara tegas menyuarakan bahaya judi daring atau online. Presiden pun mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian, baik secara offline maupun online.

“Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, ditabung atau dijadikan modal usaha,” tuturnya dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana ditayangkan *YouTube* Sekretariat Presiden pada Rabu, 12 Juni 2024.

Presiden juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi, mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. “Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game iseng-iseng berhadiah. Tapi, judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, maupun masa depan anak-anak kita,” kata Presiden.

Presiden gusar dengan maraknya judi online di masyarakat. Dalam tayangan itu Kepala Negara mengungkapkan, akan membentuk Satgas Judi Online untuk mempercepat pemberantasan judi online. Dan, benar, hanya selang dua hari setelah tayangan itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Judi Online. Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online diresmikan Presiden Jokowi pada Jumat, 14 Juni 2024.

Dalam Pasal 4 Keppres Nomor 21 Tahun 2024 itu disebutkan, Satgas

Judi Online bertugas untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Satgas Judi Online dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang saat ini dijabat Hadi Tjahjanto. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Satgas Judi Online, Hadi dibantu oleh Ketua Harian Bidang Pencegahan Budi Arie Setiadi, dan Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Tak bisa dipungkiri, judi online memang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Di Mojokerto, seorang istri membakar suami karena uang gaji ke-13 dipakai untuk judi online. Perceraian banyak terjadi karena judi online. Lebih mengerikan lagi, banyak anak muda terjerat judi online. Anak-anak muda yang kecanduan judi online ini juga terjerat pinjaman online (Pinjol) karena meminjam uang dari Pinjol untuk berjudi.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah pemain judi online di Indonesia telah mencapai 3,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, hampir 80% adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah yang sudah tercekik kemiskinan. Ini sebuah bencana besar bagi negara karena kemiskinan struktural semakin nyata. Seorang yang sudah terjerat permainan judi daring dibuat kecanduan, dan terus-menerus untuk memainkan judi online ini.

Dari 3,2 juta anggota masyarakat yang bermain judi online, 80% adalah mereka yang ikut judi online dengan nilai transaksi relatif kecil, yakni sekitar Rp 100.000. Kalau dihitung total agregat transaksi kalangan masyarakat umum meliputi ibu rumah tangga, pelajar,



pegawai golongan rendah, pekerja lepas, pengemudi Ojol, tukang parkir, pedagang kaki lima, tukang bangunan, dan lainnya lebih dari Rp 30 triliun.

Yang cukup mengejutkan lagi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, pada Rabu 28 Juni 2024, Ketua PPAK Ivan Yustiananda mengungkapkan, sekitar 1.000 orang di antaranya anggota DPR, DPRD, serta pegawai Sekretariat Jenderal terlibat transaksi judi online. Selain itu, judi online sudah merambah ke semua profesi, baik Polri, TNI, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lainnya, termasuk juga para jurnalis.

PPAK juga mencatat, dalam lima tahun terakhir omzet judi online menembus Rp 600 triliun. Untuk tahun lalu saja, omzet judi online ini mencapai Rp 327 triliun. Nah, jika diasumsikan sama, maka untuk akhir tahun 2024 omzet judi online bisa menembus Rp 400 triliun, karena kuartal I tahun 2024 sudah mencapai Rp 100 triliun. Omzet judi online Rp 600 triliun itu adalah 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 yang mencapai Rp 20.892 triliun. Uang Rp 600 triliun itu terbang ke luar negeri.

Pada, pemerintah atau Kemenkominfo telah melakukan langkah menutup situs-si-

tus judi online. Sejak 2018 hingga Juli 2023, pemerintah sudah memblokir sebanyak 846.047 situs judi online secara bertahap. Namun, meski aksesnya telah diputus, situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda. Masyarakat tetap dapat terus mengaksesnya dengan mudah. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terkait judi online ini. Tapi, seperti pepatah, “mati satu tumbuh seribu”. Para mafia judi online ini mengganti nama dan ganti account.

Dari segi regulasi, Indonesia sudah memiliki aturan yang melarang perjudian. Dalam Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan, pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat akses judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam hal ini, sejumlah selegram hingga influencer di media sosial sudah terjerat pasal ini. Di samping UU ITE, Pasal 303 KUHP mengenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 10 juta bagi para pemain judi.

Keprihatinan MPR

Pimpinan MPR memberi perhatian atas kondisi darurat judi online yang sudah memprihatinkan, mengkhawatirkan, dan meresahkan ini. Ketua MPR Bambang Soesatyo berpendapat, masyarakat tergiur bermain judi online untuk mengadu nasib demi mengubah kondisi ekonominya. Maka, kata dia, tak jarang pemain judi online memanfaatkan pinjaman online yang sangat mudah diakses sebagai modal untuk bermain judi.

“Ini merupakan lingkaran setan yang menjerat masyarakat ke dalam situasi yang sangat buruk dan bisa memicu kerawanan sosial. Saudara-saudara kita dengan mudah terjerat Pinjol, tapi kemudian berdampak luas, karena tidak sedikit yang mengakhiri hidup akibat teror-teror,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet saat berpidato dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, Bamsoet menilai, fenomena judi online terjadi karena anak-anak bangsa sudah jauh dari nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Apalagi, saat ini pengaruh pemahaman asing yang masuk ke dalam negeri sangat deras. “Semua bermimpi ingin

dapat uang cepat, dengan pinjam uang di Pinjol, main judi online, kalau sekarang punya motor besok bisa beli mobil, tapi akhirnya terjatuh utang,” tuturnya.

Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ikut prihatin dengan fenomena judi online ini. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS yang juga anggota Komisi VIII DPR RI sering menyebutkan bahwa Indonesia sudah darurat judi online. “Indonesia betul-betul sudah memasuki darurat judi online. Banyak pihak dan banyak profesi sudah terkena virus judi online. Bahkan, anak di bawah 10 tahun sudah ada yang terkena virus judi online. Jumlahnya mencapai 8.000 orang. Penduduk berusia antara 10-20 tahun sudah 400 ribu orang yang terkena virus judi online,” kata HNW kepada *Majelis*.

Menurut HNW, banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang bermain judi online. Misalnya, lingkungan keluarga kurang harmonis, kurang komunikatif, anak-anak tidak diawasi atau tidak diberi alternatif kegiatan lain yang produktif, sehingga mencari kegiatan sendiri dan akhirnya bermain judi online. Bisa juga karena faktor hubungan suami-istri yang kurang harmonis sehingga suami bermain judi online, atau mungkin juga, secara makro karena minimnya keteladanan penegakan hukum. “Itu semua terjadi karena aturan serta sanksi hukum judi online tidak ditegakkan dengan serius. Sehingga tidak menimbulkan efek jera,” ujarnya.

HNW juga berharap, lembaga-lembaga keagamaan untuk lebih efektif lagi melaksanakan dakwahnya atau pencerahannya kepada umat. “Kalau keberagaman warga kuat, Insya Allah akan menjadi benteng, tidak terbujuk untuk ikut main judi online. Selain itu, membangun keluarga yang harmonis juga penting, saling menyayangi dan tidak membiarkan anggota keluarganya berjudi. Kemudian soal etika, moral dan agama. Kalau diresapi dengan baik, etika, moral dan agama akan menjadi benteng yang sangat kuat,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengaku sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa judi online sangat berbahaya. Terbukti saat ini, korban judi online semakin banyak, bahkan menasar aparat kepolisian, seperti kasus seorang istri yang juga Polwan membakar suaminya



Hidayat Nur Wahid

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yang juga polisi. Judi online tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga nyawa.

“Saya sudah ingatkan sejak beberapa waktu lalu bahwa judi online ini sangat berbahaya. Kalau sekarang ini kita semua sudah sadar, berarti itu bagus. Karena judi merupakan penyakit yang bikin rakyat sengsara,” katanya kepada *Majelis* di sela kegiatannya menyaksikan pertandingan Proliga antara Jakarta LavAni Allo Bank Electric melawan Garuda Jaya di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Juni 2024.

Menurut Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, salah satu penyebab maraknya judi online adalah karena kemiskinan. “Kemiskinan menjadi salah satu penyebab maraknya judi online. Padahal jumlah masyarakat miskin masih tinggi mencapai 9%. Belum termasuk masyarakat

yang berpotensi miskin. Masyarakat yang berpotensi miskin inilah yang kerap mencoba-coba dan mudah tergoda untuk meraih keberuntungan melalui judi online,” ungkapnya.

Syarief Hasan menambahkan, untuk mencegah semakin meluasnya judi online, hukum harus ditegakkan secara adil sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sanksi hukum kepada operator maupun pelaku judi online mesti diperberat untuk memberikan efek jera. “Hukum tidak boleh pandang bulu, apalagi pilih kasih,” ujarnya.

Pendapat hampir serupa juga disampaikan anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta. Menurut Wayan Sudirta, permasalahan judi online belakangan ini semakin ramai dibicarakan, karena judi online telah banyak memakan korban, tidak hanya



Sjarifuddin Hasan

masyarakat sipil biasa, namun juga aparatur. “Perlu dipahami bahwa kegiatan judi oleh banyak pakar dan institusi global sebenarnya dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan adiksi, seperti pada merokok atau penggunaan obat terlarang,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Wayan Sudirta, permasalahan judi sebenarnya bukan pertama kali terjadi di negeri ini. Perang melawan judi yang telah dilakukan tidak serta merta menghentikan “penyakit” ini. “Penyakit ini masih belum sepenuhnya hilang dan terus hidup dalam masyarakat. Maka tak heran jika di era digitalisasi saat ini, mafia judi juga beralih memanfaatkan teknologi dan jaringan informasi dan komunikasi global. Hal ini, tentunya, menjadi tantangan bagi Pemerintah dan penegak hukum, baik dalam aturan maupun implementasinya,” jelasnya.

Berantas Sampai Keakarnya

Wayan Sudirta menegaskan, permasalahan judi daring atau online sejatinya adalah sebuah tindakan judi/perjudian yang menurut ketentuan di Indonesia (KUHP) dilarang dan merupakan tindak pidana. “Namun, dengan perkembangan teknologi, perjudian juga memanfaatkan ruang dunia maya. Oleh sebab itu, ketika perjudian menjadi permasalahan hukum, maka membutuhkan strategi berbeda dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya, apalagi jika dilakukan di dunia maya,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah membentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online. Bagi Wayan Sudirta, pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini merupakan sebuah respon pemerintah agar tidak dinilai diam saja ketika terdapat sebuah permasalahan di masyarakat. Tetapi, dia mengingatkan agar pembentukan Satgas tidak boleh hanya berhenti pada sebuah gestur politis, tetapi harus memiliki target atau tolok ukur pencapaiannya. Publik pasti menunggu berbagai gebrakan atau terobosan yang dibuat Satgas ini.

“Kita dapat melihat dalam pelaksanaan Satgas, seperti mafia tanah atau permasalahan pinjaman online, yang seolah telah ada namun tidak terasa hasilnya. Masih banyak permasalahan sengketa hak ke-

pemilikan tanah. Masih terjadi ketidakhatian dalam pinjaman dan kekerasan dalam penagihan dalam kasus pinjaman daring/online,” katanya.

Karena itu, I Wayan Sudirta mengharapkan, Satgas Pemberantasan Judi Online harus fokus pada akar atau inti permasalahan yang terjadi, bukan hanya menyentuh pada masalah-masalah permukaan atau residunya. Dalam permasalahan judi daring, Satgas terlihat akan menggunakan strategi memerangi demand and supply atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya.

“Penegakan hukum, pencegahan dan

nanganan bandar hanya bersifat pencegahan. “Padahal para bandar itulah yang seharusnya diberikan tindakan terlebih dahulu. Kalau para bandar judi online ini ditindak lebih dulu maka selesai persoalan judi online itu,” tegasnya.

HNW mengingatkan bahwa negara diperintah konstitusi untuk melindungi tumpah darah dan warga bangsa dari segala bentuk kedaruratan, termasuk judi online. Negara harus hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi juga memberantas bandar judi online maupun menutup akun judi online. “Para bandar ini memang akan membuat akun baru, tetapi kalau negara hadir, pasti



Wayan Sudirta

kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan tersebut tentu tidaklah salah. Aparatur juga harus menyisir dari akarnya, yakni si bandar, jaringan, dan kroninya. Jaringan perjudian daring ini tentu memiliki jaringan luring yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak yang berasal dari Indonesia sendiri,” katanya.

“Mudah-mudahan Satgas ini tidak hanya sekedar isapan jempol, basa-basi, atau gestur politis belaka. Namun, juga benar-benar membantu meniadakan permasalahan perjudian secara komprehensif dan memberi manfaat yang terbaik bagi masyarakat,” harapnya.

HNW juga mengapresiasi pembentukan Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online. Namun, dia menyayangkan ketika Satgas telah terbentuk, muncul pemikiran pe-

bisa ditangani. Singapura dan Malaysia saja bisa. Di sana juga ada pemain judi online, tetapi angkanya tidak sebanyak di Indonesia,” katanya.

Sementara Syarif Hasan menekankan bahwa pemberantasan judi online bukan semata tugas dan tanggung jawab Kemenkominfo. Pemberantasan judi online menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, termasuk aparaturnya keamanan dan masyarakat. “Jadi, semua aparaturnya, semua kekuatan dan potensi harus dioptimalkan untuk memberantas judi online hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

“Ini tugas kita bersama dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Cukup sudah kekejaman judi online yang telah merenggut nyawa anak bangsa, dan tidak boleh terulang kembali,” imbuhnya. □

MBO/BSC

Darimana Asal Muasal Datangnya Judi Online?

Antigua dan Barbuda menjadi negara pertama yang memberikan lisensi untuk perusahaan judi online. Sejak saat itu, industri judi ini terus berkembang hingga ribuan situs judi online yang muncul di seluruh dunia, termasuk Indonesia.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JUDI atau perjudian sudah ada sejak dahulu kala. Boleh jadi judi atau perjudian sama tuanya dengan peradaban manusia. Tetapi, perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah cara orang untuk berjudi. Kini, judi online atau judi slot menjadi sebuah fenomena. Mungkin tak terbayangkan sebelumnya, judi online menjadi sebuah titik penting dalam perkembangan sejarah perjudian. Bahkan, selama beberapa dekade terakhir, judi online telah mengalami pertumbuhan pesat, dan tentunya membawa dampak signifikan pada masyarakat.

Lalu, darimana asal muasal datangnya judi online? Jelas, judi online tidak datang secara tiba-tiba. Judi atau perjudian online melalui proses panjang seiring dengan perkembangan komputer dan internet. Singkatnya, judi online merupakan segala jenis perjudian yang dilakukan melalui internet. Perjudian ini mencakup poker virtual, judi slot, taruhan olahraga, dan masih banyak lagi. Situs web perjudian online pertama diluncurkan pada pertengahan tahun 1990-an ketika internet mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya, para bandar atau pemilik

perjudian membawa mesin slot judi dari satu kasino ke kasino lain. Hal ini tentu menyulitkan para penjudi untuk menemukan atau bermain judi slot pada waktu tertentu. Keterbatasan itu berubah dengan munculnya internet. Kini, permainan kasino seperti mesin slot virtual, blackjack, poker, roulette, dan lainnya dapat dimainkan secara online.

Dalam laman *Kemeninfo.go.id*, dipaparkan sejarah perkembangan judi online dari awal mula hingga saat ini. Ternyata, kemunculan atau asal muasal judi online bermula dari sebuah negara di Kepulauan Karibia, yaitu negara Antigua dan Barbuda pada tahun 1994 silam. Saat itu pemerintah setempat mensahkan Undang-Undang Perdagangan dan Pemrosesan Bebas. Undang-Undang ini memberi kemudahan permohonan lisensi izin kasino online.

Untuk memuluskan kasino online tersebut sejumlah pihak terlebih dahulu menyiapkan perangkat lunak perjudian (software atau program komputer untuk perjudian). Salah satunya, perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microgaming, sebuah perusahaan perangkat lunak (software) yang berbasis di Pulau Man. Agar tidak di-

hack atau diserang, Microgaming ini diamankan oleh perangkat lunak yang dibuat oleh Cryptologic, sebuah perusahaan perangkat lunak keamanan online. Perangkat keamanan inilah yang membuat transaksi keuangan judi online itu bisa dilakukan dengan aman. Setelah lengkap segala perangkat (software dan keamanan transaksinya) maka muncullah kasino online yang pertama pada tahun 1994.

Hingga saat ini, Microgaming masih menjadi salah satu penyedia perangkat lunak (software) paling terpercaya dalam industri game internet. Microgaming dapat mendukung semua jenis situs permainan online, mulai dari kasino hingga ruang poker. Sementara, perusahaan Cryptologic meluncurkan InterCasino pada tahun 1995. Situs ini menjadi salah satu situs kasino online tertua yang masih berfungsi hingga saat ini. Selain itu, peluncuran situs tersebut merupakan kasino pertama yang menawarkan kesempatan kepada penjudi untuk bertaruh dengan uang sungguhan.

InterCasino mampu merevolusi cara kerja transaksi tunai secara online sehingga membuat prosesnya lebih cepat dan aman bagi para penjudi. Ini membuat InterCasino lebih populer di industri kasino online bersama Microgaming. Namun, masih menjadi perdebatan situs judi online mana yang pertama muncul. Berdasarkan beberapa sumber, InterCasino adalah platform virtual pertama. Namun, menurut sumber lain, penawaran Microgaming adalah yang pertama. Perusahaan Microgaming dan InterCasino didedikasikan untuk platform kasino online.

Microgaming yang dibentuk pada tahun 1994 menandai dimulainya kebangkitan industri ini. Mereka memperkenalkan permainan kasino yang populer seperti Blackjack, Craps, Video Poker, dan Roulette. Sedangkan InterCasino Cryptologic menawarkan permainan kasino online dengan mekanisme pembayaran terintegrasi pada tahun 1996. Metode pembayaran ini

memungkinkan berkembangnya perjudian online hingga saat ini.

Kemajuan teknologi dan informasi membuat judi online kini mudah diakses. Aplikasi mobile memungkinkan pemain untuk bertaruh kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi blockchain dan mata uang kripto juga memberikan lapisan keamanan tambahan bagi pemain dan operator. Malah, saat ini sedang berkembang tren judi langsung atau "live casino". Penjudi bisa bermain melalui streaming video.

Dari negara Antigua dan Barbuda inilah awal judi online. Antigua dan Barbuda menjadi negara pertama yang memberikan lisensi untuk perusahaan judi online. Sejak saat itu, industri judi ini terus berkembang, hingga ribuan situs judi online yang muncul di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia

Seperti dikutip dari laman resmi Kemenkominfo, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel A. Pengerapan, mengungkapkan selama ini sebaran konten judi online ditengarai ada yang berasal dari luar negeri. Samuel menduga situs judi online yang tersebar saat ini berpusat di negara-negara yang telah melegalkan judi online.

"Tapi, begitu masuk di Indonesia, yang dilakukan pemerintah adalah pemutusan akses. Ada tiga langkah, pertama adalah domain name atau website-nya. Kedua, kalau ketahuan IP, juga kita putus akses.



Semuel A.

Kalau berupa aplikasi, aplikasinya juga kita putus aksesnya. Jika ada rekening yang digunakan itu juga kita blokir supaya mempersempit ruang gerak mereka melakukan kegiatan ilegal ini," katanya, pada 20 Juli 2023.

Setelah setahun, sinyalemen Samuel dibuktikan Polri. Berdasarkan temuan Polri, terungkap asal muasal merebaknya judi online yang meresahkan masyarakat Indonesia. Menurut Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti, judi online merupakan bisnis yang terorganisir dan dioperasikan dari wilayah Mekong Raya (Kamboja, Laos, dan Myanmar). Para mafia bekerja secara berkelompok, hingga mengembangkan judi online ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Pelakunya kebanyakan organize (ter-

organisasi) ya, karena ini merupakan transnational organize crime, para pelakunya adalah para kelompok organize crime yang mengoperasikan perjudian online ini dari Mekong Region Countries. Mekong Region Countries itu adalah Cambodia, Laos, dan Myanmar," kata Krishna dalam konferensi pers, Jumat, 21 Juni 2024.

Krishna mengungkapkan, praktik judi online ini kian marak sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Pada saat itu para penjudi di Mekong Raya mengalami pembatasan mobilisasi. "Karena adanya limited of movement, para travelers tidak bisa berjudi. Mereka mengembangkan judi-judi online sejak pandemi Covid-19, dan sejak itu judi-judi online makin berkembang ke seluruh wilayah. Bahkan sampai ke Amerika," katanya.

Para bandar di Mekong Raya ini mengembangkan bisnisnya dengan mempekerjakan orang-orang atau warga setempat sebagai operator di negara-negara yang akan dijadikan target pasarnya, termasuk Indonesia. "Misalnya, apabila mereka mau mengembangkan judi online ke Indonesia, maka mereka merekrut orang-orang Indonesia, ratusan orang diberangkatkan, direkrut dari Indonesia, diberangkatkan ke tiga negara tersebut. Kemudian mereka melakukan kegiatan operator dengan tentunya diorganisir oleh kelompok mafia yang sudah mengendalikan judi tersebut," beber Krishna.

Sebagai langkah awal, pemerintah melalui Kemenkominfo memutus akses internet atau jalur koneksi internet terhadap dua negara, yaitu Kamboja dan Filipina, karena kedua negara itu menjadi markas judi online atau sarang pengoperasian rumah judi online. Pemutusan jalur komunikasi internet tertuang dalam surat keputusan nomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tentang pemutusan akses internet judi online yang diumumkan pada 21 Juni 2024. Kemenkominfo mendapat laporan bahwa mayoritas pengoperasian rumah judi online memang berasal dari area Kamboja dan Davao Filipina. Pemutusan akses internet ke dan dari Kamboja dan Filipina ini bisa menjadi atensi bagi pemerintah setempat untuk tidak memfasilitasi pembuatan atau pengoperasian judi online di negara-negara sekitar termasuk Indonesia. □



Krishna Murti

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BSC



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA., Wakil Ketua MPR RI

Saya Setuju Jika Komisi I Membentuk Pansus Judi Online

PEMERINTAH telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas judi online yang kian marak dan meresahkan masyarakat. Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online itu dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini dipimpin Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, dibantu Ketua Harian Bidang Pencegahan Budi Arie Setiadi dan Ketua Bidang Penegakan Hukum Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Tugas Satgas ini adalah untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.

Pembentukan Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online bisa dikatakan sebagai upaya menangani kondisi darurat judi online. Bayangkan, menurut laporan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), pemain judi di Indonesia mencapai 3,5 juta orang. Sekitar 80% pemain judi online berasal dari kalangan masyarakat menengah bawah, seperti ibu rumah tangga, pekerja lepas, pedagang kaki lima, pengemudi ojol, pelajar. Bahkan, anggota DPR/DPD, anggota TNI/Polri pun ikut bermain judi online. Perputaran uang di industri judi online dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 600 triliun.

Pimpinan MPR turut memberi perhatian

atas fenomena judi online yang sudah mengkhawatirkan dan memprihatinkan serta meresahkan ini. Wakil Ketua MPR, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., ikut prihatin dengan fenomena judi online ini. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS yang juga anggota Komisi VIII DPR RI sering menyebutkan bahwa Indonesia sudah darurat judi online. Berikut perbincangan wartawan Majelis dengan HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, seputar fenomena judi online ini. Petikannya.

PPATK menyebutkan, pemain judi online di Indonesia sudah mencapai 3,5 juta orang, dan 80% berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana Bapak melihat fakta seperti ini?

Ini menunjukkan Indonesia betul-betul sudah memasuki darurat judi online. Banyak pihak dan banyak profesi sudah terkena virus judi online. Disebutkan, anak di bawah sepuluh tahun sudah ada yang terkena hingga 8.000 orang, lalu antara 10 hingga 20 tahun 400 ribu orang yang terkena. Uang yang beredar dari judi online mencapai Rp 600 triliun. Bahkan, korbannya bermacam-macam. Ada suami membunuh anak, anak membunuh ibu, suami dibunuh oleh istri, bahkan ada istri dibunuh suami. Banyak

rumah tangga jadi berantakan.

Karenanya, apa yang dikatakan pemerintah hendaknya betul-betul ditindaklanjuti. Apalagi pemerintah melalui Menkominfo, bahkan presiden sendiri, sudah mengatakan darurat judi online. Karena itu, mestinya betul-betul dilakukan tindakan yang menandakan ada keseriusan mengatasi ke-daruratan ini.

Sayangnya, statemen yang muncul malah sebaliknya. Menkominfo sempat mengatakan ingin melegalkan. Yang lain pernah mengatakan, yang mengharamkan judi hanya Indonesia. Malah Kemenko PMK pernah mewacanakan keluarga korban judi diberi Bansos. Itu semua tidak menandakan adanya keseriusan mengatasi masalah judi online yang sudah darurat ini.

Karena itu, rencana pembentukan Satgas, patut diapresiasi. Meski patut disayangkan, ketika pembentukan Satgas anti judi diwacanakan, muncul pemikiran bahwa penanganan para bandarnya baru bersifat pencegahan. Padahal, para bandar itulah yang seharusnya diberikan tindakan terlebih dahulu. Dan, kalau para bandarnya ditindak terlebih dahulu maka selesai judi itu.

Belum selesai masalah bandar judi, di lapangan sudah banyak korban, Kemenkumham malah mengatakan, tidak bisa menahan karena penjaranya tak cukup. Dan,

semua jadi seperti permisif, mentolerir. Bahkan, sempat muncul statemen (sekali pun nanti dibatalkan) adanya Bansos bagi keluarga korban judi. Seolah-olah, nanti kalau ada keluarga miskin akibat judi, negara akan membantu. Itu satu hal yang sangat tidak dibenarkan.

Mesti diingat, negara diperintah konstitusi untuk melindungi tumpah darah dan warga bangsa dari segala bentuk kedaruratan, termasuk judi online. Karena, untuk anak-anak, judi ini sudah merusak masa depan mereka. Padahal kita sering membayangkan tentang Indonesia Emas, tentang bonus demografi. Padahal anak-anak dari umur 10 sampai 20 tahun yang jumlahnya lebih dari 408 ribu menjadi korban judi online. Menurut Ketua KPPI, jumlah tersebut betul-betul membuat Indonesia sebagai negara darurat judi online.

PPATK juga menyebutkan 1.000 anggota DPR/DPD dan Sekretariat Jenderal ikut bermain judi online. Apa komentar Bapak?

Menurut saya, PPATK tidak cukup mewacanakan, mereka harus melaporkan dengan data kepada MKD di DPR agar ditindaklanjuti. Saya dengar MKD sudah menyatakan, akan menindaklanjuti. Ini harus ditindaklanjuti dengan serius, jangan justru menjadi fitnah. Jangan sampai terjadi generasilisai, seolah-olah semua anggota DPR main judi online.

Maksudnya, supaya yang salah segera diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku di DPR. Tapi, yang tidak salah jangan difitnah. Agar ada klarifikasi dan jelas duduk perkaranya. Bahwa yang melakukan judi online ya diberi sanksi. Tapi yang tidak, termasuk lembaga DPR-nya, jangan digenerasilisai seolah-olah lembaga DPR setuju atau bahkan ikut main judi online. Padahal, DPR adalah lembaga yang termasuk mengesahkan UU yang melarang perjudian, UU tentang ITE yang di dalamnya ada kriminalisasi atau mengkriminalkan judi online.

Menurut Bapak, sejauh ini mengapa judi online sulit diberantas?

Dalam konteks pengguna, barangkali di lingkungan keluarganya kurang harmonis, kurang komunikatif, anak tidak terawasi atau tidak diberi alternatif kegiatan produktif sehingga cari-cari kegiatan sendiri dan bertemulah judi online.

Mungkin juga ada kaitan dengan suami-istri kurang harmonis, sehingga suaminya main judi (kasus suami yang dibakar istrinya). Atau, mungkin juga, secara makro minim keteladanan penegakan hukum.

Mengakibatkan orang mengira bahwa dia bisa ngakalin hukum, sehingga bermain judi online.

Itu semua terjadi karena aturan serta sanksi hukum judi online tidak ditegakkan dengan serius. Sehingga tidak menimbulkan efek jera. Semoga, ini juga bisa menjadi dorongan bagi lembaga-lembaga keagamaan untuk lebih efektif lagi melaksanakan dakwahnya atau pencerahannya kepada umat.

Kalau keberagaman warga kuat, Insya Allah akan menjadi benteng, tidak terbujuk untuk ikut main judi online. Tapi, di sisi lain negara harus hadir, baik terkait keteladanan dalam aspek hukum maupun membuka lapangan kerja.

Kewajiban negara menghadirkan lapangan kerja bisa menjadi solusi untuk sebagian orang. Namun, menjadi kurang berguna karena sebagian pemain judi online adalah orang-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

orang kaya, memiliki penghasilan cukup.

Sebagian orang mengatakan, terjerumus judi online karena masalah ekonomi. Mereka bermimpi mendapat penghasilan banyak dengan cepat sehingga bermain judi online. Dia tidak sadar, bahkan kemudian terjebak. Akibatnya, bukannya menjadi kaya, tetapi malah semakin miskin.

Makanya, penting membangun keluarga yang harmonis, saling menyayangi dan tidak membiarkan anggota keluarganya berjudi. Kemudian soal etika, moral, dan agama. Kalau diresapi dengan baik, etika, moral, dan agama akan menjadi benteng yang sangat kuat. Yang terakhir, negara harus hadir bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga memberantas bandar judi online maupun menutup akun judi online. Mereka memang

akan bikin akun baru, tetapi kalau negara selalu menurut pasti ada hasil yang didapat, nyatanya Singapura dan Malaysia juga bisa. Di sana juga ada pemain judi online tapi angkanya tidak sebanyak di Indonesia, negara pengguna judi online tertinggi di dunia.

Pemerintah atau Kemenkominfo sudah melakukan langkah-langkah, misalnya menutup akses atau menghapus situs judi online di internet. Apa pendapat Bapak tentang langkah Kemenkominfo ini?

Sangat disayangkan, awalnya mereka malah permisif terhadap judi online. Mereka sempat bilang judi online ini dilegalkan saja, karena yang melarang hanya Indonesia. Kemudian Menkominfo menjadi orang pertama yang mengatakan, Indonesia darurat judi online. Melihat itu sewajarnya mereka harus lebih serius lagi.

Sayangnya, saat bersamaan malah terjadi pembobolan data nasional. Konon, potensi pembobolan itu sudah diingatkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak 2023. Makanya, penting bagi Komisi I melakukan pendalaman serius, kalau perlu bentuk Pansus untuk membongkar sampai ke akar-akarnya.

Satu pihak judi online merusak mentalitas warga. Di pihak lain, hancurnya data nasional membuat keamanan informasi kita jadi amat sangat rawan. Bagaimana membayangkan kedaulatan Indonesia tahun 2045 jika mental anak-anak dirusak judi online. Sementara data-data tentang asal usul mereka telah dirusak. Karena itu, saya setuju kalau Komisi I membuat Pansus bongkar kasus judi online, siapa di belakang ini semua, siapa yang diuntungkan. Termasuk, tentang kebocoran Pusat Data Nasional, siapa di balik ini semuanya, dan bagaimana menyelamatkan Indonesia dari darurat judi online dan kedaruratan data nasional itu.

Kalau dari sisi regulasi, apakah regulasi untuk memberantas judi sudah memadai? Bagaimana dengan sanksi hukumnya?

Komisi I melihat perangkat perundangannya cukup, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Karena, yang jadi masalah adalah selama ini belum dilaksanakan, bahkan cenderung permisif. Misalnya, pelakunya tidak ditahan, bahkan dikasih Bansos, bandarnya hanya dilakukan pencegahan. Jadi, semua menunjukkan tanda-tanda ketidakseriusan untuk menegakkan aturan yang ada. □

Terima Dubes Kazakhstan untuk Indonesia

Bamsoet Dukung **Kerjasama** Sister City Astana- IKN Nusantara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kazakhstan memiliki peran penting bagi Indonesia, yakni sebagai penghubung dengan negara-negara di Asia Tengah.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kerjasama sister city yang dibangun antara Astana (Ibu Kota Kazakhstan) dengan IKN Nusantara (Ibu Kota Indonesia). Menjadi catatan bersejarah bagi hubungan kedua negara. Kerjasama sister city ini juga memiliki makna tersendiri bagi Indonesia, untuk belajar banyak dari Kazakhstan yang berhasil membangun Astana sebagai ibu kota baru selama 25 tahun, sejak tahun 1998.

“Kita juga menyambut niat baik ‘Sergek Project’ dari Kazakhstan untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Untuk semakin meningkatkan nilai investasi antara kedua negara, kita juga mendukung penuh perundingan ‘Bilateral Investment Treaty’ yang tengah berlangsung. Perundingan harus dapat terus berjalan dengan lancar dan kesepakatan dapat segera ditandatangani,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Kazakhstan untuk RI, Serzhan Abdykarimov, di Jakarta, Selasa (11/6/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, hubungan diplomatik



antara Kazakhstan dan Indonesia sudah mencapai usia 31 tahun pada Juni ini, sejak diresmikan pada 2 Juni 1993. Hubungan bilateral kedua negara diperkuat oleh adanya kemiripan antara kedua negara, yaitu keduanya sama-sama memiliki sumberdaya alam berlimpah, masyarakat yang majemuk, dan memiliki mayoritas muslim moderat.



“Hubungan diplomatik antara kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan konstruktif. Kedua negara juga bersepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pertanian, industri, farmasi, gas dan minyak, transportasi, infrastruktur, dan pembuatan mesin,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mendorong peningkatan kerjasama ekonomi dan sosial budaya antara Indonesia dan Kazakhstan. Misalnya, melalui pembukaan penerbangan langsung (direct flight) dari Astana ke Bali. Menjadi stimulus untuk peningkatan kerjasama yang lebih erat dan lebih luas antarkedua negara.

Kazakhstan memiliki peran penting bagi Indonesia, yakni sebagai penghubung dengan negara-negara di Asia Tengah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia - Kazakhstan akan sangat bermanfaat bagi konektivitas kedua negara. Tidak hanya bagi turis, melainkan juga bagi dunia usaha kedua negara.

“Terlebih saat ini volume perdagangan Indonesia dengan Kazakhstan sudah

meningkat tajam dalam kurun 19 tahun terakhir, yaitu dari hanya Rp 295,9 miliar pada tahun 2004, naik menjadi Rp 6,21 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, hanya dalam sembilan bulan pertama, volume perdagangan kedua negara sudah mencapai Rp 3,7 triliun,” pungkas Bamsoet. □

Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah

Bamsoet: Silaturahmi Kebangsaan Bisa Menjadi Tradisi Politik

Muhamadiyah sepakat jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Terkait dengan sistem politik dan demokrasi harus dibahas secara cermat oleh para stakeholder bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendukung dilakukannya pengkajian ulang UUD NRI Tahun 1945, termasuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Diperlukan kajian seksama, menyeluruh, terbuka, serta adanya naskah akademik yang sah sebelum diputuskan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang telah menjalani empat kali perubahan.

“Pak Haedar mengapresiasi sikap Ketua ke-11 MPR, Amien Rais, yang menyatakan, menyesal dan meminta maaf atas amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Di mana salah satu hasil amandemen, mengubah sistem politik dan sistem demokrasi dari perwakilan menjadi pemilihan langsung,” ujar Bamsoet usai menyampaikan undangan Silaturahmi Kebangsaan MPR RI

kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Jakarta, Kamis (6/6/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini, menjelaskan, Muhammadiyah menilai, terdapat kesalahan arah pada



Amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Amandemen yang awalnya hanya ditujukan untuk membatasi masa jabatan Presiden, pada akhirnya merembet hingga menurunkan fungsi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi, hingga liberalisasi pasal-pasal sistem politik, demokrasi, ekonomi, HAM, dan haluan negara.

“Muhamadiyah menegaskan, harus ada sejumlah perbaikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Muhammadiyah juga sepakat jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Terkait dengan sistem politik dan demokrasi, hal tersebut harus dibahas secara cermat oleh para stakeholder bangsa,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini berharap, PP Muhammadiyah dapat memberikan catatan terkait persoalan kebangsaan beserta solusinya. Termasuk memberikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan MPR RI periode 2024-2029.

“Kita harapkan Silaturahmi Kebangsaan yang telah dilakukan di awal masa jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024 dan saat ini sebelum akhir masa jabatan pimpinan MPR, bisa menjadi semacam role model dan tradisi politik baru di Indonesia. Di mana para

pemimpin bangsa mau mengedepankan silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa melalui forum silaturahmi,” pungkas Bamsoet. □

Bertemu Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB

Sepakat Perlunya Perbaikan Sistem Ketatanegaraan

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) Muhaimin Iskandar mendukung langkah Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa. Sehingga nantinya dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk menyempurnakan tata kelola bangsa dan negara, baik kepada MPR RI periode 2024-2029 ataupun kepada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR adalah agenda resmi yang diputuskan Pimpinan MPR dan disampaikan dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan Fraksi dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perwakilan dari DPD RI dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional, menyerap aspirasi masyarakat, termasuk tokoh-tokoh bangsa. Dari pertemuan dengan Cak Imin dan para tokoh bangsa, ada benang merah yang dapat disimpulkan bahwa perlu ada perbaikan sistem ketatanegaraan,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (8/6/24).

Hadir, antara lain Wakil Ketua Umum MPR RI Ahmad Basarah, Fadel Muhammad, dan Jazilul Fawaid, serta jajaran utama pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, Cak Imin menilai, UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen empat kali masih memiliki banyak ‘lubang,’ serta masih banyak aspek yang belum diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak jarang ‘lubang’ yang ada justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Cak Imin juga menyebut bahwa MPR yang akan datang sebaiknya melaksanakan penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945, karena tuntutan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Mengapa? Karena, menurut Cak Imin, agar tidak terjadi lagi kompetisi yang pragmatis

menggunakan uang, menggunakan sogokan yang tampaknya tidak bisa diatasi melalui UU. Mau tidak mau harus dipertegas dalam Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 agar spirit dari demokrasi sebagai hak-hak rakyat yang fundamental tidak mudah dibeli dengan murah, semurah yang menjadi fakta-fakta di lapangan. Karena itu, sebagaimana ditegaskan Cak Imin, PKB mengusulkan penyempurnaan konstitusi bisa dimulai oleh periode akan datang.

“Pimpinan MPR bersama Cak Imin sepakat banyak yang harus diperbaiki dalam tata kelola bangsa dan negara. Termasuk diperlukan berbagai penyempurnaan dalam UUD NRI Tahun 1945 agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyalahgunaan dari spirit konstitusi kita. Selain memperbaiki lubang yang ada, penting ditekankan perlunya semangat penyelenggara negara yang baik sebagai faktor fundamental yang sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menegaskan kembali bahwa amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan apabila semua partai politik, khususnya yang memiliki wakil di DPR, setuju untuk melakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945. Wacana amandemen pun perlu dilakukan dengan pengkajian secara cermat, menyeluruh, serta dilengkapi dengan naskah akademik.

“Nantinya, apabila seluruh partai politik sepakat dilakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 maka yang dapat melaksanakan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah MPR RI periode 2024-2029. MPR RI periode sekarang sudah tidak dapat melakukan Amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sebab sesuai Tata Tertib MPR, amendemen UUD tidak dapat diajukan dalam 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR,” pungkas Bamsoet.

Sebelum bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. □



Membangun Kemandirian dan Kekuatan Pertahanan

Bamsoet Resmikan Operasional Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha swasta untuk memperkuat Industri Pertahanan Nasional. Sehingga kebutuhan amunisi bisa diperoleh dari industri dalam negeri, dan tidak terus-menerus bergantung pada impor.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Pendiri PT. Sapta Inti Perkasa Bambang Soesatyo meresmikan operasional PT. Sapta Inti Perkasa, sebagai pabrik amunisi pertama di Indonesia. Keberadaannya di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan RI, sesuai penetapan sebagai

Industri Pertahanan Swasta dengan Nomor Surat: SP/14/IV/2020/DJPOT. Serta Pemberian Izin Produksi dengan Nomor Surat: SIPROD/11/V/2020/DJPOT.

PT. Sapta Inti Perkasa berkomitmen menjadi lini produksi amunisi terintegrasi. Dari mulai awal proses penyediaan bahan baku (CoilStrip) CuZn28 dan CuZn10,

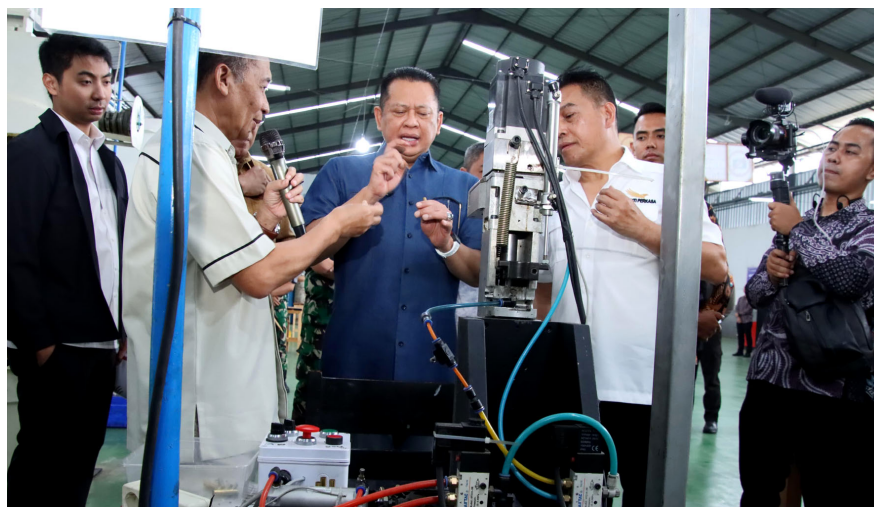
BrassCup, pembuatan selongsong, proses assembling amunisi, quality control, hingga packing proses.

“Kehadiran PT. Sapta Inti Perkasa berkontribusi dalam membangun kemandirian dan kekuatan pertahanan Indonesia melalui industri pertahanan swasta yang mandiri, solid, dan berdaya saing tinggi. Saat ini telah berhasil memproduksi brasscup dan selongsong kaliber 5.56 mm dan kaliber 9 mm dengan target produksi masing-masing 100 juta amunisi pertahun untuk kaliber 5.56 mm, dan 100 juta amunisi pertahun untuk kaliber 9 mm yang kemudian akan ditingkatkan bertahap hingga mencapai 500 juta amunisi pertahun,” ujar Bamsoet saat meresmikan operasional PT. Sapta Inti Perkasa, di Karang Ploso, Malang, Jumat (14/6/24).

Hadir antara lain, Direktur Utama PT. Sapta Inti Perkasa Richard CH, Komandan Pusdik Arhanud Brigjen TNI Edi Setiawan, dan Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa tidak hanya Indonesia yang membutuhkan peluru. Dunia saat ini juga kekurangan peluru. Sementara PINDAD baru mampu menyuplai sekitar 400-an juta amunisi. Padahal sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto, kebutuhan amunisi nasional per-tahun mencapai 5 miliar amunisi untuk menyuplai kebutuhan operasional dan cadangan institusi TNI.

“Karena itu, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha swasta untuk memperkuat Industri Pertahanan Nasional. Sehingga kebutuhan amunisi bisa diperoleh dari industri dalam negeri, dan tidak terus-menerus bergantung pada impor,” jelas Bamsoet



Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri Indonesia (PERIKHSA) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, amunisi hasil produksi PT. Sapta Inti Perkasa telah melalui uji tembak di lapangan tembak Pusdik Arhanud Malang, disaksikan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Piek Budyakto. Serta telah melalui uji balistik di Puslitbang Polri.

“Kementerian Pertahanan diwakili Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Piek Budyakto, serta Laboratorium Teknologi Kepolisian Puslitbang Polri diwakili Kabaglabtepol Puslitbang Polri Kombes Pol Pratikno, juga telah meninjau langsung proses produksi amunisi yang dilakukan oleh PT. Sapta Inti Perkasa. Memastikan seluruh prosesnya dari tahap awal hingga akhir telah dijalankan sesuai ketentuan, sehingga kualitas produksinya terjamin dan tidak diragukan,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPP/Kepala Badan Bela Negara FKPP dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, berdasarkan data BPS, di pertengahan tahun 2023 saja, Indonesia mengimpor senjata dan amunisi serta bagiannya sebesar 202,73 juta dolar AS atau setara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rp 3,52 triliun. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat di tahun 2024 dan 2025. Jika nilai tersebut bisa dialihkan ke dalam negeri, akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak ada salahnya Indonesia belajar dari Turki, yang dalam dua dekade terakhir telah mampu melepaskan sekitar 70%

ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan. Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan telah masuk 100 besar dunia. Seperti Alsensan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Turki yang membuka pintu masuknya sektor swasta di industri pertahanan mereka,” pungkas Bamsoet. □

Delegasi Pengurus KONI Tangsel

Bamsoet Dorong Sport Tourism dan Sport Industry

Menghidupkan geliat perkotaan melalui aktifitas olahraga, sekaligus menjadikan olahraga sebagai industri (sport industry), serta olahraga sebagai penunjang pariwisata (sport tourism).

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung berbagai program kerja KONI Tangerang Selatan (Tangsel) dibawah kepemimpinan Letkol (purn) M. Hamka Handaru. Menjelang akhir tahun 2024, KONI Tangsel tetap aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan. Antara lain, Tangsel Open Archery Championship 2024, Tangsel Runway Marathon 2024, Tangsel International Marching Band Competition (TIMBC) 2024, serta Rakornas KONI Seluruh Indonesia 2024.

“Berbagai event tersebut akan menyemarakkan Kota Tangerang Selatan.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menghidupkan geliat perkotaan melalui aktifitas olahraga, sekaligus menjadikan olahraga sebagai industri (sport industry) serta olahraga sebagai penunjang pariwisata (sport tourism). Melalui berbagai event ini, KONI Tangsel telah menjalankan fungsi pembinaan atlet, sekaligus sebagai pemanasan para atlet menjelang PON2024,” ujar Bamsuet usai menerima jajaran KONI Tangsel, di Jakarta, Senin (10/6/24).

Hadir pengurus KONI Tangsel antara lain, Ketua Umum Letkol (Pum) M. Hamka Handaru, Sekretaris Umum Djoko Nugroho, dan Bendahara Umum Dadi Kusnadi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Tangsel Open Archery Championship 2024 akan diselenggarakan pada Agustus 2024 di Lapangan Sunburst, BSD. Kelas yang dipertandingkan, antara lain Kejuaraan Pemula U-13, Kejuaraan Junior U-17, dan Kejuaraan Prestasi - Umum. Selain diikuti para pemanah dari berbagai negara ASEAN, rencananya juga diikuti para pemanah dari Jepang dan Australia. Target peserta mencapai 1.500 peserta, dengan pengunjung mencapai 6 ribu orang.

“Sedangkan Tangsel Run Way Marathon 2024 dan Tangsel International Marching Band Competition 2024 akan

diselenggarakan bersamaan pada November 2024 di Pangkalan Udara Pondok Cabe. Kategorinya Run 5K dan Run 10K. Event ini sangat menarik, karena para peserta akan lari di lintasan pacu pesawat di Pangkalan Udara Pondok Cabe,” jelas Bamsuet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan, Tangsel International Marching Band Competition 2024 diselenggarakan sebagai bagian Road to Asian Music Games. Kategori yang diperlombakan, antara lain Street Parade, Drumline Battle Divisi Open, Concert Modern Art Divisi Junior TK, dan Marching Field Show.

Selain menyelenggarakan berbagai event olahraga, KONI Tangsel juga sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Rakomas KONI Kota Seluruh Indonesia, yang rencananya juga akan diselenggarakan pada November 2024.

“Keempat event yang diselenggarakan KONI Tangsel tersebut juga akan menyertakan side event lain, seperti bazaar UMKM yang menjual berbagai produk merchandise, kuliner, dan lain sebagainya, serta penampilan musik dari berbagai musisi. Sehingga memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat kota Tangsel,” pungkas Bamsuet. □



Delegasi Pengurus GPII

Bamsoet Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak

Hadirnya “Cebong”, “Kampret”, dan “Kadrun” pada Pemilu 2019 menjadi peringatan bahwa pemilihan langsung memiliki dampak berganda (multiplier effect) bagi keharmonisan kehidupan kebangsaan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri.

“Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah. Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo - Gibran, Anies - Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding,” ujar Bamsoet usai menerima Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), di Jakarta, Rabu (12/6/24).

Hadir, antara lain Ketua Umum Masri Ikoni, Bendahara Umum Hamaydi Harahap, Kabid

Perencanaan, Litbang, dan Kajian Heri Muhrodin, Kabid Kesehatan dan PO Haerul Anwar, Wasekbid Kesehatan dan PO Fajar Afriansyah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, di sisi lain bangsa Indonesia juga tidak bisa melupakan luka bangsa pada Pemilu 2019 dengan hadirnya “Cebong”, “Kampret”, dan “Kadrun”, yang menjadi peringatan bahwa pemilihan langsung memiliki dampak berganda (multi-



plier effect) bagi keharmonisan kehidupan kebangsaan. Tidak hanya pada Pilpres dan Pileg, pemilihan langsung pada Pilkada juga meninggalkan berbagai persoalan kebangsaan.

“Hasil penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 33% (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang. Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33%. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta pemilih,

Indonesia menjadi negara dengan korban paling besar sedunia dalam hal politik uang,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, hasil pemetaan kerawanan Pemilu dan pemilihan menyoal politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2023, terdapat lima provinsi paling rawan yang perlu mendapatkan pengawasan ketat. Yakni, Maluku Utara dengan skor 100, Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50,

Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.

“Tidak heran jika kini banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu Indonesia paling liberal di dunia, sudah melenceng jauh dari demokrasi Pancasila sesuai semangat perwakilan sebagaimana terdapat dalam sila ke-empat Pancasila. Sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk kembali menghadirkan politik programatik, bukan politik pragmatis, serta kompetisi elektoral berbasis partai untuk mengurangi penggunaan politik uang” pungkas Bamsuet. □

Terima Finalis Putri Otonomi Indonesia 2024

Bamsuet Ajak Promosikan dan Majukan Daerah

Selain menjadi kebanggaan daerah yang mereka wakili, finalis Putri Otonomi Indonesia 2024 juga menjadi kebanggaan perempuan dunia. Karena itu, mereka juga harus memperlihatkan kepada dunia seperti apa perempuan Indonesia sesungguhnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2024 yang diselenggarakan pada Sabtu (8/6/24) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Raphaella Chayla Shaka, perwakilan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terpilih menjadi Putri Otonomi Indonesia tahun 2024.

Para pemenang lainnya, yakni Runner-up

I Rosanna M. James (Kab. Minahasa Utara), Runner-up II Laili Soimaturrohmah (Kab. Trenggalek), Runner-up III Niken Gesdianlie (Kab. Dharmasraya), dan Juara Favorit diraih Ananda Dwi Putri (Kab. Serdang Bedagai). Ada juga Duta Empat Pilar diraih oleh Devi Wawa Waviq dari Kabupaten Jember.

“Berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang telah diterima selama mengikuti ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

menjadi bekal utama bagi para finalis dalam membantu pemerintah memajukan daerah. Terlebih para finalis berasal dari kalangan milenial. Perempuan dan milenial adalah dua kekuatan sosial bangsa Indonesia,” ujar Bamsuet usai menerima 15 finalis Putri Otonomi Indonesia 2024, di Jakarta, Selasa (11/6/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain terpilih



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sebagai Juara dan Runner Up, para finalis lainnya juga diberikan kepercayaan memegang gelar berbagai duta. Antara lain, Duta Olahraga Luqyana Anjaryava (Kab. Serang), Duta Investasi Marshanda Annisa H. (Kab. Tulang Bawang), Duta Energi Terbarukan Tsalsa Putri Thahira (Kab. Bandung), Duta Rupiah Clarissa Vania (Kab. Kuansing), Duta Bangga Memakai Produk Indonesia Lisa Maulida (Kab. Deli Serdang), Duta Keluarga Berencana Sela Septiana (Kab. Empat Lawang), Duta Anti Narkoba Anja N. Hariyanto (Kab. Sleman), Duta Lingkungan Hidup Melvania Gifa (Kab. Bogor), serta Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Anak Agung Istri Ananda Pramesti (Kab. Klungkung).

“Di balik berbagai gelar duta yang disematkan tersimpan tanggung jawab besar untuk diimplementasikan. Di sisi lain, selain menjadi kebanggaan dari masing-masing daerah yang mereka wakili, finalis Putri Otonomi Indonesia 2024 juga menjadi kebanggaan perempuan dunia. Karena itu, mereka juga harus memperlihatkan kepada dunia seperti apa perempuan Indonesia sesungguhnya. Sampaikanlah pesan ke berbagai penjuru dunia bahwa perempuan Indonesia merupakan agen perdamaian dunia,” jelas Bamsuet.

Mantan Juri Putri Indonesia 2018, 2019 dan

2020 serta mantan Juri Putri Otomotif IMI 2021 ini juga mengajak para finalis Putri Otonomi Indonesia 2024 untuk menyukseskan konsep pemberdayaan desa melalui DEWA (Desa Wisata Agro), DEWI (Desa Wisata Industri), dan DEDI (Desa Digital). Slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia, akan menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.

“Sawah, gunung, laut, dan bentangan keindahan alam lainnya, bisa dimanfaatkan setiap desa untuk mengembangkan DEWA, DEWI, dan DEDI, sehingga akan memberikan efek luar biasa dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan pemasukan bagi masyarakat sekitar pedesaan. Terlebih pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 71 triliun atau naik 1,42% dibandingkan 2023. Prioritasnya, pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas Bamsuet. □



Delegasi Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia

Bamsoet Dorong Para Pengusaha Manfaatkan Kemajuan Teknologi

Industri makanan dan minuman tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga memiliki dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, industri makanan dan minuman memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya mampu menyerap banyak tenaga kerja, baik di sektor produksi

maupun distribusi, meningkatkan nilai tambah bagi petani dan produsen lokal, mendukung sektor pariwisata melalui makanan dan minuman tradisional, serta memberikan pendapatan devisa bagi negara dari produk makanan dan minuman yang diekspor ke berbagai negara,

“Industri makanan dan minuman tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tetapi juga memiliki dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Bahkan, industri makanan dan minuman terbukti sebagai salah satu industri yang mampu bertahan selama pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) di Jakarta, Kamis (6/6/24).

Pengurus Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia hadir antara lain Ketua Umum Tashya M. Yukki; Sekretaris Jenderal, Ariguna Napitupulu; Wakil Ketua Umum, Rudy Harsono dan Handry; serta Wakil Sekretaris Jenderal, Devy Anggraeni.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Badan Pusat Statistik mencatat industri makanan dan minuman selama tahun 2023 berhasil menyumbang 39,10% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas dan



6,55% terhadap PDB nasional. Sementara, realisasi investasi industri makanan dan minuman pada tahun 2023 mencapai Rp 85,10 triliun.

“Pada tahun 2023 (YoY), industri makanan dan minuman mampu tumbuh positif sebesar 4,47%. Industri makanan dan minuman juga menunjukkan neraca dagang positif atau surplus sebesar 25,21 miliar dolar AS dengan nilai ekspor di tahun 2023 mencapai 41,70 miliar dolar AS, dan impor sebesar 16,49 miliar dolar AS,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini mengingatkan, di era digitalisasi saat ini para pelaku industri makanan dan minuman harus berpikir kreatif dan inovatif. Di antaranya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti media sosial, guna mempromosikan produk yang dihasilkan.

Terlebih, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, tingkat penetrasi internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 79,5%. Artinya, sekitar

222 juta masyarakat Indonesia, termasuk para mahasiswa, sudah memiliki akses internet. Sedangkan pada tingkat global, sekitar 5,35 miliar atau lebih dari 66% populasi dunia telah terhubung ke internet.

“Dengan memanfaatkan media sosial para pelaku industri makanan dan minuman dapat memasarkan dan mempromosikan produk yang dibuat dengan target audiens yang lebih luas dan efisien. Media sosial juga dapat meningkatkan brand awareness, dan memaksimalkan penjualan,” pungkas Bamsoet. □

Pondok Modern Darussalam Gontor

HNW Minta para Santri Amalkan Ajaran para Kiai

Berani menjadi pemimpin dan dipimpin merupakan pelajaran berorganisasi khas Gontor. Ini menjadi bekal para santri untuk menjadi pemimpin nantinya.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR yang juga Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA, mengatakan pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor mempunyai banyak ajaran yang sangat penting dan bermanfaat untuk para santri. Apalagi mereka memberi keteladanan dalam hal yang terkait dengan memikirkan masa depan anak-anak bangsa, anak-anak umat, bangsa dan negara Indonesia, melalui pendidikan, dengan jalan jihad

pendidikan, dan politik pendidikan. Para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor memberikan ajaran yang jitu melalui pendidikan dengan keteladanan.

“Keteladanan pendidikan itu bukan sekadar melalui apa yang disampaikan di kelas tetapi juga apa yang beliau contohkan. Itulah pendidikan dengan keteladanan,” kata Hidayat Nur Wahid ketika berbicara di depan ribuan santri Pondok Modern Darussalam Gontor usai shalat Jumat di Masjid Gontor, di Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (7/6/2024).

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid yang biasa disapa HNW, menceritakan pengalamannya saat nyantri di Pondok Modern Darussalam Gontor dari tahun 1973 hingga tahun 1978. “Saya termasuk generasi “mukhadhram” yang bertemu langsung pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu K.H Ahmad Sahal dan K.H. Imam Zarkasyi, serta para pelanjutnya. Sayangnya saya tidak sempat bertemu K.H. Zainuddin Fannani, karena beliau sudah wafat pada tahun 1967 dalam usia 59 tahun. Ketika itu saya baru



berusia 7 tahun," tuturnya.

HNW mengungkapkan, K.H. Ahmad Sahal dan K.H. Imam Zarkasyi adalah teladan yang luar biasa. "Saya bertemu dan diajar langsung di kelas maupun di lapangan oleh K.H. Ahmad Sahal dan K.H. Imam Zarkasyi. Keduanya memberikan kepada kami keteladanan pendidikan, bukan hanya melalui apa yang disampaikan di kelas, tetapi juga melalui apa yang beliau contohkan," ujarnya.

HNW mengungkapkan, masjid Gontor menjadi saksi dari keteladanan pendidikan K.H. Ahmad Sahal dan K.H. Imam Zarkasyi. Saat itu semua santri di semua kelas dilibatkan ikut membangun masjid ini. "K.H. Ahmad Sahal, sekalipun sudah sepuh, selalu mengawasi dan tidak kehilangan semangat

mendidik dan mengajari kami. Beliau tetap peduli dengan program besar dari lembaga pendidikannya dan memberikan harapan agar semua berjalan sesuai khittah yang diinginkan," katanya.

HNW melanjutkan, ketika kelas 5 dan 6 diajar langsung K.H. Imam Zarkasyi. "Beliau mengajarkan bahwa seorang guru atau pendidik harus menguasai materi yang diajarkan. Beliau memberi keteladanan bagaimana menguasai mata pelajaran yang diajarkan dan membuat kami semua tercerahkan," ujarnya.

"Beliau mengajarkan bukan hanya menguasai mata pelajaran, tetapi juga bisa mengajarkannya, sekaligus mengajarkan bagaimana semua itu bisa diamalkan. Jadi, sebuah kesatuan antara iman, ilmu, dan

amal. Hal ini melahirkan sikap dan pribadi yang mempunyai visi ke depan," sambungnya.

HNW menambahkan, selain disiplin, di Pondok Modern Darussalam Gontor juga diajarkan bagaimana berorganisasi, berani memimpin dan dipimpin. "Berani menjadi pemimpin dan dipimpin merupakan pelajaran berorganisasi yang khas Gontor. Ini menjadi bekal para santri untuk menjadi pemimpin nantinya. Pemimpin yang tidak berpikir tentang dirinya, egoisme pemimpin, tetapi berempati dan berpikir tentang rakyatnya, tentang masa depan umatnya," katanya.

Dengan biasa berorganisasi, lanjut HNW, maka menjadi terbiasa bertemu dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Berorganisasi menjadi pelajaran yang mendasar agar tidak gamang bertemu dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas manapun, bahkan menjadi pemimpin di berbagai komunitas. "Begitu ada di satu komunitas, karena bekal berorganisasi ala Gontor, maka kita sudah terbiasa. Pengalaman berorganisasi seperti itu terbawa hingga saya menjadi Ketua MPR dan sukses memimpin pelantikan Presiden pada tahun 2004, sekalipun sebelumnya belum pernah menjadi anggota MPR ataupun mengikuti sidang MPR," ungkapnya.

Karena itu, HNW mengharapkan, para santri Pondok Modern Darussalam Gontor untuk memegang dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan, didapatkan, dan diteladankan para pendiri Gontor. "Nilai-nilai itulah yang sekarang dihadirkan oleh para Kiyai putra-putra maupun murid-murid pendiri Gontor, mereka pemimpin-pemimpin Gontor berikutnya," tuturnya lagi.

"Setiap langkah, kegiatan, dan apa yang diputuskan untuk para santri, semuanya mempunyai nilai-nilai yang akan sangat berarti dan berguna bagi masa depan para santri, baik di dunia pendidikan, pesantren, dunia sosial, dunia politik, dan lainnya. Nilai-nilai yang ditanamkan para kiai di Gontor ini terbukti sangat bermanfaat, maka jangan dimubazirkan, jangan disia-siakan, tapi taati, amalkan, dan terus sebarluaskan. Itu menjadi kontribusi mewujudkan cita-cita Gontor memasuki abad ke-2 nya, yaitu mewariskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin sebagai kontribusi membangun peradaban mulia," pungkasnya. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Indonesia Darurat Pornografi Anak

HNW Minta Kementerian PPPA Fokus Atasi Pornografi Anak

Berdasarkan data KPAI, Indonesia selama tiga tahun terakhir sudah pada status darurat pornografi anak, lantaran banyaknya produksi video asusila dengan anak-anak menjadi subjeknya.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan perempuan dan anak, Hidayat Nur Wahid, meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) siapkan strategi khusus untuk menyelesaikan masalah pornografi anak. HNW sapaan akrabnya mengingatkan, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, anak yang dieksploitasi secara seksual dan/ atau menjadi korban pornografi termasuk ke dalam kriteria Anak Yang Memerlukan

Perlindungan Khusus, sehingga harus dilindungi oleh Pemerintah.

“Pada FGD terkini bersama Kementerian PPPA, saya sudah sampaikan agar mementingkan program terkait perlindungan anak-anak, khususnya dari bahaya laten pornografi. Dalam konteks tugas fungsi Kemen PPPA maka perlu dibuat peta jalan pemberantasan pornografi anak dan skema sinergi lintas Kementerian, Lembaga, dan organisasi non pemerintah untuk menuntaskan masalah tersebut,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/6).

Berdasarkan data KPAI, Indonesia selama

tiga tahun terakhir sudah pada status darurat pornografi anak, lantaran banyaknya produksi video asusila dengan anak-anak menjadi subjeknya. Terkini (31/5), Polisi menangkap pelaku penyebaran konten pornografi anak, yang selama beroperasi sejak akhir 2022 sudah mendistribusikan lebih dari 2000 konten tersebut.

HNW yang merupakan Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pornografi yang melibatkan anak memang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual.



“Dalam konteks pidananya maka tepat Kepolisian bertindak tegas. Namun, dalam konteks pencegahan seharusnya menjadi fokus dari KemenPPPA, sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak,” sambungnya.

Menurut HNW, untuk mengatasi pornografi anak, diperlukan strategi preventif yang efektif dan komprehensif, misalnya dalam bentuk penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (P3) sejatinya sudah pernah dibentuk pada tahun 2012 melalui Perpres Nomor 25/2012. Ketua Gugus Tugas adalah Kemenko Kesra pada waktu itu, dengan Ketua Harian Menteri Agama, dan salah satu anggota adalah Menteri PPPA.

Produk terobosan dari Gugus Tugas tersebut adalah lahirnya Permenko Kesra No.6 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi Tahun 2013-2017, yang menynergiskan program lintas Kementerian dan Pemda untuk pencegahan dan penanganan pornografi.

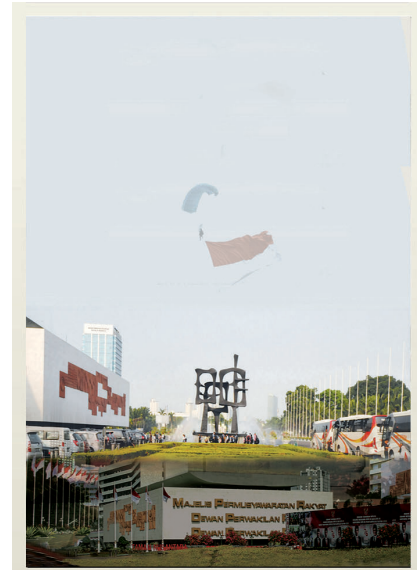
“Sayangnya setelah itu, Pemerintah seakan menelantarkan Gugus Tugas P3, dan sepertinya tidak melanjutkan updating

Rencana Aksi Nasional P3 pasca 2017. Di sini seharusnya Kementerian PPPA mengambil peran dengan memaksimalkan fungsi koordinasi yang dimilikinya,” lanjut Hidayat.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mencontohkan keberhasilan PPPA dalam mengoordinasikan isu perempuan dan anak, yakni pada isu pengarusutamaan gender (PUG).

KemenPPPA menjadikannya sebagai salah satu program prioritas, melalui penyusunan dan internalisasi materi PUG, serta sosialisasi lintas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, sehingga di semua instansi tersebut terjadi pengarusutamaan gender. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar KemenPPPA segera menyiapkan dokumen rancangan strategi nasional terkait pencegahan dan penanganan pornografi, khususnya pada anak.

“Strategi tersebut kemudian perlu dibahas di Komisi VIII DPR-RI sebagai mitra KemenPPPA dan KPAAI, bersama para pakar dan NGO terkait, agar penanganan dan solusi yang dirumuskan bisa komprehensif dan efektif, sehingga ke depannya Indonesia bisa terlepas dari kondisi darurat pornografi anak,” pungkasnya. □



Badan Pengkajian Bahas Uji Sahih Tata Tertib MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia (FH UNIKA) Atmajaya menyampaikan pandangan tentang kedudukan MPR. Secara detail berbagai pasal dan ayat dikupas. Intinya, amandemen berimplikasi pada perubahan lanjutan terkait dengan kewenangan dan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR, terutama sifat dan kedudukan Keputusan MPR.

BERTEMPAT di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, 4 Juni 2024, Badan Pengkajian MPR bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia (FH UNIKA) Atmajaya menggelar *Focus Group Discussion* (FGD).

FGD bertema: *Pembahasan (Uji Sahih) Draft Tata Tertib MPR* ini dihadiri oleh Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Rachman Thaha dari Kelompok DPD, Hendrik Lewerissa dari Fraksi Partai Gerindra, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Partai Golkar, dan Syaifullah Tamliha dari Fraksi PPP. Sedang dari pihak Atmajaya hadir Dekan FH Atmajaya, Dr. Iur. Asmin Fransiska, SH., LL.M., serta para akademisi FH Atmajaya, yakni: Dr. Samuel Hutabarat SH., MHum., Dr. Surya Tjandra SH., LL.M., Indriaswati Dyah Saptaningrum S.H., LL.M., PhD., dan Paulus Wisnu Yudoprakoso, SH, MHum.

Dalam makalahnya, Indriaswati Dyah membahas soal sifat dan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, amandemen UUD 1945 kedua (November 2001) dan ke-empat (Agustus 2002) telah secara fundamental mengubah kedudukan dan kewenangan MPR, dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara. Kedua, perubahan ini berimplikasi pada perubahan-

perubahan lanjutan terkait dengan kewenangan dan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR, terutama sifat dan kedudukan Keputusan MPR. Keputusan MPR, antara lain: Ketetapan MPR, Peraturan MPR, dan Keputusan yang dibuat, baik oleh MPR melalui rapat gabungan maupun Keputusan yang dibuat oleh alat kelengkapan MPR dan di sahkan melalui rapat gabungan.

Indriaswati selanjutnya memaparkan mengenai perubahan kelembagaan MPR dan implikasinya pada produk hukum MPR. Pra amandemen, disebut MPR menetapkan GBHN sebagai Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (hilang dengan perubahan Pasal 2 dan 3 UUD 1945). "Sistem check and balances terintegrasi dalam pemisahan kekuasaan dan penguatan fungsi DPR," ujarnya. MPR juga mempunyai kewenangan melakukan perubahan UUD, mengangkat, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. MPR menghasilkan produk hukum yang berlaku sebagai acuan bagi arah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, karena posisi TAP MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 sejalan dengan posisi kelembagaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. "Posisi kelembagaan MPR sebagai lembaga



tertinggi negara dihapuskan melalui amandemen. Sebagai implikasinya, TAP MPR tidak lagi menjadi produk peraturan perundang-undangan sejak tahun 2004, namun kembali dimasukkan sebagai produk peraturan perundang-undangan melalui UU No. 12 tahun 2011," tuturnya.

Sementara paska amandemen, kewenangan yang dimiliki MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilu, Memutuskan usul DPR untuk mem-berhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah MK

memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan MPR lainnya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan. Lalu, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatan. Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Pemilihan dilakukan dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang pasangan capres dan cawapres meraih suara terbanyak pertama dan kedua



pada pemilihan umum sebelumnya.

Dengan mengutip Fredisti, 2019, Dian A, 2013, Indriaswati Dyah mengatakan, “Paska amandemen, kecuali kewenangan melakukan perubahan UUD dan pengangkatan serta pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, produk hukum MPR tidak dapat bersifat ‘regeling’ ke luar, dan hanya bersifat mengikat ke dalam (kecuali dalam hal Tatib). Secara umum produk hukum bersifat *beschikking* – keputusan”.

Selanjutnya dia menguraikan tentang jenis dan isi Keputusan MPR paska amandemen UUD. “Setelah amandemen, MPR masih memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum, namun cakupan dan sifat keberlakuan berbeda,” ujarnya. Meliputi: (1). UUD bersifat mengikat keluar, disusun tanpa penomoran Keputusan MPR; (2). TAP MPR; (3). Peraturan MPR, terdiri dari: (a). bersifat mengatur (regeling); (b). Memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar MPR; (c). Menggunakan nomer sesuai dengan ketentuan PUUan; (4). Keputusan MPR, meliputi (a). Bersifat penetapan (beschikking); (b). Memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam; (c). Menggunakan nomer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (5). Keputusan lain yang ditetapkan oleh alat kelengkapan di lingkungan MPR.

Dalam pandangan umum, Indriaswati

menyatakan, secara umum perubahan Tatib yang diusulkan tidak memiliki implikasi fundamental terkait dengan cakupan tuisi dan kewenangan MPR, termasuk dalam kewenangan memproduksi ketentuan perundang-undangan. Merujuk pada Ps 172 (1): Tata Tertib ditetapkan oleh MPR dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka pasal-pasal terkait pengangkatan dan pemberhentian Presiden merupakan penyesuaian dengan aturan UU terutama UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Penambahan pasal-pasal baru dalam pelantikan dan prosedur acara pelantikan pimpinan MPR mengatur hal yang lebih teknis. Apakah Tatib MPR memang dimaksudkan untuk mencakup hal ini (tata acara dalam pelantikan, termasuk mengatur keharusan pimpinan MPR membacakan naskah pidato paska pengangkatan?), namun penulis tidak melihat adanya dampak negatif yang muncul apabila rumusan-rumusan tersebut di usulkan.

Selanjutnya, Indriaswati Dyah memberikan catatan dan masukan perubahan. Tentang perubahan tata cara pemilihan Ketua MPR (Pasal 2): Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) tidak tercapai, pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui pemungutan suara dengan langkah sebagai berikut: (a). Pemungutan suara; (b). Penghitungan suara;

dan (c). Penetapan hasil penghitungan suara. “Tertulis pasal 19 (7) – seharusnya pasal 19 ayat 8 – apabila merujuk pada pengaturan pasal 19,” ujarnya.

Tentang perubahan formulasi mengenai saksi (Pasal 21), para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perwakilan dari tiap Fraksi dan Kelompok DPD masing-masing 1 (satu) orang. “Formulasi kalimat kurang efektif, usulan mengembalikan pada draf sebelumnya ‘para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1(satu) perwakilan dari tiap fraksi dan kelompok DPD’, tuturnya.

Terkait tentang perubahan formulasi mekanisme penggantian pimpinan MPR: Pasal 21, 3 menyebutkan, dalam hal Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dari Fraksi atau Kelompok DPD asal Pimpinan MPR yang bersangkutan menggantikannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pimpinan berhenti dari jabatannya.

“Perbedaan makna dari formulasi tatib saat ini. Paling lama berimplikasi pejabat pengganti hanya mengganti selama 30 hari. Bila merujuk di ayat selanjutnya, tidak terdapat pengaturan mengenai pemilihan Kembali, sehingga diasumsikan pemilihan Pasal 3 merupakan mekanisme pemilihan pengganti,” paparnya. □

Perubahan Frasa ‘Keputusan’ Menjadi ‘Putusan’

Terdapat banyak isu hukum sehubungan dengan tata tertib MPR yang dipandang perlu dilakukan perbaikan untuk menyelaraskan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.

PAULUS Wisnu Yudoprakoso dalam makalahnya berjudul *Penyusunan Perubahan Tata Tertib MPR*, diuraikan tentang latar belakang perubahan tata tertib MPR, yang didasari: (1). MPR memiliki kewenangan yang strategis dalam menentukan arah bangsa; (2). Terdapat banyak isu hukum sehubungan dengan tata tertib MPR yang dipandang perlu dilakukan perbaikan untuk menyelaraskan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Paulus Wisnu menjelaskan, perubahan frasa “Keputusan” menjadi “Putusan.” Diuraikan perubahan frasa “Keputusan”



menjadi “Putusan” (1) – KBBI. putusan / pu-tus-an: hasil memutuskan: berdasarkan putusan pengadilan, dia dibebaskan. Keputusan /ke-pu-tus-an/ n-perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dsb), - ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan); kesimpulan (tt pendapat); - hasil pemeriksaan (tt ujian).

Lebih lanjut, ia mengatakan, definisi “Putusan” dalam Rancangan Perubahan Peraturan tentang Tata Tertib MPR: Putusan MPR adalah putusan yang diambil di dalam persidangan MPR atas hasil musyawarah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam persidangan MPR. Penggunaan frasa “Putusan”: Dalam praktik, Putusan identik dengan hasil yang ditetapkan oleh badan peradilan, sehingga memiliki kekuatan mengatur layaknya pengaturan atau regeling.

Paulus Wisnu pun mengurai soal terkait Panitia Ad Hoc. Dikatakan, ketentuan Panitia Ad Hoc dalam Rancangan Perubahan Peraturan tentang Tata Tertib MPR (Pasal 36): (1). Panitia Ad Hoc untuk membahas pengubahan Undang-Undang Dasar dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR, dan ditetapkan dengan Keputusan MPR. (2). Panitia Ad Hoc untuk membahas selain pengubahan Undang-Undang Dasar dibentuk dalam Rapat Gabungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR.

Lebih lanjut diungkap, permasalahan mengenai ketentuan Panitia Ad Hoc terlihat dalam Rancangan Perubahan Peraturan tentang Tata Tertib MPR (Pasal 37 ayat (3)): Dalam hal pembentukan Panitia Ad Hoc untuk membahas usul perubahan Undang Undang Dasar, pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri Sidang Paripurna. Frasa “mengundang” kurang tepat karena menimbulkan ambiguitas hukum serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena potensi tidak terpenuhinya kuorum kehadiran dalam pengambilan keputusan semakin besar. Sehingga pembahasan yang penting menjadi berlarut-larut.

Ia juga mengupas soal pelaksanaan rapat secara daring. Disampaikan, ketentuan Rapat secara daring dalam Rancangan Perubahan Peraturan tentang Tata Tertib MPR (Pasal 66): Semua jenis Sidang Paripurna dihadiri oleh anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang

memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, sidang dapat dilaksanakan secara hybrid dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

“Catatan: Ketentuan ini menimbulkan 2 pembahasan, yaitu: 1). Definisi Keadaan Bahaya, Kegentingan Yang Memaksa, Keadaan Luar Biasa, Keadaan Konflik, Bencana Alam, dan Keadaan Tertentu Lain Yang Memastikan Adanya Urgensi Nasional. 2) Mekanisme kuorum serta cara pengambilan keputusan dalam Rapat Daring,” paparnya.

Dia pun membandingkan dengan pengaturan lainnya, yakni: (a). Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang; (b). Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah



sebagai pengganti undang-undang; (c). Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR tidak mengatur mengenai siapa yang berwenang dalam menentukan kategori Urgensi Nasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 66.

Paulus Wisnu lebih lanjut memaparkan, ketentuan kuorum pengambilan keputusan dalam Rancangan Perubahan Peraturan tentang Tata Tertib MPR (Pasal 93): (1). dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) jumlah anggota MPR, dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden; (3). Dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk sidang selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2) di atas.

Menurut Paulus Wisnu, soal kuorum pengambilan keputusan: rancangan perubahan ini tidak menjelaskan apakah ketentuan kuorum dalam rapat biasa akan berlaku untuk rapat secara daring. Sebagai perbandingan, apabila mengacu ke dalam UU Perseroan Terbatas maupun Peraturan OJK sehubungan dengan pelaksanaan RUPS perseroan, maka sudah diatur mekanisme kuorum kehadiran serta pengambilan keputusan secara daring. Oleh karenanya, tata cara pelaksanaan rapat secara daring ini juga perlu diatur dalam peraturan teknis atau dalam peraturan tata tertib ini.

Sedang cara pengambilan keputusan: Rancangan perubahan ini tidak menjelaskan mengenai cara pengambilan keputusan: Ketentuan teknis mengenai pengambilan suara harus ditentukan apakah nantinya dengan ditanya kepada perorangan yang hadir atau melakukan raise hand dalam aplikasinya. Ketentuan cara pengambilan keputusan secara daring ini seharusnya berbeda, mengingat pengaplikasiannya juga berbeda. □



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

MASYARAKAT hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan pun terusik, karena beberapa komunitas merasa tidak terlindungi sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak bekerja dan berfungsi dengan efektif.

Kekacauan yang menjadi bukti semakin tumpulnya pisau hukum Indonesia begitu nyata akhir-akhir ini, ketika masyarakat disuguhi atau harus menyaksikan adanya institusi penegak hukum menunjukkan rivalitas mereka di ruang publik dengan aksi-aksi nyata yang sangat mengecewakan dan memprihatinkan. Lebih dari itu, buramnya wajah hukum negara-bangsa ini pun sempat diselingi dengan tindakan penerapan hukum yang hanya sesuai dengan kacamata hukum dan interprestasinya saja.

Publik melihat dan tahu bahwa korupsi makin marak. Namun, hanya satu-dua kasus korupsi yang direspons dengan penuh kesungguhan oleh sistem hukum. Sebaliknya, sejumlah kasus korupsi lainnya ditanggapi dengan perilaku minimalis oleh sistem yang sama. Wajar jika banyak komunitas menilai adanya tebang pilih oleh pelaksana sistem hukum dalam merespons beberapa kasus yang menjadi sorotan publik.

Destruksi penegakan hukum pun bahkan tak jarang dilakukan oleh oknum. Misalnya, merekayasa konstruksi kasus dengan menjadikan orang tak bersalah sebagai pelaku dan menjadikannya tersangka. Pada kasus kematian Vina di Cirebon, misalnya, masyarakat hingga hari-hari ini terus disuguhi cerita tentang rekayasa pelaku pembunuhan.

Pada level akar rumput, tindak pidana yang menargetkan warga pun begitu marak. Dari maraknya kasus begal di jalan, parkir liar dan pungutan liar (Pungli), teror dan intimidasi terhadap ribuan nasabah pinjaman daring atau Pinjol (pinjaman online). Hampir setiap hari ada saja warga di berbagai kota menjadi korban begal. Warga dari berbagai komunitas terus menjadi korban pungutan liar, misalnya komunitas pedagang kaki lima, komunitas angkutan umum hingga komunitas supir truk angkutan barang.

Tak tahan menerima ketidakadilan perlakuan dari oknum petugas di jalan raya, Jumat siang, 14 Juni 2024, ratusan supir angkutan barang yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) menggelar aksi di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Terbanteng pesan dari komunitas supir yang sangat menyayat hati; "Uang Rokokmu adalah Uang Makan Bagiku dan Keluargaku".

Nasabah Pinjol yang menjadi korban teror dan intimidasi debt collector menjadi bukti lain tentang

komunitas yang tak terlindungi oleh sistem hukum. Jumlah kasusnya tidak sedikit. Sebuah laporan pernah mencatat, ada 39.866 pengaduan korban pinjol ilegal selama periode Januari 2022 – Januari 2024. Pada awal 2023 misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa korban Pinjol paling banyak adalah komunitas guru (42%), korban pemutusan hubungan Kerja (21%), ibu rumah tangga (18%), karyawan (9%). Korban lainnya adalah komunitas pedagang, pelajar, hingga pengemudi ojek online.

Seorang pakar perencana keuangan bahkan mengungkapkan bahwa sebagian dari komunitas milenial dan Gen-Z pun terjerat Pinjol dan investasi bodong. OJK pun mencatat, sekitar 30% sampai 40% korban investasi bodong adalah milenial dan Gen-Z. Fakta ini menjadi bukti lain yang menjelaskan bahwa sistem hukum belum mampu melindungi para nasabah Pinjol ketika debt collector menerapkan teror dan intimidasi saat mengajukan tagihan.

Dari ragam fakta permasalahan yang menyelimuti hidup keseharian masyarakat itu, setidaknya bisa dimunculkan dua kesimpulan; sistem hukumnya belum bekerja dengan efektif atau, sistem hukumnya sudah bekerja tetapi pisau penegakan hukumnya yang tumpul atau ditumpulkan. Dua kesimpulan ini patut dihadapkan pada persepsi publik tentang derajat ketertiban umum akhir-akhir ini. Dari persepsi publik, catatan yang mengemuka adalah kecewa, sarat keluh kesah, hingga merasa tidak terlindungi. Seakan tak berdaya, masyarakat hanya bisa prihatin ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum.

Rasa keadilan publik yang terusik itu sudah seharusnya ditanggapi dengan penuh kebijaksanaan oleh semua perangkat negara, utamanya institusi-institusi yang diberi kuasa menegakkan hukum.

Sistem hukum negara sudah pasti baik. Sistem hukum itu menaungi ragam peraturan dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati untuk menata ragam aspek kehidupan masyarakat demi tujuan kebaikan bersama. Tujuan baik itu akan terwujud kalau semua peraturan dan ketentuan dalam sistem hukum itu dipatuhi, dilaksanakan dan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan dimaksud.

Kriminalitas dan bentuk pelanggaran hukum lainnya akan selalu ada dalam dinamika kehidupan bersama. Tetapi, oleh sistem hukum yang bekerja dengan baik dan efektif akan mampu meminimalisir kriminalitas dan ragam pelanggaran hukum lainnya. Kemampuan sistem hukum meminimalisir kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya sangat ditentukan oleh kinerja institusi penegak hukum. Dan, kinerja institusi penegak hukum ditentukan oleh kepatuhan dan ketaatan pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Institusi penegak hukum ibarat pisau yang harus selalu tajam; tajam ke bawah pun tajam ke atas.

Pisau penegakan hukum sekali-kali tidak boleh tumpul atau ditumpulkan. Ketajaman pisau penegakan hukum sejatinya amat sangat dibutuhkan demi terjaganya ketertiban umum atau kebaikan bersama. Sekali saja pisau penegakan hukum tumpul atau ditumpulkan, buahnya adalah kekacauan dan kerusakan. Pengingkaran terhadap sistem hukum oleh penegak hukum pada gilirannya akan merusak norma-norma sosial.

Ketika norma-norma sosial rusak dan kacau, dia menggambarkan derajat peradaban komunitas itu. Maka, sistem hukum harus dimampukan untuk bekerja memulihkan ketertiban umum. Dan, jangan biarkan pisau hukum Indonesia tumpul atau ditumpulkan. □

Pelaksanaan Haji Tahun 2024

Yandri Susanto: Alhamdulillah Lebih Baik Dibanding Tahun Lalu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERDASARKAN pengamatan di lapangan, Alhamdulillah para jemaah Indonesia senang dengan pelayanan yang ada, baik dari sisi konsumsi maupun lainnya,” kata Wakil Ketua MPR Yandri Susanto.

Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, mengucapkan syukur Alhamdulillah karena pelaksanaan haji 1445 Hijriyah berlangsung

lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar dan tidak ada tragedi penelantaran dan penumpukan jemaah di Muzdalifah seperti tahun lalu.

“Alhamdulillah pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar. Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar. Jemaah bisa beribadah secara baik,” ungkap Mantan

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat meninjau lapangan dan pemondokan haji jemaah Indonesia di Mekah, 18/6/2024.

“Proses mobilisasi jemaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina berjalan lebih baik. Data jemaah yang meninggal juga menurun di bandingkan tahun lalu,” ungkap Yandri.

Pansus Belum Diperlukan

Dalam kesempatan itu, Yandri Susanto juga menyatakan bahwa rencana pembentukan Pansus terkait hasil temuan Timwas Haji tidak diperlukan. Upaya evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panja Haji.

“Tidak perlu dibentuk Pansus untuk menyikapi hasil temuan Timwas Haji DPR. Evaluasi cukup dilaksanakan melalui Raker,” jelas Yandri Susanto

Salah satu yang disoal adalah terkait bahan baku pangan yang berasal dari Thailand. Sementara dengan jumlah jemaah asal Indonesia 240 ribu lebih tentu seharusnya bahan baku pangan berasal dari dalam negeri.

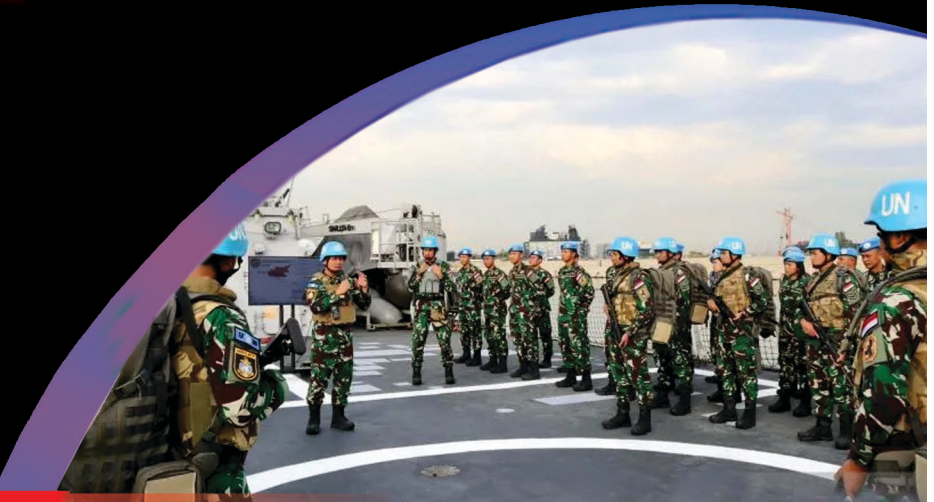
Menurut Yandri, inisiasi bahan baku pangan dari Indonesia sudah dimulai ketika dirinya menjadi Ketua Komisi VIII Tahun 2019-2022. Realisasinya, keran ekspor untuk pemenuhan bahan baku asal Indonesia sudah dibuka oleh Bapak Menteri Perdagangan.

“Saat ini tinggal memaksimalkan pelaku usaha nasional untuk menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan oleh jemaah,” lanjut Yandri

“Namun, apabila bahan baku dari tanah air belum tersedia tentu penyelenggara harus tetap menyediakan konsumsi bagi jemaah walaupun bahan bakunya berasal dari negara lain,” jelas Waketum PAN Yandri Susanto

Perlu kami sampaikan juga bahwa hasil pengamatan di lapangan, termasuk ke beberapa pemondokan, Alhamdulillah para jemaah senang dengan pelayanan yang ada. Baik dari sisi konsumsi maupun lainnya. □





Ke Gaza Pasukan Indonesia Akan Kembali

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Pernyataan itu mendapat dukungan dari DPR. TNI pun sudah menyusun kekuatan personil dan alutsista jika PBB memberikan izin. Pasukan perdamaian dari Indonesia sudah kesekian kalinya ditempatkan di daerah-daerah konflik bersenjata. Kali pertama pasukan dikirim, KONGA I, ditempatkan di Gaza. Bila misi dilakukan seperti yang dikatakan Prabowo maka pasukan Indonesia akan kembali ke Gaza setelah tahun 1957.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEBANYAK 45 delegasi yang membidangi masalah pertahanan dari berbagai negara, pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024, berkumpul di Singapura. Di negara kecil yang berada di seberang Pulau Batam, Indonesia, itu mereka mengikuti *Dialog Shangri-la XXI*. Di antara delegasi yang hadir di acara itu adalah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, mantan Danjen Kopassus itu didaulat menjadi pembicara dalam sesi *Special Address*.

Di hadapan para peserta dialog, pria yang terpilih sebagai Presiden dalam Pilpres 2024 itu mengungkap, beberapa isu strategis keamanan global. Dalam web *kemhan.go.id*, 1 Juni 2024, ia mengatakan, "Saya hadir ketiga kalinya dalam forum ini. Kita berkumpul di sini untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna dan sangat penting untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di dunia," ujarnya.

Lebih lanjut, Menhan menyatakan, bagi Indonesia mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan

internasional. Indonesia yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerja sama kita dapat mencapai tujuan tersebut.

Terkait masalah di Palestina, Prabowo menuturkan, peristiwa tragis di Rafah telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata. Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera

menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami sepenuhnya tragedi ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," tegas mantan Ketua Umum HKTI itu.

Bangsa Indonesia, katanya, berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sebagai



Prabowo Subianto



Meutya Hafid

langkah penting menuju solusi nyata dan langgeng untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, dan dengan demikian tercipta perdamaian yang nyata di kawasan tersebut.

Jenderal berbintang empat yang hobi menunggang kuda itu menyatakan, Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan bantuan ke Gaza, serta jika diperlukan dan diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. “Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka, dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat, jika situasi memungkinkan,”

ungkapnya seperti yang termuat di kemhan.go.id.

Ungkapan Prabowo Subianto yang siap mengirim pasukan perdamaian di Gaza itulah yang selanjutnya menjadi *headlines* dan *trending topic* di berbagai media. Sambutan positif dan dukungan pun mengalir pada keinginan itu. DPR, TNI, akademisi, dan pengamat di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan pun silih berganti mengomentari.

Di dpr.go.id, 7 Juni 2024, diberitakan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung upaya Prabowo Subianto mengirim pasukan penjaga perdamaian dan tenaga medis ke Gaza jika mendapat mandat dari PBB. “Komisi I DPR mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan tengah

menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza,” ujarnya.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut, bila hal itu dilakukan bisa menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang. Mantan *presenter* berita di Metro TV itu meminta seluruh pihak mendukung rencana itu. “Indonesia telah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak tahun 1957. Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tuturnya.

Rekan separtai dan se-fraksi dari Meutya, Dave Laksono, dalam web yang sama mengatakan, pasukan perdamaian bukan hal yang baru bagi Indonesia. “(Indonesia) bahkan cukup rutin (mengirim),” ungkapnya. Untuk itu, apabila PBB menugaskan, Indonesia bisa segera mengirimkan pasukan perdamaian.

Bila DPR sudah mendukung, lalu bagaimana kesiapan TNI sendiri bila PBB memberi mandat atau mengizinkan pasukan perdamaian Indonesia berada di Gaza? Dalam web tnil.mil.id, 6 Juni 2024, diberitakan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan kesiapan pasukannya untuk ditempatkan sebagai pasukan perdamaian dunia di Jalur Gaza, Palestina, jika mendapat mandat dari PBB.

Agus Subiyanto menuturkan, akan menyiapkan Brigade Komposit yang terdiri dari Batalyon Suport, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni, dan Batalyon Perbekalan, serta dua unit kapal rumah sakit yang dilengkapi dengan dokter, perawat, serta peralatan kesehatan, rumah sakit lapangan serta dua unit Helikopter TNI AU dalam misi tersebut.

Lebih lanjut, dalam web itu diungkap, kapal yang disiapkan adalah KRI dr. Radjiman dan KRI dr. Soeharso, karena kedua kapal tersebut mampu memberikan perawatan bagi masyarakat yang terdampak konflik. Sedangkan Batalyon Zeni mampu merehabilitasi konstruksi bangunan, Batalyon Perbekalan mampu membuat dapur umum dan Batalyon Suport disiapkan untuk melakukan pengamanan.

“Kehadiran TNI memberikan manfaat bagi Indonesia, yaitu pengakuan internasional



Agus Subiyanto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berupa kontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian, juga merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai dalam Pokok Pokok Kebijakan Panglima TNI 2024, yaitu TNI yang PRIMA,” ujarnya seperti yang termuat *dalam tni.mil.id*.

Seperti dikatakan Dave Laksono bahwa pasukan dari Indonesia, baik TNI maupun Polri, yang ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia bukan hal baru. Dalam sejarah yang termuat di *Wikipedia*, diceritakan ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan Sidang Menteri Luar Negeri Liga Arab. Hasil dari sidang tersebut, pada 18 November 1946, Liga Arab menetapkan Resolusi Tentang Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Sebagai Negara Merdeka dan Berdaulat Penuh. Pengakuan tersebut adalah suatu pengakuan *de jure* menurut hukum internasional.

Sebagai bukti Liga Arab mengakui Indonesia Merdeka, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasya, mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Mohammad Abdul Mun'im, untuk melawat ke Indonesia. Perjalanan ke Indonesia yang dilakukan oleh Abdul Mun'im disebut tidak mudah. Belanda yang masih bercokol dan tidak rela mengakui Indonesia Merdeka menghalang-halangi misi yang dibawa oleh Abdul Mun'im.

Upaya keras yang dilakukan oleh utusan Liga Arab itu berhasil, buktinya ia bisa tiba di Ibu Kota Indonesia yang saat itu



Dave Laksono

berkedudukan di Yogyakarta. Di kota gudeg itu, Abdul Mun'im akhirnya diterima oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta secara kenegaraan pada 15 Maret 1947. Misi dari Liga Arab tersebut dicatat sebagai pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing.

Dalam babak selanjutnya, dengan mengacu pada apa yang ditulis oleh *Wikipedia*, hubungan yang baik antara Liga Arab, khususnya Mesir, tak sebatas pada pengakuan kemerdekaan Indonesia. Mesir membuka diri kepada Indonesia untuk membuka perwakilan Indonesia di sana.

Pemerintah Indonesia pun merespon dengan menunjuk HM. Rasyidi sebagai *Charge d’Affairs* atau “Kuasa Usaha” Indonesia yang berkedudukan di Mesir.

Rasyidi selanjutnya merangkap sebagai diplomat untuk seluruh negara yang terhimpun dalam Liga Arab. Hubungan Liga Arab-Indonesia pun semakin akrab dan saling menguatkan, buktinya mereka memberi dukungan pada perjuangan Indonesia sewaktu terjadi perdebatan di Forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membicarakan sengketa Indonesia-Belanda, para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.

Sebagai bangsa yang tahu balas budi, Indonesia pun juga mendukung negara-negara Arab bila ada masalah pada mereka. Untuk menambah jalinan silaturahmi, pada Mei 1956, Presiden Soekarno melawat ke Mesir dan pada April 1960 melakukan hal yang sama ke Irak.

Di tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi agar Inggris, Perancis, dan Israel, menarik pasukannya dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I atau KONGA I.

Dari catatan yang ada, KONGA I dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957. Kontingen ini terdiri dari Resimen Infanteri-15 Tentara Territorium (TT) IV/Diponegoro, 1 kompi dari Resimen Infanteri-18 TT V/Brawijaya di Malang. KONGA I di bawah komando Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo. Selanjutnya Hartoyo diganti oleh Letnan Kolonel Infanteri Suadi Suromihardjo.

Seluruh anggota pasukan, yang berkekuatan 559 personil, dalam perjalanan menuju ke Mesir diangkut dengan pesawat C-124 Globe Master. Pesawat itu milik *Air Forces*, Angkatan Udara, Amerika Serikat. Rute yang ditempuh dari Jakarta menuju Beirut, Libanon. Di Beirut pasukan dibagi dua, ada yang ditempatkan di Abu Suweir, ada pula yang ditempatkan di Al Sandhira. Dalam misi selanjutnya pasukan yang berada di Sandhira digerakkan atau dipindah ke Gaza. Sedang kelompok Komando berada di Rafah. KONGA I mengakhiri misinya pada 29 September 1957. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWGI dari berbagai sumber



Di Sentul Kawah Candradimuka

Pengalaman pribadi SBY di Bosnia dan kerapnya pasukan dari Indonesia ditugaskan di wilayah konflik membuat pemerintah membangun pusat pelatihan pasukan perdamaian di Sentul. Tempat yang disebut IPSC itu mendapat perhatian dari PBB. Kelak bisa menjadi kawah candradimuka bagi personal dari berbagai negara.



Susilo Bambang Yudhoyono

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MENJADI bagian dari pasukan perdamaian yang siap dikirim ke wilayah-wilayah konflik di berbagai negara dengan suasana bahasa, budaya, iklim, yang tak sama dengan Indonesia tentu memerlukan persiapan bagi pasukan perdamaian dari Indonesia. Hal demikian penting agar saat bertugas di medan konflik, pasukan yang dikirim dalam misi khusus itu tidak mengalami

shock.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah menjadi bagian dari pasukan perdamaian punya pengalaman pribadi ketika berada di Bosnia. Menurut dia, seperti terungkap dalam *nasional.tempo.co*, 19 Desember 2011, saat itu ada 38 negara yang mengirim pasukannya dan disebar di enam wilayah. Indonesia mengirim sekitar 650 perwira, namun sayang dari ratusan

perwira itu hanya sedikit yang menjadi pimpinan grup karena terkendala bahasa, keahlian menyeter, dan kurangnya pengetahuan soal misi perdamaian. “Jumlah perwira-perwira Indonesia yang menjadi *leaders* tidak terlalu banyak, karena hambatan bahasa dan pengetahuan tentang peace keeping mission itu sendiri”, ujarnya seperti yang termuat di web itu.

Ditambahkan, minimnya kemampuan para perwira itu juga berakibat buruk. Beberapa anggota kontingen terpaksa kembali ke Tanah Air, padahal mereka belum lama tiba di lokasi. “Ada 3-5% anggota kontingen Indonesia, TNI dan Polri, perwira dan bintara pulang padahal baru 1 atau 2 minggu di Bosnia. Kenapa? Karena mereka tidak lulus mengemudi dan tidak lulus bahasa Inggris,”ujarnya.

Faktor di atas ditambah dengan semakin seringnya pasukan perdamaian dari Indonesia dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat pemerintah menjadikan Desa Tangkil, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Kawah Candradimuka atau pusat pelatihan bagi mereka yang dipersiapkan menjadi pasukan perdamaian. Tempat ini tersedia Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (Fasdiklat PMPPTNI) atau *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC).

Berdasarkan laporan yang tertulis di *nasional.tempo.co*, 19 Desember 2011, IPSC mulai dipersiapkan oleh SBY sejak tahun 2010. Di kawasan seluas 261,712 hektar itu disebut sebagai area untuk pelatihan pengelolaan perdamaian, penanggulangan terorisme, penanggulangan bencana, dan pelatihan pasukan siaga.

Di *web* itu diberitakan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pusat pendidikan dan pelatihan ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. “Di sinilah nanti akan disiapkan personel TNI yang akan dikirimkan dalam berbagai misi perdamaian dunia,” ujarnya kala itu. Lebih lanjut dikatakan, di IPSC akan dioperasikan



Purnomo Yusgiantoro



untuk berbagai latihan militer dalam menjaga perdamaian. Termasuk penempatan personil TNI dengan berbagai keahlian, seperti kesamaptaan dan bahasa. “Keberadaan Pusat Pemeliharaan Perdamaian ini akan menjadi pusat pelatihan militer personil TNI sebelum diturunkan dalam operasi pemeliharaan perdamaian,” tegasnya lagi.

Hadirnya IPSC pun menjadi perhatian PBB. Diberitakan di *kemhan.go.id*, 20 Maret 2012, tempat yang telah diresmikan oleh Presiden SBY pada 19 Desember 2011 itu mendapat kunjungan kehormatan dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Ban Ki dalam

kunjungan itu didampingi istrinya, Ban Soon-taek, serta sejumlah Delegasi PBB.

Kehadiran Ban Ki dan tamu lainnya disambut langsung oleh SBY, Purnomo Yusgiantoro, dan beberapa menteri terkait. Di tempat itu banyak hal yang dilihat oleh para tamu, seperti menyaksikan ketrampilan delapan Satuan Tugas di IPSC, yakni Satuan Tugas Kesehatan (*Medical Evacuation*), Satuan Tugas Kompi Zeni, Satuan Tugas POM (Pengaturan Lalu Lintas), Peninjauan Sarana Prasarana, Pemantau Militer (*Military Observers*), Satuan Tugas Batalyon Mekanis (Patroli), Satuan Tugas *Force Pro-*

tection Company (Fix Guard), dan *Cimic Smart Car* (Mobil Pintar).

Di *web* itu disebutkan, kunjungan Ban Ki memberikan arti yang sangat penting bagi Indonesia karena itu merupakan bentuk dukungan dan dorongan kepada Indonesia dalam meningkatkan kontribusi dan peran aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Hadirnya Ban Ki di IPSC diharapkan dapat memberikan informasi langsung terkait perkembangan terkini dari *UN Peacekeeping Operations* sekaligus memberikan kesempatan pada Sekjen PBB untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas *Peacekeepers* Indonesia.

Di masa-masa akhir jabatan, SBY menambah prasasti atau membangun simbol-simbol perdamaian di IPSC. Diberitakan oleh berbagai media pada Agustus 2014, pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu meresmikan tiga simbol perdamaian dunia. Ketiga simbol itu adalah: *Pertama*, Patung Penjaga Perdamaian.

Dalam rilis yang beredar menjelaskan, Patung Penjaga Perdamaian mencerminkan peran serta prajurit TNI dalam penugasan Pasukan Misi Perdamaian PBB dengan desain kesiapan dan keperkasaan prajurit TNI. Patung tersebut merupakan rancangan seniman Yogyakarta dengan menggunakan bahan utama perunggu seberat 13 ton.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Untuk mempercantik patung tersebut, di sekitarnya dilengkapi dengan plasa dan taman seluas 1.200 meter persegi.

Kedua, Menara Bendera Merah Putih. Menara ini memiliki tinggi 150 meter dan berada di ketinggian 410 meter di atas permukaan laut, dan menjadi menara bendera tertinggi di Indonesia dan tertinggi ketiga di dunia. Dijelaskan, menara ini menjadi salah satu simbol perjuangan bangsa Indonesia. Menara bendera tertinggi itu merupakan hasil rancangbangun putera Indonesia dengan konsep dasar berbentuk bambu runcing. Struktur utama terbuat dari pipa besi galvanis menggunakan sistem *pole tower* atau rangka menara seberat 309 ton yang ditopang 7 kaki sebagai lambang sapta marga. Menara bendera ini dapat berputar 360 derajat mengikuti arah angin. Bendera yang dikibarkan di menara tersebut seberat 300 kg berukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter terbuat dari bahan parasut yang tahan dari cuaca maupun angin.

Ketiga, Gong Perdamaian Dunia. Berstandar internasional memiliki karakteristik berat 250 kg dan diameter 2 meter. Gong yang dibuat di Jepara, Jawa Tengah, itu menggunakan material logam kuningan yang dilapisi emas 18 karat.

SBY menjelaskan bahwa kawasan IPSC dibangun sebagai wujud pelaksanaan amanah UUD NRI Tahun 1945 agar bangsa Indonesia turut berperan aktif memelihara perdamaian dan ketertiban dunia. Selain itu, adalah merupakan kewajiban seluruh anggota PBB untuk berkontribusi dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, serta mempertimbangkan pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan operasi militer, selain perang/*military operations other than war*.

Lebih lanjut dalam berita yang ada di *setneg.go.id*, 8 April 2014, tertulis prestasi Indonesia sekarang sebagai negara terbesar ke-17 penyumbang pasukan penjaga perdamaian dunia, di masa

mendatang Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menjadi negara terbesar ke-10 dengan mengirimkan jumlah pasukan penjaga perdamaian dunia sebanyak 4.000 personil. "Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang semakin efektif dan nyata dalam peran serta memelihara perdamaian dan keamanan dunia." tuturnya.

Dalam perkembangan, kawasan IPSC bisa jadi tak hanya diperuntukan bagi personal dari Indonesia. Kelak personal dari negara lain bisa dilatih di sana. Kemungkinan itu bisa terjadi, sebab Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan Deputi Sekjen untuk Misi Perdamaian PBB Jean Pierre Lacroix, di sela-sela Debat Terbuka DKPBB mengenai Misi Perdamaian, di New York, Amerika Serikat, dirinya menawarkan Pusat Misi Perdamaian Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, sebagai tempat bagi pelatihan pasukan perdamaian PBB. □

AWG/dari berbagai sumber

Peran Female Blue Helmets dari Indonesia

Hadirnya perempuan di pasukan perdamaian membuat konflik yang terjadi semakin cepat selesai. Pendekatan yang dilakukan belum tentu bisa dilakukan oleh personil pria. Indonesia memprakarsai Resolusi PBB Tentang Peran Perempuan Dalam Pasukan Perdamaian. Para Female Blue Helmets itu tak hanya menjaga perdamaian, namun juga memperkenalkan berbagai aspek kehidupan.

TERUNGKAP dari data yang ada, pasukan perdamaian dari Indonesia atau yang disebut Kontingen Garuda telah melakukan banyak misi di berbagai wilayah konflik, seperti di Mesir, Palestina, Kongo, Vietnam, Irak, Namibia, Kuwait, Kamboja, Somalia, Bosnia, Macedonia, Slovenia, Kroasia, Reblaka, Mozambik, Filipina, Tajikistan, Sierra Leone, Nepal, Darfur, dan beberapa negara lainnya.

Dari kiprahnya ikut menjaga perdamaian dunia, sejak tahun 1957, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 38.000 pasukan penjaga perdamaian PBB. Indonesia berada pada ranking ke-9 negara kontributor personil militer dan polisi pada misi UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MINUSMA (Mali), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINURSO (Sahara Barat), UNMISS (Sudan Selatan) dan UNISFA (Abyei, Sudan) *kemlu.go.id*, 26/11/2018.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Iqbal, dalam *ipdefenseforum.com*, 24 Januari 2024, di mana pun Indonesia terlibat dalam misi

pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia selalu memainkan peran penting. "Karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memberikan kenyamanan bagi

berbagai pihak yang berkonflik, sehingga kehadiran Indonesia menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” ujarnya. Disebut pada Desember 2023, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengumumkan ikrar bahwa Indonesia untuk menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB hingga tahun 2025.

Banyak cerita dari misi perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia sejak Kontingen Garuda I hingga ke kontingen-kontingen berikutnya. Di antara cerita itu terungkap di *voaindonesia.com*, 19/08/2020. Di web itu diungkap soal keterlibatan personal perempuan di pasukan perdamaian (*Female Blue Helmets*). Di antara personal perempuan itu adalah Briptu Tika Nur Pratiwi.



Briptu Tika Nur Pratiwi

la bertugas di Sudan Selatan pada UNMISS serta Lettu Laut Lilia Budiyantri, dan Lettu Caj. Nendy Koesey yang bertugas di Republik Demokratik Kongo pada MONUSCO.

Nendy Koesey di *web* itu diceritakan, pertengahan Desember dalam misi pertama, Operasi Garuda I, dapat informasi ada sekelompok milisi yang ingin menyerahkan diri ke PBB. Milisi bersenjata itu melakukan hal yang demikian karena menaruh harapan dan percaya pada PBB. Di antara milisi itu ada kaum Perempuan, istri ikut suami yang menjadi milisi. Mereka bergabung dalam milisi dengan alasan bila tak melakukan itu, mereka tidak bisa menghidupi atau memberi makan pada anak-anak mereka. “Di situlah saya merasakan peran saya sebagai perempuan untuk ikut meyakinkan mereka bahwa menyerahkan diri memang tepat,”

ujarnya.

Lebih lanjut diungkap, memang benar komandan dan kasie-kasienya mempunyai peran yang besar, namun pendekatan perempuan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. “Kita bisa menyentuh, merangkul, bahasa saya cukup baik. Mereka akhirnya terbuka mengatakan, ingin menyerahkan diri tapi kalau menyerahkan diri nanti bagaimana makannya? Di situ lah proses negosiasi, membujuk, bagaimana saya meyakinkan ibu ini agar bicara pada suaminya yang notabene milisi,” paparnya.

Untuk membujuk mereka, prosesnya cukup panjang. Sekitar satu minggu, dirinya bersama yang lain tidur di luar dan melakukan perjalanan darat. Dari misi yang dilakukan ia



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

semakin yakin peran perempuan bisa masuk dan memberikan *brainwashing* ke para milisi. “Dari yang kerjanya hanya merampok dan membunuh untuk bisa hidup, akhirnya mereka mau menyerahkan diri,” ujar Nendy Koesey dalam *voaindonesia.com*.

Diceritakan di *web* itu, personil perempuan itu tak hanya mendamaikan konflik namun juga mengajarkan banyak hal. Diceritakan, ada personil yang membawa bibit tanaman dari Indonesia, seperti kangkung dan cabai. Selepas bertugas ia menyirami tanaman di kebun. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh personil dari Indonesia, namun juga oleh personil negara lainnya. Mereka juga bawa bibit tanaman unggul dari negaranya. Di saat panen, mereka berbagi bahkan masak bersama. Antarpersonil perempuan itu saling berbagi resep dari negara masing-masing.

Pada 28 Agustus 2020, Dewan Keamanan (DK) PBB berhasil mengadopsi Resolusi 2538 Tentang *Women in Peacekeeping*. Resolusi itu, menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu, Febrian Alphyanto Ruddyard, merupakan prakarsa Indonesia, *cnnindonesia.com*, 8 September 2021. Resolusi itu disebut didukung oleh 97 negara dan seluruh anggota DK PBB.

Resolusi ini dikatakan memiliki makna yang dalam, sebab secara khusus memuat memajukan peran personel *peacekeeper* perempuan serta upaya penyediaan lingkungan yang kondusif bagi mereka. Ruddyard menjelaskan, inisiatif Indonesia dalam memajukan Resolusi DK PBB 2538 ini dilatarbelakangi fakta bahwa Indonesia

sebagai negara kontributor terbesar dalam misi perdamaian PBB.

Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia konsisten menempati 10 besar sebagai negara kontributor perdamaian PBB. Lebih lanjut dalam *web* itu dikatakan, saat ini Indonesia duduk posisi 8 dari 10 negara terbesar dengan 2.613 personel, dan 178 di antaranya perempuan. Dengan jumlah personel perempuan yang besar, pihaknya memahami perempuan punya peranan penting untuk memainkan mandat misi perdamaian PBB.

“Kita juga berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemajuan peran *peacekeepers* perempuan, tidak hanya jumlah, tapi juga kualitas melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas,” ujarnya. □

AWG dari berbagai sumber

Hardi Nurdin

Penggiat Literasi

Membiasakan Menulis untuk Mahasiswa dan Generasi Muda



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PENGETAHUAN atau wawasan literasi untuk mahasiswa, pelajar, dan generasi muda pada umumnya mesti dikembangkan sejak sekarang ini. Pengetahuan dan wawasan tentang ini (literasi) sangatlah penting untuk generasi muda.

Sebab, di masa yang akan datang atau pasca mereka lulus dari kampus atau sekolah, pengetahuan dan keterampilan di bidang literasi ini sangat dibutuhkan. Contoh, mereka generasi muda bisa menjadi penulis atau periset.

Pengetahuan literasi juga akan meningkatkan kualitas dan kapabilitas mereka sebagai generasi muda penerus kepemimpinan bangsa. Kita semua ingin di masa depan, bangsa ini dipimpin oleh generasi muda yang memiliki wawasan yang luas dalam hal Iptek. Literasi ini adalah salah satu wadah untuk peningkatan kualitas generasi muda itu. □

DER

M. Edwin

Ketua Pencak Silat Beksi

Ingin Belajar Organisasi dari Pimpinan MPR

KEBETULAN kami adalah pengurus baru dari pencak silat Beksi. Kami ingin mendapatkan wawasan dan pengarahan dari Bapak Hidayat Nur Wahid untuk perjalanan organisasi kami. Kami ingin membentuk perkumpulan pencak silat Beksi ini menjadi sebuah organisasi yang baik, sebab banyak dari anggota kami anak-anak muda yang sangat berpotensi.

Seperti diketahui, membentuk dan menjalankan organisasi itu memang tidak mudah, banyak sekali kendala dan tantangan, serta hambatannya. Dalam perjalanannya, pencak silat Beksi juga mengalami itu semua.

Kebetulan Bapak Hidayat sebagai panutan kami, sebab hubungan kami dengan beliau sudah terbilang dekat. Sudah beberapa kali kita menggelar berbagai acara bersama, terutama saat organisasi ini dipegang oleh almarhum Baba Basir Bustomi.

Alhamdulillah, beliau Bapak Hidayat memberikan masukan, dan pencerahan untuk menambah wawasan kami tentang bagaimana menjalankan organisasi dengan baik dan menghadapi semua tantangan serta kendalanya.

Intinya, kami sangat berharap, agar petinggi negara atau lembaga negara berkenan memerhatikan organisasi masyarakat bawah, seperti kami ini. □



DER

Bencana Sumbar

Orang Baik itu Bernama

Doni Putra



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BENCANA seolah tak pernah berhenti mengguncang bumi pertiwi. Pekan kedua bulan Mei silam, giliran Sumatera Barat, yang luluh lantak diterjang banjir dan tanah longsor. Galodo, begitu orang Minang menyebut bencana banjir bandang, terjadi akibat hujan deras dengan durasi panjang. Potensi kerusakan yang ditimbulkan banjir ini terasa semakin besar, karena datang bersamaan turunnya lahar dan material erupsi Gunung Marapi. Akibatnya, lima daerah, terkena imbas banjir tersebut, yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.

Galodo dan tanah longsor di Sumatera Barat ini mengakibatkan rusaknya rumah, tempat ibadah, sekolah, jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Bencana ini juga mengakibatkan banyak korban manusia, mulai dari yang luka-luka, meninggal dunia, hingga banyak korban yang belum ketahuan rimbanya. Dan, tak terhitung pula korban harta benda.

Bencana alam di Sumatera Barat ini menimbulkan iba dan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Mulai dari anggota keluarga serta kerabat korban, masyarakat Sumbar yang ada di rantau, hingga kelompok masyarakat dan berbagai komunitas.

Salah satu yang berempati dan turun langsung membantu meringankan penderitaan para korban adalah Doni Putra (36). Doni merupakan relawan Disaster Management Center (DMC) Dompot Dhuafa. Pada peristiwa banjir dan longsor di Sumbar, lelaki asal Jambi, ini fokus memberi pertolongan kepada para korban di Kabupaten Tanah



Datar. Dalam aksi respons DMC Dompot Duhafa di Tanah Datar, ia bertugas mencari korban yang hilang.

“Mencari orang hilang, itu tidak mudah, perlu analisis. Perlu tahu di titik mana orang tersebut hilang di sungai dan selanjutnya titik mana yang perlu kita operasi,” ungkap Doni.

Terbukti, sekalipun berjuang bersama tim

SAR Gabungan, operasi yang diikuti Doni tak kunjung berbuah hasil. Namun, tekad hatinya menolong masyarakat Kabupaten Tanah Datar tak berkurang, meski hanya sebiji zarah.

“Rasa penat menyerang seluruh anggota tim, termasuk saya. Tetapi, kelelahan itu hilang berkat rasa ikhlas. Untuk tetap ikhlas saya senantiasa mengingat-ingat niat sedari awal keberangkatan ke sini, itulah cara saya mempertahankan rasa ikhlas supaya terjaga dan tidak berkurang,” ungkap Doni. Itu nikmat tersendiri

Seperti peribahasa mengatakan, ‘di mana ada gula di situ ada semut.’ Keterlibatan Doni dalam upaya pertolongan terhadap para korban sudah terjadi sejak lama. Ia sudah sering mengikuti kegiatan rescue di berbagai bencana. Jadi, bukan hanya di Kabupaten Tanah Datar, saja ia berkontribusi memberikan pertolongan dan kemanusiaan. Jadi, ibaratnya di mana ada bencana di situ ada Doni.

Dari dulu pula Doni senantiasa berusaha meluruskan niat, saat terjun di lokasi bencana. Karena, dengan niat yang lurus dan penuh keikhlasan, Doni percaya tugas serta beban yang diembannya bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak tergoyahkan oleh suasana sekitar, terlebih saat kesulitan menghimpit.

Pengalamannya telah membetuk jiwa



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

serta kepribadian, agar mengutamakan rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah di setiap medan yang dijelajah. Dan, itu sangat membantunya, ketika melaksanakan operasi SAR di Tanah Datar. Khususnya, saat melintasi tumpukan lumpur, menyisir bibir dan menyeberangi sungai yang arusnya deras. Bahkan, ia kerap gusar jika satu ketika urung hadir menolong penyintas bencana maupun kecelakaan.

Hingga kini Doni menyukuri kebersamaannya sebagai relawan DMC Dompot Dhuafa. Ia menilai, nasibnya saat ini jauh lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan Dompot Duafa. Ia juga berterima kasih bisa turut melakukan aksi kerelawanan di Tanah Datar. Karena, sebelum bergabung dengan DD, Doni kerap melaksanakan aksi pertolongan secara swadaya.

Bersama DD, Doni bisa memberikan

pertolongan dengan lebih baik. Tidak asal memberi pertolongan, seperti yang dilakukan sebelumnya. Karena, kebersamaannya dengan DMC Dompot Dhuafa membuatnya mendapat Training Tanggap Bencana (TTB). Dan, itu membuat pandangan serta kemampuannya seputar bencana dan kerelawanan semakin luas serta penuh perhitungan.

Maklum, sebelum bergabung dengan DMC Dompot Dhuafa, upaya pertolongan yang diberikan bersama teman-temannya tidak didasari SOP yang jelas. Tetapi kini, kecerobohan tersebut telah dia evaluasi. Ia selalu menggunakan SOP yang jelas, setiap kali turun memberi pertolongan, termasuk yang dilakukannya di Tanah Datar.

Menurut Dony, sebelum bergabung dengan DD, ia sudah sering memberikan pertolongan kepada para korban, baik saat bencana alam juga kecelakaan. Bahkan, ia kerap menjadi orang pertama yang memberi pertolongan, ketika korban merasakan penderitaan yang sangat. Seperti, membawa anak sekolah yang ditabrak mobil ke rumah sakit seorang diri, membantu seorang nenek terserempet motor, juga mencari orang tersesat di tengah hutan selama empat hari.

Upaya pertolongan yang dilakukan itu seringkali dia kerjakan saat orang lain malah memilih menonton atau berpangku tangan. Sehingga "kesendiriannya" itu membuat Doni merasa perlu ada organisasi yang mewadahi. Karena, pantas saja jika sekarang ia sangat menyukuri kebersamaannya dengan DMC DD. □

(Sumber : dmc.dompotdhuafa.org.)

MBO

Sebenarnya Dana Tapera Buat Siapa?

Di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, muncul rencana untuk menerapkan program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Namun, rencana itu mendapat penolakan dari banyak pihak, termasuk para pekerja. Lalu bagaimana duduk masalahnya? Berikut pendapat para wakil rakyat tentang isu panas ini.

Kamrussamad Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Menjadi Polemik Karena Belum Disosialisasikan

SALAH satu amanat konstitusi kita tercantum di dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Jadi, penghidupan yang layak itu, salah satunya kebutuhan dasar rakyat kita yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Di sinilah supaya jelas dulu kedudukan, posisi, dan peran tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Turunan dari itu tentunya adalah ketersediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat misalnya, indikator BPS yang meng-up date data pada tahun 2023, 84,79% yang sudah berkeluarga telah memiliki rumah sendiri, dan 15,21% yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki rumah sendiri. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab DPR, bagaimana membuat sebuah skema kebijakan yang bisa memberikan peluang kesempatan supaya masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah bisa memiliki rumah.

Maka dibentuklah namanya Badan Pengelola Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Pemerintah membuat kebijakan program namanya FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Sumber dananya adalah APBN. Setiap tahun digelontarkan dana untuk FLPP supaya masyarakat Indonesia bisa mendapatkan, memiliki, atau mempunyai kesempatan memiliki rumah.

Pertama, bukan *second home* karena itu yang paling sulit. Kebijakan itu sudah berjalan, pemerintah menyiapkan subsidi perumahan dalam bentuk FLPP yang bekerja sama dengan perbankan untuk menentukan kuota berdasarkan kebutuhan perumahan di setiap kabupaten/kota seluruh provinsi di Indonesia. Seperti BTN bekerja sama dengan asosiasi pengembang developer dan seterusnya.

Jadi, kebijakan itu ternyata belum mampu



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menjawab kebutuhan secara menyeluruh dari kebutuhan perumahan, karena banyak factor, seperti ketersediaan lahan dan masalah ekonomi, sehingga mereka ada istilahnya tunggakan satu tahun 500.000 kepemilikan rumah. Ini yang kita bahas dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, asosiasi pengembang, dan perbankan.

Supaya ada kebijakan pemutihan maka Presiden Jokowi pada kuartal kedua tahun 2023, angka tertentu supaya bisa di-clearkan sehingga bisa akad kredit rumah, karena FLPP hanya bisa distrategikan kalau 100% sudah jadi. Maksudnya, listrik dan air sudah tersedia, penghuninya sudah bisa tidur, baru bisa akad kredit. Nah, itu sudah berjalan dan kita perjuangkan dari hampir 1 tahun supaya bisa ada kebijakan pemutihan terhadap masyarakat yang terkena.

Lalu, kemudian mengapa menjadi polemik saat ini? Kita diskusikan keluarnya PP. Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan PP. Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Di dalam Pasal 15 Ayat (2) disebutkan

bahwa besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama antara pemberi pekerja sebesar 0,5% dan pekerja itu sendiri 2,5%. Jadi, ini simpanan bukan pemotongan.

Beda pemotongan dengan simpanan. Ini adalah simpanan bagi pekerja yang kemudian pekerja BUMN, BUMS, Bumdes di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja. Diatur di dalam PP ini adalah bentuknya simpanan yang setiap bulan dialokasikan supaya mereka bisa punya kesempatan memiliki rumah.

Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan kebutuhan perumahan bagi tenaga kerja di sektor non-ASN ini jelas. Nah kenapa kemudian menjadi polemik karena belum disosialisasikan. Di dalam PP ini disebutkan bahwa hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan dan pengelolaan simpanan itu akan dibuat lebih peraturan komite badan pengelola, tetapi yang kita perlu kawal tahun berapa pekerja yang menyimpan bisa mendapatkan rumah, jenis rumah seperti apa yang bisa didapatkan, lokasinya di mana, berapa nilainya fasilitas, subsidi apa yang diperoleh. itu yang perlu kita kawal supaya masyarakat, para pekerja para pemuda-pemudi kita yang non-ASN merasa tidak diambil haknya, tapi dibantu mengelola apa yang diperoleh setiap bulannya.

Untuk mereka mendapatkan fasilitas perumahan, PP. Nomor 21 Tahun 2024 ini harus segera disosialisasikan ke seluruh entitas serikat pekerja, baik di BUMN maupun di badan usaha milik swasta sampai ke BUMDES supaya mereka tahu bahwa mereka punya kesempatan dan ke pelaku usaha karena pelaku usaha juga terkena. Mereka mengalokasikan 0,5% setiap bulannya sebagai simpanan yang akan dikelola. Nah, bagaimana pengelolaan simpanannya itu diatur di dalam PP ini. Nanti kita bisa kontrol awasi. □

AWG

Suryadi Jaya Purnama Anggota MPR Fraksi PKS

Tapera Jangan Dimasukan dalam Proyek Beresiko

UPAYA pemerintah memperbarui aturan mengenai iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui revisi PP No. 25/2020 menjadi PP No. 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 20 Mei 2024. Berdasarkan aturan tersebut, ada dua kategori Peserta Tapera, yaitu Pekerja dan Pekerja Mandiri. Diwajibkan yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera. Sedangkan yang berpenghasilan di bawah upah minimum tidak wajib, tapi dapat menjadi peserta. Batas usianya minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar

Aturan soal pemotongan gaji karyawan untuk Tapera sebenarnya merupakan aturan sejak 2020. Besaran Simpanan Peserta Tapera yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah Peserta Pekerja, yaitu 0,5% ditanggung oleh Pemberi Kerja, dan 2,5% ditanggung oleh pekerja itu sendiri.

Sedangkan besaran simpanan peserta Tapera sebesar 3% penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri atau pekerja yang tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan, semisal petani, seniman, pedagang, atau ojol ditanggung sendiri secara penuh oleh Pekerja Mandiri.

Perbedaan yang signifikan ada pada Pasal 15 ayat (5a), yaitu dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri dihitung dari penghasilan yang dilaporkan, dan pada Pasal 15 ayat (4) huruf d, diatur oleh BP (Badan Pengelola) Tapera.

Selain itu, pada Pasal 15 ada perbedaan dari PP sebelumnya, yaitu dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja, yaitu pekerja/buruh BUMN (badan usaha milik negara), BUMD (badan usaha milik daerah), BUMDes (badan usaha milik desa), dan badan usaha milik swasta sekarang semuanya diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sebelumnya oleh kementerian terkait.

Adanya ketentuan baru ini menyebabkan aturan Tapera ini tentunya akan memiliki dampak yang sangat luas. Banyak orang akan terkena aturan ini. Oleh sebab itu fraksi kami perlu memberikan beberapa catatan agar adanya aturan ini memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.

Pertama, terkait golongan kelas menengah



yang sudah memiliki rumah, misalkan sudah telanjur membelinya atau dari warisan orang tua, tapi masih juga diwajibkan untuk ikut program ini. Dalam aturan PP No. 25/2020 (tidak direvisi) disebutkan bagi peserta non-MBR, maka uang pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya dapat diambil setelah kepesertaan Tapera-nya berakhir, yaitu karena telah pensiun, telah mencapai usia 58 tahun bagi Pekerja Mandiri; meninggal dunia; atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

PKS mengusulkan, golongan kelas menengah ini dapat dibantu untuk dapat membeli properti yang produktif seperti misalnya ruko dan sebagainya. Sehingga dengan demikian akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah. Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tahun 2023 menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi saat ini cenderung melupakan kelas menengah. Padahal pemerintah harus fokus pada pengembangan kelas menengah yang kuat dan inovatif, karena mereka adalah motor utama pembangunan jangka panjang.

PKS mendorong agar kelas menengah ini juga diperhatikan. Di satu sisi, penghasilan mereka melebihi kriteria MBR, sehingga tidak dapat membeli hunian subsidi. Namun, di sisi lain, penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian nonsubsidi, sehingga akan semakin terbebani jika harus

menyicil rumah sendiri, tapi juga masih harus menyisihkan uang untuk Tapera. Kita juga meminta agar kelas menengah tanggung, seperti Generasi Milenial dan Gen Z saat ini lebih khusus lagi diperhatikan.

Impian mereka untuk punya rumah sendiri akan menjadi semakin sulit terwujud karena penghasilannya tak pernah cukup untuk mencicil KPR. Dan, tidak mungkin harus menunggu lama pensiun atau berusia 58 tahun baru dapat membeli rumah.

Kedua, terkait Pekerja Mandiri yang pendapatannya tidak tetap, kadang cukup, kadang kurang, bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Tentunya iuran untuk Pekerja Mandiri ini perlu diatur oleh BP Tapera secara bijaksana dan perlu diklasifikasikan dengan baik agar tidak memberatkan para Pekerja Mandiri.

Ketiga, terkait penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terdapat Kepmen PUPR No. 242/KPTS/M/2020 yang mengatur batasan maksimal penghasilan MBR pada kelompok sasaran KPR Sejahtera, KPR SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan SSM (Subsidi Bantuan Uang Muka), yaitu maksimal Rp 8 juta per bulan.

Hal ini perlu dikaji lebih dalam apakah batasan ini perlu ditingkatkan mengingat saat ini masih banyak rumah bersubsidi yang terbengkalai, karena tidak diserap oleh masyarakat.

Keempat, PKS meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Tapera sejak tahun 2020 berdasarkan PP No. 25/2020, apakah Peserta Tapera yang MBR memang mengambil jatahnya untuk membeli rumah. Juga perlu dievaluasi apakah Peserta non-MBR yang sudah pensiun dan ingin mencairkan Tapera tidak mengalami prosedur yang rumit dan berbelit, terutama yang berdomisilinya di daerah.

Kelima, bahwa proses pemupukan atau pengembangan dana Tapera ini harus diawasi secara ketat. Kami mendesak agar pemilihan manajer investasi pada BP Tapera yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan dana Tapera ini harus transparan dan akuntabel dan diawasi secara ketat. Hal ini diperlukan agar dana Tapera tidak mengalami penyalahgunaan, seperti pada kasus Jiwasraya dan Asabri, dan tidak dimasukkan dalam proyek-proyek yang berisiko tinggi, seperti proyek IKN atau jangsan sampai dialokasikan ke program pemerintah lainnya. □

AWG

Rapat Pimpinan MPR RI

MPR: Putusan MKD DPR RI Tidak Memenuhi Unsur Materiiil

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Rapat Pimpinan MPR RI di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 9 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Salah satu yang dibahas dalam Rapim MPR tersebut adalah tentang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.



PADA hari Selasa, 25 Juni 2024, pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, telah dilaksanakan Rapat Pimpinan MPR RI. Salah satunya membahas tentang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik, Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., menyampaikan hasil Rapat Pimpinan MPR RI dalam konperensi pers terkait putusan MKD DPR RI di lobi Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Siti Fauziah menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa bahwa MKD DPR RI telah memutuskan, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau dikenal dengan Bamsuet terbukti melanggar kode

etik anggota DPR RI. MKD juga memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis kepada teradu agar

tidak mengulangi dan lebih berhati-hati dalam bersikap. “Menyikapi putusan MKD DPR RI tersebut, Rapim MPR RI menyepakati



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

beberapa hal,” ujarnya.

Pertama, putusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural karena proses persidangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan. “Dan, pengambilan putusan MKD tidak memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 5 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan,” katanya.

Selain itu, lanjut Siti Fauziah, putusan MKD tidak memenuhi unsur materiil, karena MKD memproses pengaduan tidak sesuai dengan kewenangannya karena kapasitas teradud dalam status kedudukan sebagai pimpinan atau Ketua MPR yang mempunyai tugas sebagai juru bicara MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU MD3 dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan MPR RI pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI.

Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU MD3 juncto Pasal 57 UU MD3, teradud adalah sebagai anggota MPR yang mempunyai hak imunitas. “Ketiga, Pimpinan MPR akan segera melakukan komunikasi dengan Pimpinan DPR dalam rangka men-

dundukkan putusan MKD secara proporsional dalam kaitan hubungan antarkelembagaan,” tambah Siti Fauziah.

Keempat, lanjut Siti Fauziah, prosedur penegakan kode etik di MPR RI secara internal diatur dalam ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 7 Keputusan MPR RI Nomor 2/MPR/2010 tentang Peraturan Kode Etik MPR RI. “Jadi, sekiranya ada pelanggaran kode etik, prosedur penegakannya menggunakan

Kode Etik MPR, bukan Kode Etik DPR atau lembaga lainnya,” pungkasnya.

Dalam konperensi pers itu, Siti Fauziah didampingi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Hentoro Cahyono, SH., MH., Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Wachid Nugroho, S.IP., M.IP. □





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sanksi MKD Terhadap Ketua MPR RI Fadel Muhammad: Keputusan Yang Tidak Tepat

Sanksi ringan berupa teguran tertulis yang dijatuhkan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR (MKD) disesalkan oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Akibat teguran yang meminta Ketua MPR untuk tidak mengulangi kesalahan dan berhati-hati dalam bersikap. MKD menyebut Ketua MPR telah melanggar kode etik, imbas berbicara tentang wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“Putusan MKD tidak tepat,” ujar Fadel Muhammad kepada beberapa wartawan yang menemuinya di Ruang Kerja Pimpinan MPR, Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 25 Juni 2024.

Fadel Muhammad menyebut, keputusan MKD tidak tepat dilandasi oleh dua alasan. Pertama, prosedur pemanggilan kepada Ketua MPR tidak sesuai dengan prosedur tata tertib. “Jadi prosedurnya cacat hukum,” ujarnya. Kedua, dalam setiap pembahasan terkait tugas-tugas MPR, Ketua MPR melibatkan para Wakil Ketua MPR. “Jadi keputusan yang diambil bukan berdasarkan

kapasitas pribadi, namun melibatkan semua pimpinan,” ujarnya. Atas dasar inilah, seharusnya MKD tidak boleh salah interpretasi menuduh urusan ini merupakan urusan pribadi bukan pimpinan MPR.

Mewakili Pimpinan MPR, Fadel merasa keberatan dengan sanksi yang dijatuhkan MKD kepada Ketua MPR. “Bila Ketua MPR mendapat sanksi, para Wakil Ketua MPR juga ikut merasakan atau terkena,” ujar Pimpinan MPR dari Kelompok DPD itu. “Sanksi ini sedikit mengganggu kinerja MPR,” tambahnya.

Untuk itu, mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu menegaskan kembali sanksi MKD kepada Ketua MPR merupakan sesuatu hal yang tidak tepat. “Mungkin ada hal-hal politik di baliknya, namun kita tidak tahu,” ungkapnya.

Alumni ITB itu mengungkapkan, saat rapat pimpinan, Ketua MPR mengatakan, MPR mempersiapkan amandemen UUD. “Saya pun juga mengatakan statemen yang sama,” ujar Fadel Muhammad. Ungkapan demikian tidak ada yang mempersoalkan dan selepas



mengatakan demikian bukan berarti besoknya melakukan amandemen atau perubahan UUD.

Lebih lanjut dikatakan, terkait amandemen, MPR terbuka. Di MPR pun juga ada berbagai badan yang membahas UUD dan semua elemen masyarakat diserap aspirasinya. “Semua itu kita tunjukkan bahwa MPR sudah bekerja”, tegasnya.

Terkait tuduhan itu, Fadel Muhammad menyebut Ketua MPR sebenarnya sudah bersikeras tidak pernah menyatakan apa yang menjadi pokok perkara dalam laporan Azhari, yaitu semua partai politik menyepakati wacana amendemen dan selanjutnya Pimpinan MPR akan mengirim surat kepada DPR. □

Sanksi MKD Terhadap Ketua MPR RI Benny K. Harman: Putusan MKD DPR Terhadap Ketua MPR Salah Alamat

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang dibacakan Ketua MKD dalam sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, tanggal 24 Juni 2024, yang menyatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsuet melanggar kode etik anggota dewan, karena pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945 sehingga dijatuhi sanksi ringan dalam bentuk teguran tertulis, sebagai putusan sesat dan salah alamat.

“Saya membaca di media sosial bahwa Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dijatuhi hukuman oleh MKD DPR RI. Menurut saya, itu adalah putusan sesat. Kenapa? Karena Bamsuet itu adalah Ketua MPR bukan Ketua DPR. Beliau bicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI,” ujar Benny, dalam keterangannya kepada media massa, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Benny melihat, substansi pembicaraan Ketua MPR itu masih dalam batas-batas kepatasan. “Beliau (Bamsuet) menyatakan bahwa beliau melakukan perjalanan keliling bertemu masyarakat dan elit publik, dia menangkap semangat ingin kembali ke UUD 1945, sebagai respon atas kegalauan dan

keresahan yang muncul pasca pemilu pileg dan pilpres. Jadi, dia menangkap pesan itu,” ujarnya.

Dikatakan Benny, sepanjang apa yang disampaikan Bamsuet benar-benar dari para pimpinan dan elit politik dan menyampaikan itu ke publik, hal itu masih dalam batas kewajaran dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan.

Lagi pula, lanjut Benny, apa yang disampaikan Bamsuet perihal kembali kepada UUD 1945 dan amandemen ke lima itu, adalah memang hal yang dibahas di MPR. Apalagi, setelah Bamsuet keliling ke para pimpinan partai politik. Jadi, tidak perlu ada yang ditakutkan, karena masih dalam tahap wajar. Sebab, Ketua MPR hanya menyampaikan pesan yang terbuka untuk diperdebatkan,

wacana seorang Ketua MPR atau salah satu Wakil Ketua,” jelasnya.

Benny memberi ilustrasi. Sama saja dengan anggota DPR. Anggota DPR, bisa menyampaikan pandangannya masing-masing. Tapi, belum tentu pandangannya itu merepresentasikan pandangan semua anggota DPR. Intinya, apa yang disampaikan Ketua MPR itu adalah kerisauan umum yang ditangkap oleh beliau dan disampaikan ke publik.

Sekali lagi, Benny menegaskan, dirinya tidak menemukan kode etik yang dilanggar oleh Ketua MPR. Kalaupun ada pelanggaran kode etik, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua MPR itu, tidak bisa dibawa ke MKD DPR. Itu menyangkut kompetensi absolut. Contoh, bagaimana



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

diwacanakan dan didiskusikan. Sebagai Ketua Fraksi Demokrat di MPR RI, Benny sangat menghargai ada pandangan semacam itu yang memang sangat perlu diwacanakan.

“Jika saja memang ada masalah dalam pernyataan itu, ada pelanggaran kode etik yang dilakukan, sampai saat ini saya tidak menemukan kode etik mana yang dilanggar oleh Bamsuet. Kecuali, dia melakukan tindakan di luar aturan yang ditentukan dalam peraturan tata tertib. Ini kan hanya wacana. Apa yang disampaikan Bamsuet itu adalah wacana dan MPR tidak ditentukan oleh

bisa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, diadili oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) atau sebaliknya. Itu sangat tidak mungkin.

“Jadi, ketika dipanggil MKD DPR. Maka itulah alasannya untuk Ketua MPR tidak memenuhi panggilan itu, karena salah alamat dan forumnya salah. MKD DPR juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang anggota ataupun Ketua MPR. Tapi, kalau diadili oleh MKD-nya MPR, itu baru boleh memenuhi panggilan,” tandasnya. □



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Membangun Manusia Indonesia dengan Program Makanan Bergizi

GAGASAN presiden terpilih Prabowo Subianto tentang program penyediaan Sarapan Bergizi Gratis untuk anak, dan program membuka akses seluas-luasnya bagi anak usia sekolah mengenyam pendidikan, sejatinya melekat pada kewajiban konstitusional negara menyejahterakan rakyat sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi. Dua program ini bisa direalisasikan dengan meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN melalui refocusing anggaran, penyesuaian skala prioritas program, hingga mempersempit ruang dan peluang korupsi.

Tema sentral dan esensi dari dua gagasan Prabowo itu tak lain adalah pembangunan manusia Indonesia, sebuah kewajiban konstitusional negara yang sudah begitu sering dijadikan program tapi tak pernah direalisasikan dengan penuh kesungguhan. Hari-hari ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus menerima fakta tentang stunting, fakta jutaan anak putus sekolah hingga masih tingginya angka kematian ibu-bayi. Rangkaian masalah ini menjadi bukti yang menjelaskan bahwa pembangunan manusia Indonesia belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terutama jika diperbandingkan dengan pembangunan sektor lain.

Lebih dari itu, rangkaian fakta permasalahan itu membuat siapa saja amat prihatin. Betapa tidak, masih ada jutaan anak menderita kekurangan gizi dan lainnya tidak mampu melanjutkan sekolah, ketika pembangunan sektor lain telah memungkinkan sebagian besar warga bangsa beradaptasi dengan perubahan zaman dan melakoni digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan dewasa ini. Maka, menjadi sangat relevan jika Prabowo mengajukan gagasan tentang program penyediaan Sarapan Bergizi Gratis untuk anak, dan program membuka akses seluas-luasnya bagi anak usia sekolah mengenyam pendidikan.

Pijakan untuk memahami relevansi dua gagasan Prabowo adalah Konstitusi negara. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menegaskan dan memerintahkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maknanya, UUD menetapkan tanggung jawab negara tentang kewajiban memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, termasuk gizi. Faktanya, kerja bertahun-tahun untuk menurunkan stunting tak pernah menghasilkan capaian yang memuaskan.

Tentang kewajiban negara menyediakan pendidikan bagi warga negara ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Selain itu, ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pun tampak amat relevan dengan era terkini. Pasal ini menetapkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Kewajiban konstitusional negara itu akan direalisasikan dengan penuh kesungguhan oleh Prabowo selaku presiden terpilih, sebagaimana yang dia janjikan semasa kampanye pemilihan presiden beberapa bulan lalu. Selain pro-kontra, gagasan Prabowo ini pun ditanggapi dengan beragam sudut pandang. Paling utama, dimunculkan pertanyaan tentang bagaimana mendanai program dimaksud, terutama tentang program penyediaan Sarapan Bergizi Gratis. Tema pertanyaan ini dibahas berbagai kalangan, karena program ini dinilai sangat mahal. Belum lagi soal pelaksanaannya di lapangan.

Memang, dua gagasan ini butuh anggaran besar. Tapi, kalau program pembangunan fisik boleh menelan biaya besar, mengapa pembangunan manusia tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sama? Perhitungan sementara memunculkan perkiraan

anggaran sebesar Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun untuk membiayai sarapan bergizi gratis itu. Volume anggarannya besar karena menargetkan penyediaan makanan untuk 57 juta pelajar, meliputi siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga SMU plus siswa pondok pesantren. Sedangkan untuk membuka akses bagi anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan bisa diwujudkan dengan meningkatkan efektivitas pemanfaatan alokasi 20% anggaran pendidikan di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Bagi Presiden terpilih yang akan dilantik Oktober 2024, sudah barang tentu akan ada tantangan untuk bisa merealisasikan program Sarapan Bergizi Gratis, utamanya jika APBN 2025 – karena beberapa alasan — belum bisa mengalokasikan anggaran untuk membiayai program dimaksud. Namun, bukan berarti tidak ada peluang. Presiden terpilih bersama tim ekonominya dituntut kreatif dalam mengelola APBN 2025 agar program prioritas bisa direalisasikan.

Ada beberapa opsi yang bisa dipilih dan dijalankan oleh presiden. Mulai dari refocusing anggaran, meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN dengan tidak menolerir pemborosan, penjadualan utang hingga lebih bersungguh-sungguh menutup ruang korupsi. Termasuk mengubah atau menyesuaikan skala prioritas program. Program atau proyek yang tak berkait langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat hendaknya ditunda. Termasuk dalam refocusing anggaran adalah menunda atau membatalkan perjalanan dinas, meminimalisir biaya rapat, honorarium, serta belanja atau pengeluaran lain yang nyata-nyata tidak produktif.

Tentang refocusing APBN, tim ekonomi Prabowo bisa menyimak pengalaman atau contoh kasus ketika dampak Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah melakukan relokasi dan refocusing APBN 2020. Berdasarkan kalkulasi saat itu, pemerintah butuh tambahan dana Rp 695,2 triliun untuk tiga fokus pembiayaan, meliputi pembiayaan kesehatan publik, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan pemberian dukungan bagi dunia usaha. Sebagian besar dana tambahan itu didapatkan dari efisiensi dan refocusing anggaran pada Kementerian dan Lembaga (K/L).

Tak kalah pentingnya adalah menutup dan mempersempit ruang korupsi untuk menjadikan setiap sen uang negara bermanfaat untuk rakyat. Dengan bersungguh-sungguh menutup ruang korupsi,

pemerintahan presiden terpilih nantinya akan memperoleh tambahan kekuatan untuk membiayai kedua program prioritas itu. Untuk keperluan itu, presiden patut mendorong pejabat kepala inspektorat jenderal pada semua kementerian dan lembaga untuk menjalankan fungsinya dengan efektif di bidang pengawasan.

Nilai kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana korupsi sangat besar. Sepanjang periode 2004 – 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya telah menangani 1.512 kasus. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa kerugian negara mencapai Rp 238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022). Data ini didapat ICW berdasarkan putusan korupsi oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Kalau kasus korupsi timah yang mencapai Rp 300 triliun itu ditangani dengan baik dan benar, kas negara mestinya bisa mendapatkan tambahan uang masuk.

Mengacu pada sumber daya yang tersedia, program penyediaan Sarapan Bergizi Gratis dan program mendorong anak usia sekolah mengenyam pendidikan, sejatinya bisa direalisasikan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Bukan semata-mata karena alasan kewajiban konstitusional, melainkan jutaan anak memang nyata-nyata membutuhkannya. Pada tahun 2022, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia masih sekitar 4,7 juta jiwa. Salah satu sumber masalah stunting adalah gizi buruk pada ibu dan anak.

Juga karena masalah gizi buruk sebagai salah satu faktornya, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi. Data tentang kematian ibu dan bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Sistem pencatatan kematian ibu pada Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Dan, kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945.

Faktor kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Per Maret 2023, masih ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah warga yang pengeluarannya per bulan di bawah standar garis kemiskinan, yakni Rp 550.458 per kapita per bulan.

Selain anak sekolah, program penyediaan Sarapan Bergizi Gratis diharapkan juga bisa menjangkau puluhan juta warga miskin sebagai wujud nyata pembangunan manusia Indonesia. □

Empat Pilar MPR RI di UKMB

Bamsoet
Jaga Persatuan dan Kesatuan
Bangsa di Tengah Keberagaman



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, selain ancaman terorisme, radikalisme, ideologi transnasional, dan narkoba, bangsa Indonesia juga sedang menghadapi ancaman demokrasi yang tidak kalah hebat dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Luka bangsa pada Pemilu 2019 dengan hadirnya “Cebong”, “Kampret”, dan “Kadrun”, menjadi peringatan bahwa pemilihan langsung memiliki dampak berganda (multiplier effect) bagi keharmonisan kehidupan kebangsaan.

Tidak hanya pada Pilpres dan Pileg, pemilihan langsung pada Pilkada juga meninggalkan berbagai persoalan kebangsaan. Hasil penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 33% (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang. Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33 persen. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta pemilih, Indonesia menjadi negara dengan korban paling besar se-dunia dalam hal politik uang.

“Tidak heran jika kini banyak kalangan menilai bahwa Pemilu Indonesia paling liberal di dunia. Sudah melenceng jauh dari demokrasi Pancasila sesuai semangat perwakilan sebagaimana terdapat dalam sila ke-empat Pancasila. Sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk kembali menghadirkan politik programatik, bukan politik pragmatis, serta kompetisi elektoral berbasis partai untuk mengurangi penggunaan politik uang” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pi-

lar MPR RI bersama Universitas Kristen Maranatha, di Bandung, Jumat (7/6/24).

Hadir, antara lain Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, Rektor Universitas Kristen Maranatha Prof. Sri Widiyantoro, Ketua Panitia Penyelenggara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Chendra Winarsih, Peneliti dan Pemerhati Kajian Islam di Tiongkok Novi Basuki, sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha, dan segenap jajaran Pengurus Perempuan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (PINTI) Jawa Barat, Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) Jawa Barat, Perhimpunan Pelajar Indonesia-Tiongkok (PPIT) Jawa Barat, dan Pusat Bahasa Mandarin Universitas Kristen Maranatha.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak para generasi muda menyadari betapa hebatnya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang begitu kaya keberagaman dan perbedaan. Ketika terbang dari Sabang menuju Merauke, kita akan menempuh jarak sekitar 5.245 kilometer. Lebih jauh dari jarak antara Boston (Amerika Serikat) ke Lisbon (Portugal) melewati Samudera Atlantik, atau setara dengan jarak dari Jakarta ke Korea Selatan.

Kita pun akan melintasi 17.504 pulau, dan melewati tiga zona waktu yang berbeda. Luas bentangan jarak antara Sabang sampai Merauke juga meliputi hampir 280 juta jiwa penduduk Indonesia, yang terdiri dari 1.340 suku bangsa, dengan 733 bahasa daerah yang berbeda, serta beragam adat-istiadat, agama, dan keyakinan



yang berbeda-beda.

“Bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah maupun Eropa Timur yang memiliki banyak kesamaan dibandingkan perbedaan, justru hingga kini masih bergulat dalam beragam konflik. Begitupun saudara kita di Asia, seperti Korea Selatan dengan Korea Utara, serta Cina dengan Taiwan. Namun Indonesia, dengan luas wilayah dan besarnya keragaman yang dimiliki justru hingga kini masih tetap damai. Jawabannya tidak lain, karena kita memiliki Empat Pilar MPR

RI, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” jelas Bamsuet.

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menerangkan, sejak era Presiden Soekarno hingga kini Presiden Joko Widodo, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika selalu diakui dunia. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Anto-

nio Guterres dalam rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN 2023, bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya motto nasional Indonesia, tapi menjadi kunci membangun masa depan dunia.

Pada Mei 2023, UNESCO menetapkan Pidato Presiden Soekarno “To Build the World A New (Membangun Dunia Kembali)” yang disampaikan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 sebagai Memory of the World (MoW). Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan manifesto intelektual, politik, dan ideologi yang bersifat internasional, bahwa dunia harus dibangun kembali dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

“Bung Karno mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional dan universal. Mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai sila Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, merupakan nilai yang bersifat internasional dan universal,” pungkas Bamsuet. □

Empat Pilar MPR RI Bersama SOKSI

Bamsoet: Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Bambang Soesatyo menilai, hadirnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Memastikan hubungan industrial antara pemerintah, buruh, dan pengusaha dapat berjalan sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Untuk memajukan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dibutuhkan hubungan industrial yang harmonis. Karenanya, sebagus apapun peraturan

yang dibuat, hanya bisa dirasakan manfaatnya apabila diimplementasikan secara tepat. Peraturan yang sudah bagus, jangan hanya berakhir di atas meja kerja saja, tanpa diterapkan dalam kehidupan nyata,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama SOKSI, di Jakarta, Rabu (19/6/24).

Hadir, antara lain Menteri Tenaga Kerja RI ke-21 sekaligus Ketua Dewan Pakar SOKSI Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Umum SOKSI Lawrence Siburian, serta Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industri Kementerian Tenaga Kerja Heru Widiyanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Berhasil melalui berbagai tantangan global dan domestik, salah satunya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi nasional sempat berkontraksi selama empat kuartal pada periode tahun 2020-2021, menyebabkan perekonomian terjerembab pada jurang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran





terbuka pada tahun 2020 mencapai lebih dari 7%, dan untuk pertama kalinya semenjak krisis moneter 1998, Indonesia mengalami penurunan PDB hingga minus 3,49%.

“Melalui semangat gotong-royong, akhirnya kita bisa melakukan titik balik kebangkitan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021, di mana pertumbuhan ekonomi melonjak hingga mencapai 7.07%. Sepanjang tahun 2022 dan 2023 hingga triwulan pertama 2024, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%. Dengan pertumbuhan yang stabil, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2024 turun hingga mencapai angka 4,82%,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan,

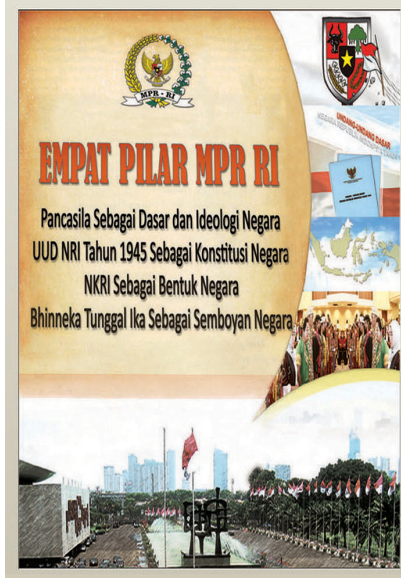
di sisi lain bangsa Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa saat ini masih ada masalah ketersediaan lapangan pekerjaan, yang menjadi tantangan yang harus dijawab dalam memaksimalkan potensi kalangan muda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hampir 10 juta atau sekitar 22,25% generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun training/pelatihan.

“Jika data Gen Z ditambah kelompok usia 25-29 tahun, maka terdapat 66% kalangan muda yang tidak memiliki kegiatan. Artinya, 2 dari 3 kaum muda produktif berusia di bawah 30 tahun justru sedang menganggur atau tidak memiliki kegiatan,” pungkas Bamsoet. □



Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti saling pendapat, mulailah mencari muafakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



Sinergitas Hubungan Kerjasama antara MPR dan Wartawan Parlemen

Kerjasama antara MPR RI dan wartawan yang tergabung dalam Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) sudah lama berlangsung dan terbina dengan baik. Boleh dikata, semua kegiatan pimpinan MPR, anggota MPR, dan Kesekretariat Jenderal MPR hampir tak ada yang luput dari liputan wartawan Parlemen. Media Gathering adalah salah satu media digunakan untuk membina dan meningkatkan hubungan yang sudah baik itu.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SINERGITAS hubungan kerjasama antara MPR RI dan wartawan Parlemen akan terus kita jaga dan tingkatkan,” ujar Siti Fauziah, SE., MM., Plt. Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, dalam sambutannya pada acara pembukaan Media Gathering MPR RI Tahun 2024 di Bandung, Jumat malam (07/06/2024).

Media Gathering pertama untuk tahun 2024 ini diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Koordinator Wartawan Parlemen (KWP). Diikuti oleh 90 wartawan dari berbagai media: cetak, elektronik, dan online. Para wartawan ini memang terbiasa meliput kegiatan di seputar parlemen, terutama meliput semua program, kegiatan, dan kerja pimpinan MPR, anggota

MPR, dan Kesekjenan MPR.

Jadi, peran wartawan anggota KWP ini, menurut Siti Fauziah, sangat penting, terutama dalam menyebarkan berita-berita seputar parlemen, sehingga masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami apa yang dikerjakan oleh MPR.

Lebih lanjut, Siti Fauziah yang biasa disapa Bu Titi menegaskan, kita semua berharap



kerjasama yang terjalin itu semuanya akan baik-baik saja, dan saling memberi manfaat. “Jika dalam perjalanannya ada hambatan, ke depan akan kita perbaiki, Kami terbuka menerima saran dan masukan yang tujuannya untuk kebaikan bersama,” katanya.

Acara Media Gathering MPR 2024 ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Ketua MPR RI, Dr. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA., yang berhalangan hadir secara fisik,

menyampaikan pidatonya lewat rekaman video. Sementara Ariawan, Koordinator KWP, juga menyampaikan kata sambutannya.

Pada acara pembukaan, selain dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, SE., MM., juga diikuti dan dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar, SIP., ME.; Perwakilan Pimpinan MPR Jazilul Fawaid dan Lestari Moerdijat.; Kabiro Protokol, Humas Media Setjen DPD Mahyu Darma; Kabag



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pemberitaan dan Media Setjen DPD Heru Firdan. □

Pidato Ketua MPR RI, Dr. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, berdasarkan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 keterbukaan informasi publik adalah hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi. Di mana publik dapat mengawasi penyelenggaraan negara dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan putusan dan kebijakan publik. Meskipun demikian, hak untuk memperoleh informasi ini tidak bersifat mutlak, melainkan batasannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

“Dalam konsepsi keterbukaan informasi publik, pers memiliki hak istimewa untuk mempublikasikan pikiran dan pendapat melalui media massa. Inilah yang dimaknai sebagai kemerdekaan atau kebebasan pers,” ujar Bamsuet dalam sambutannya acara Media Gathering MPR 2024 melalui rekaman video di Bandung, Jumat malam (8/6/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, ketentuan UUD tersebut juga mengingatkan bahwa keterbukaan akses terhadap informasi publik dimaksudkan dalam kerangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta tidak justru disalahgunakan untuk tujuan yang bersifat destruktif. Artinya, informasi publik yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak justru mencederai kepentingan publik itu sendiri.

“Sebagai pilar demokrasi, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga membangun literasi publik. Sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mencerna dan menyaring informasi publik,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

(Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini mengingatkan, pada hakikatnya diseminasi informasi bersifat memberi pencerahan serta dapat membangun literasi informasi. Sehingga publik selaku penerima informasi

dapat bersikap lebih bijaksana dan lebih dewasa dalam menyikapi setiap informasi. Keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers harus dimaknai sebagai kebebasan yang bukan tanpa tanggungjawab.

“Kita juga tidak boleh melupakan bahwa

salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Saya meyakini, untuk membangun bangsa yang cerdas, salah satu elemen pokoknya adalah hadirnya pers yang sehat,” pungkas Bamsuet. □



Pidato Pembukaan Media Gathering oleh Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad

Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menyebutkan bahwa wartawan parlemen adalah mitra penting bagi MPR, sebab memiliki peran strategis dalam mempublikasikan secara luas berbagai program dan kerja-kerja MPR RI, melalui produk-produk beritanya kepada masyarakat.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini menyatakan hal itu saat menyampaikan pidato pembukaan kegiatan Media Gathering MPR RI Tahun 2024, di Bandung, Jawa



Barat, Jumat malam (7/6/2024). Banyak sekali, lanjutnya, program dan kerja MPR yang mesti diketahui masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban MPR kepada rakyat. Salah satunya wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan Pokok-Pokok

Haluan Negara (PPHN).

“Wacana besar ini menurut kami sangat penting, karena ditujukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Keseriusan i kami tunjukkan dengan menyambangi berbagai tokoh nasional, mantan Presiden dan mantan

Wapres, juga para ketua umum partai politik, untuk meminta masukan, untuk lebih mematangkan lagi,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Fadel Muhammad, MPR periode 2019-2024 akan berakhir masa jabatannya sebentar lagi. Pimpinan MPR periode sekarang merasa perlu meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk penerus, yakni Pimpinan MPR periode mendatang.

“Masukan dan pendapat juga bisa datang dari para wartawan yang terbiasa bertugas di lingkungan parlemen. Intinya, siapa saja elemen bangsa yang berkeinginan ikut berpartisipasi dan berkontribusi ke dalam upaya kami memberikan sumbangsih terbaik untuk negeri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo ini menyampaikan beberapa hal terkait tugas dan fungsi DPD RI. Fadel menepis anggapan keliru yang mengatakan bahwa keinginan DPD untuk memperkuat tugas, kewenangan, dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMASMPR RI

fungsinnya untuk menyaingi DPR.

“Itu sangat keliru. DPD itu urusannya adalah soal daerah. Bobot kegiatannya lebih banyak ke daerah. Untuk menjelaskan ini, saya sampai menulis dengan tajuk ‘Peran DPD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif’. Isinya adalah pemaparan lengkap tentang perlunya daerah memaksimalkan potensi SDM, kekayaan, juga anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. □

Capacity Building Media Gathering 2024

Media Gathering MPR 2024 juga diisi dengan kegiatan out door berbentuk permainan (games) yang tujuannya untuk lebih mempererat keakraban, baik antara sesama wartawan maupun antara wartawan dan pejabat serta karyawan Setjen MPR, khususnya Biro Humas dan

Sistem Informasi. Permainan itu dikemas dalam bentuk kegiatan yang diberi nama Capacity Building Media Gathering MPR.

Dan, acara ini berlangsung di Puri Setiabudhi Residence Cidadap, Bandung, Sabtu (8/6/2024).





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah, didampingi Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muningsari, SIP., ME., serta staf Biro Humas berbaur dengan para wartawan mengikuti kegiatan yang dipandu oleh instruktur. Permainan yang disuguhkan adalah permainan yang mengingatkan kembali ke masa

kecil atau masa remaja, yaitu permainan menjepit balon, berjoget sambil membentuk formasi dengan berbagai varian dan lainnya. Ada satu permainan yang agak serius, yaitu lomba catur.

"Kami sangat berharap, kegiatan out door ini bisa lebih meningkatkan dan menajamkan hubungan antara wartawan parlemen

dengan MPR, sehingga kolaborasi kita di masa depan akan lebih baik dan lebih berkualitas lagi," ujar Siti Fauziah, saat membuka kegiatan Capacity Building Media Gathering MPR ini. Dan, acara fun games ini berlangsung ramai dan menggembirakan. "Kegiatan ini juga mempererat keakraban," ujar Bu Titi. □

Kunjungan Tim Peneliti BRIN

Diterima Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DEPUTI Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, SH., MH., menerima kunjungan Tim Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal MPR, Gedung Nusantara III Lantai V, Komplek Parlemen Jakarta, pada Kamis (6/6/2024). Dalam kunjungan ini Tim Peneliti BRIN meminta masukan dari Deputi Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR terkait penelitian yang sedang dilakukan

Tim Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN mengenai “Model Penguatan Relasi Antar Lembaga Perwakilan di Indonesia: Upaya Menghasilkan Undang-Undang yang Transformatif dan Pengawasan yang Akuntabel”.

Dalam kunjungan ini, Tim Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN dipimpin Koordinator Tim Sutan Sorik, SH., MH., didampingi anggota tim, antara lain Aditya Rahmadhoni, SH., MH., dan Ahmad Fathony, SH. Sedangkan Hentoro Cahyono didampingi Staf Ahli Sesjen MPR, Yana Indrawan, dan Kepala Bagian

Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat, Rosy Romadiana Pasaribu.

Dalam kesempatan diskusi tersebut, Tim Peneliti BRIN meminta masukan dengan mengajukan rumusan pertanyaan sebagai berikut: Pertama, bagaimana relasi lembaga perwakilan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945? Kedua, bagaimana relasi kewenangan antarlembaga parlemen Indonesia terkait pembentukan UU dan pengawasan APBN pada masa pemerintahan Presiden Jokowi? Dan, ketiga, bagaimanakah model penguatan relasi antarlembaga perwakilan di Indonesia sehingga dapat menghasilkan UU yang transformatif dan pengawasan APBN yang akuntabel?

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, menyambut baik kunjungan Tim Peneliti BRIN dan menyampaikan terima kasih atas prakarsa dialog penelitian dengan judul : “Model Penguatan Relasi Antar Lembaga Perwakilan di Indonesia: Upaya Menghasilkan Undang-Undang yang Transformatif dan Pengawasan yang Akuntabel”.

“Pertemuan dan dialog ini Insya Allah membawa kemasyalahatan, tidak saja bagi proses dan tahapan penelitian dari Pusat Riset Hukum BRIN, melainkan juga bagi kami Sekretariat Jenderal MPR dalam perspektif kajian mengenai lembaga perwakilan di Indonesia dengan berbagai perspektif dan dimensinya,” katanya.

Terkait hubungan relasi antarlembaga perwakilan, terutama DPD dan DPR, dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara DPR dan DPD dalam konteks lembaga perwakilan, dapat dilihat dari fungsi utamanya dalam bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran.

“Sebagai lembaga parlementaria, keseluruhan fungsi parlemen itu ada di dua lembaga ini, dan karena itu pembagian tugas keduanya dapat diatur berkenaan dengan aspek tertentu yang terikat dengan fungsi legislatif, pengawasan, dan fungsi anggaran tersebut,” katanya. □



Delegasi Mahasiswa FH UMK

Hentoro Cahyono: Di Era Digitalisasi, Sosialisasi Empat Pilar MPR Semakin Penting



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

D EPUTI Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono, SH., MH., menerima delegasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (FH UMK) di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Di hadapan para mahasiswa, Hentoro Cahyono memaparkan pentingnya sosialisasi Empat Pilar MPR di

era digitalisasi saat ini.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR penting bagi generasi muda. Mereka harus menghayati dan mengamalkan Empat Pilar MPR menghadapi masuknya pengaruh budaya asing di era digitalisasi ini,” kata Hentoro Cahyono.

Dalam pertemuan itu delegasi Mahasiswa Fakultas Hukum UMK dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UMK, didampingi

Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III, serta Ketua Prodi S1 Hukum.

Mengawali pertemuan dengan Delegasi Mahasiswa UMK, Hentoro Cahyono menyampaikan ucapan terima kasih, karena telah berkunjung ke MPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Di kompleks Parlemen ini, selain MPR RI juga ada lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

Hentoro kemudian memaparkan tentang kewenangan dan tugas kelembagaan MPR RI. Kewenangan lembaga MPR RI telah diatur dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Kewenangan MPR RI, antara lain mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna, memberhentikan presiden dan/wakil presiden dalam masa jabatannya.

MPR juga mempunyai tugas, seperti diatur dalam UU MD3, antara lain melakukan pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (sosialisasi Empat Pilar MPR), mengkaji sistem ketatanegaraan, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD.

Menurut Hentoro, dalam era digital saat ini, sosialisasi Empat Pilar MPR semakin penting, khususnya bagi generasi muda. Karena, di era digital ini, juga masuk budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. “Karena itu, penting bagi generasi muda untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UMK menyampaikan, maksud kedatangan delegasi mahasiswa FH UMK ke MPR adalah untuk mengenal lebih dalam tentang kelembagaan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. “Kami sangat bangga bisa berkunjung ke Gedung MPR - DPR di Senayan,” tuturnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama dan tukar menukar cendera mata. □





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH, Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan

Masyarakat Menunggu Hasil Satgas Pemberantasan Judi Online

PRESIDEN Joko Widodo secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini secara resmi disahkan oleh Presiden Jokowi pada Jumat, 14 Juni 2024. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dibantu Ketua Harian Bidang Pencegahan Budi Arie Setiadi, dan Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dalam Pasal 4 Keppres ini disebutkan, Satgas Judi Online bertugas untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.

Salah satu alasan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online adalah karena Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori darurat judi online. Data Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, jumlah pemain judi online di Indonesia telah mencapai 3,5 juta orang. Perputaran uang di judi online pun sangat mencengangkan. Dalam lima tahun terakhir perputaran uang judi online menembus Rp 600 triliun. Pada tahun lalu (2023), perputaran uang judi online mencapai Rp 327 triliun. Pada kuartal tahun 2024, sudah mencapai Rp 100 triliun. Jika diasumsikan sama, maka pada akhir tahun 2024 perputaran uang judi online bisa menembus Rp 400 triliun.

Judi online kian hari kian merusak. Dampak judi online pun sungguh sangat mengkhawatirkan. Dari jumlah pemain judi online di Indonesia, hampir 80% berasal dari kalangan menengah bawah. Selain itu, banyak anak muda terjerat judi online dan meminjam uang di pinjaman online (Pinjol). Yang mengejutkan, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR,

pada Rabu 28 Juni 2024, Ketua PPATK Ivan Yustiananda mengungkapkan, sekitar 1.000 orang di antaranya anggota DPR, DPRD, serta pegawai Sekretariat Jenderal terlibat transaksi judi online.

Untuk mengetahui lebih jauh efektivitas pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini, berikut penuturan anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi III DPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. Petikannya.

Menurut Bapak sudah seberapa parah judi online di Indonesia ini? Apakah situasi dan kondisi sekarang bisa dikatakan Indonesia sedang darurat judi online?

Judi daring atau judi online belakangan ini memang menjadi perbincangan di masyarakat. Permasalahan ini terjadi karena judi online telah banyak memakan korban yang tidak hanya masyarakat sipil biasa,

namun juga aparat. Beberapa waktu lalu kita mendengar seorang Polwan yang nekat membakar suaminya, karena suaminya yang juga anggota Polri, tersangkut dalam adiksi judi online. Tak hanya itu, ada pula dua anggota TNI yang tewas bunuh diri akibat terlilit hutang judi online.

Dari berbagai data yang didapat, Kemenkominfo dalam kurun waktu 2023-2024 telah menghapus 1.904.246 konten judi online di ruang maya, bahkan mendeteksi 14.823 konten judi online di situs lembaga pendidikan dan 17.001 menyusup ke situs pemerintahan (Kompas). Pemerintah juga telah mendeteksi dan menindak berbagai promosi judi online melalui media sosial, website, dan pesan pribadi, yang tak jarang melibatkan artis atau tokoh terkenal lainnya.

Dari data PPAK, pelaku judi online di Indonesia mencapai 3,2 juta orang dengan perputaran uang mencapai Rp 327 Triliun. Selain itu, OJK juga pernah melaporkan bahwa terdapat sekitar 5000 rekening yang terafiliasi dengan judi online (Kompas). Sedangkan Polri, telah mengungkap, ratusan hingga ribuan kasus judi online. Contohnya, salah satu kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya bandarnya berhasil memiliki omzet hingga satu miliar rupiah per bulan, padahal hanya dijalankan oleh empat operator. Namun, penegakan hukum belum mampu mengungkap “sang bandar” atau ditengarai baru hanya sebatas operator. Lebih sulitnya lagi, judi online ini juga diduga berkaitan dengan industri judi online di Kamboja atau Myanmar yang diduga dijalankan oleh kartel.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bukankah di Indonesia judi sudah ada sejak dulu, dan biasanya dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit diberantas hingga sekarang judi dilakukan di dunia maya?

Permasalahan judi daring atau online sejatinya adalah sebuah tindakan judi/perjudian yang menurut ketentuan di Indonesia (KUHP) dilarang dan merupakan tindak pidana. Namun, dengan perkembangan teknologi, perjudian juga memanfaatkan ruang dunia maya. Permasalahan muncul ketika tidak semua negara mengatur perjudian adalah tindak pidana atau ilegal. Dengan sendirinya, persoalan judi menjadi sulit diberantas jika memanfaatkan celah

lintas batas yang memiliki perbedaan aturan.

Perlu dipahami bahwa kegiatan judi oleh banyak pakar dan institusi global sebenarnya dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan adiksi, seperti pada merokok atau penggunaan obat terlarang. Oleh sebab itu, ketika perjudian menjadi permasalahan hukum, maka membutuhkan strategi berbeda dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya, apalagi jika dilakukan di dunia maya. Kita tentu teringat dengan permasalahan kasus Irjen FS yang menjadi perhatian masyarakat karena selain pembunuhan ajudannya, kasus ini dikaitkan dengan kartel “judi 303” (Pasal 303 KUHP tentang Perjudian) yang ditengarai juga melibatkan para pejabat tinggi, termasuk dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Masyarakat tahu bahwa mafia judi ini memiliki daya penetrasi yang kuat, karena selalu melibatkan uang yang sangat besar. Masalah yang sama ketika menghadapi bandar Narkoba.

Permasalahan judi sebenarnya bukan pertama kali terjadi di negeri ini. Penanganan secara masif pernah beberapa kali terjadi dalam sejarah penegakan hukum, seperti pada era Kapolri Jenderal Sutanto hingga saat ini. Perang melawan judi yang telah dilakukan tidak serta merta menghentikannya. “Penyakit” ini masih belum sepenuhnya hilang dan terus hidup dalam masyarakat. Maka tak heran jika di era



digitalisasi saat ini, mafia judi juga beralih memanfaatkan teknologi dan jaringan informasi dan komunikasi global. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah dan penegak hukum, baik dalam aturan maupun implementasinya.

Bagaimana menurut penilaian Bapak langkah pemerintah menangani masalah judi online ini dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Pada 14 Juni 2024 lalu, Presiden resmi telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang tertuang dalam Keppres Nomor 21 Tahun 2024?

Dalam Keppres tersebut, beberapa tugas Satgas adalah menentukan prioritas pencegahan judi daring, melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan judi online, serta mengoordinasikan langkah sosialisasi, edukasi, dan penyelesaian kendala pencegahannya. Dalam Pasal 5 Keppres tersebut terdapat susunan anggota Satgas yang terdiri atas: Menko Polhukam (Ketua Satgas), Menko PMK (Wakil Ketua), Ketua Harian Pencegahan yang adalah Menkominfo, dan anggota bidang pencegahan terdiri dari Kemenag, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, dan OJK. Sedangkan Ketua Harian Penegakan Hukum dilaksanakan oleh Kapolri, dan anggota bidang penegakan hukum adalah Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, BIN, BSSN, dan OJK.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Jika kita mencermati isi Keppres Satgas Pemberantasan Judi Online tersebut, tugas yang diatur dalam Keppres tersebut sejatinya merupakan tugas harian dan kewenangan masing-masing institusi. Keppres ini mengindikasikan bahwa permasalahan ini terus mencuat hingga seorang Presiden harus turun tangan. Kemenkominfo dan penegak hukum yang telah memiliki fungsi memerangi judi online tersebut ternyata masih perlu dibantu kementerian atau lembaga lainnya.

Keppres Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring mengatur mengenai tugas dan fungsi

masing-masing yang dikomandoi dan beranggotakan kementerian/lembaga terkait, dan akan berlaku hingga 31 Desember 2024. Pertanyaan publik kemudian adalah apa yang menjadi tujuan atau target kinerja dan bagaimana Keppres ini akan bekerja.

Tidak dapat dihindari bahwa dengan adanya Satgas tersebut, secara tidak langsung muncul kesan bahwa Pemerintah masih kurang efektif dan berhasil dalam mencegah dan memberantas judi online. Kemenkominfo dinilai masih sulit atau terkendala untuk mencegah penyebaran secara menyeluruh, sedangkan Kepolisian seakan-akan tidak mampu mengungkap dan



menangani kasus judi online secara maksimal dan menyeluruh.

Pembentukan Satgas menjadi sebuah respon Pemerintah agar tidak dinilai diam saja ketika terdapat sebuah permasalahan yang beredar luas di masyarakat. Akan tetapi, pembentukan Satgas tidak boleh hanya berhenti untuk sebuah gestur politis, tetapi harus memiliki target atau tolok ukur pencapaiannya. Publik pasti akan menunggu berbagai gebrakan atau terobosan apa saja yang akan dibuat oleh Satgas ini.

Apa harapan Bapak dengan pembentukan Satgas ini dan bagaimana agar Satgas Pemberantasan Judi Online ini bisa berjalan efektif dan berhasil?

Kita dapat melihat dalam pelaksanaan Satgas, seperti mafia tanah atau permasalahan pinjaman online, yang seolah telah ada namun tidak terasa hasilnya. Masih banyak permasalahan sengketa hak kepemilikan tanah. Masih terjadi ketidakhati-hatian dalam pinjaman dan kekerasan dalam penagihan kasus pinjaman daring/online. Anehnya, permasalahan tersebut justru menjadi akar permasalahan yang sangat dikeluhkan masyarakat.

Satgas judi online ini telah dibentuk dan menetapkan garis besar tugas dan tujuannya. Oleh sebab itu, Satgas harus berfokus pada akar atau inti permasalahan yang terjadi, bukan hanya menyentuh pada masalah-masalah permukaan atau residunya. Dalam permasalahan judi daring, Satgas terlihat akan menggunakan strategi memerangi *demand and supply* atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya. Strategi yang sama dalam memerangi jalur peredaran Narkotika ilegal. Selain itu, digunakan pula penegakan hukum, pencegahan dan kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pendekatan tersebut tentu tidaklah salah. Namun, pengungkapan menyeluruh dan pemetaan risiko menjadi hal yang sangat signifikan dalam memerangi sebuah kejahatan terorganisasi. Aparatur juga harus menyisir dari akarnya, yakni si bandar, jaringan, dan kroninya. Jaringan perjudian daring ini tentu memiliki jaringan luring yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak yang berasal dari Indonesia sendiri. Memperkuat filter pada infrastruktur dan

jaringan teknologi melalui pemantauan (patrol) ketat di ruang siber merupakan hal yang menjadi indikator strategis. Penguasaan dan penginderaan dalam teknologi harus dilakukan secara luas, bukan hanya mengidentifikasi pengguna, yang biasanya hanya "iseng" atau random masuk ke laman atau lokasi judi online.

Patroli ini tidak hanya menasar pada judi online, namun juga semua hal yang "mencurigakan" atau menjurus pada tindak pidana dan kejahatan terorganisasi. Pemeriksaan pada subyek-obyek, baik identitas maupun rekening dan jalur keuangan lainnya mungkin akan terkendala oleh perlindungan privasi. Namun, pemerintah harus lebih cerdas dalam mengenali bahkan menutup laman-laman yang tidak dapat dipercaya

dilakukan, namun persoalannya tidak pernah tuntas atau bahkan tersentuh. Masyarakat kemudian terbuai dan mudah terdistraksi dengan hal lainnya, sehingga penuntasan menyeluruh sebenarnya tidak terjadi. Hal ini kemudian disadari oleh berbagai pihak yang memanfaatkan celah dan kelemahan dari berbagai kebijakan maupun mekanismenya.

Masyarakat tentu akan menilai dan menunggu hasil dari Satgas Judi Online ini. Publik boleh menilai nantinya bagaimana Satgas ini menuntaskan permasalahannya. Berbagai faktor dapat menjadi tolok ukur, mulai dari pengungkapan dan pencegahan terhadap semua situs berbahaya, risiko celah pengamanan laman, hingga pengungkapan jaringan atau kartelisasinya, serta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

atau tidak memiliki legitimasi dari pemerintah tanpa pandang bulu. Artinya, tertib administrasi dan kepatuhan hukum menjadi kunci penting untuk menciptakan ruang siber yang aman dan nyaman bagi semua orang, tidak memberikan atau membiarkan satu celah pun, meskipun pada pihak yang biasanya terpercaya sekalipun.

Konsistensi dan ketegasan inilah yang sebenarnya masih belum terlihat dari berbagai satuan tugas atau tim khusus yang dibentuk oleh Presiden atau Pemerintah. Gesturnya dapat dipahami, namun selalu tidak tuntas dalam penyelesaiannya. Ekspos publik dalam penegakan hukum maupun pengungkapan modus di media massa selalu

Hal ini bukan tidak mungkin mengungkap berbagai pihak pengusaha hingga pejabat atau aparaturnya yang terlibat di dalamnya. Selain itu, rekomendasi kebijakan dan aturan yang akan digunakan untuk pendekatan pencegahan dan pemberantasan judi daring maupun luring, akan menjadi tolok ukur kesinambungan dan ketahanan fokus Pemerintah pada persoalan ini.

Mudah-mudahan Satgas ini tidak hanya sekedar isapan jempol, basa-basi, atau gestur politis belaka; namun juga benar-benar membantu meniadakan permasalahan perjudian secara komprehensif dan memberi manfaat yang terbaik bagi masyarakat. □

Atlet Hijaber Berprestasi

Dunia

ATLET panjat tebing putri Indonesia **Rajiah Sallbabillah** mengukir prestasi tingkat dunia di laga final IFSC Climbing Olympic Qualifier Shanghai, Cina 2024. Atlet berhijab asal Kota Tangerang, Banten, ini berhasil menyabet juara kedua Woman Speed Kejuaraan Dunia Panjat Tebing pada kejuaraan bergengsi tersebut.

Atlet kelahiran Banten, 30 April 1999, ini tampil memukau saat melawan atlet tuan rumah Wang Shengyan, dan berhasil masuk finis pertama dengan kecepatan 6,81 detik. Lalu, di kuartar final Rajiah bertemu atlet Polandia, Alexandra Kalocka, dan mencapai finish pertama dengan waktu 6,68 detik, sedangkan Alexandra 6,81. Rajiah selanjutnya berlaga di babak final.

Di babak final, Rajiah bertemu dengan atlet Cina Yafei Zhou. Ternyata di babak final Rajiah harus puas di posisi kedua, dengan kecepatan 6,75. Dan, juara pertama diraih Zhou dengan kecepatan 6,54 detik. "Alhamdulillah, ini capaian luar biasa. Mudah-mudahan kami, terutama saya, akan lebih maksimal untuk Indonesia ke depan," katanya. □

DER



FOTO-FOTO: STIMEWA

Rajiah Sallbabillah

Meraih Penghargaan dari Baznas

0 **S**ELEBRITI, perancang busana, host, model, dan aktor **Ivan Gunawan** mendapatkan penghargaan khusus dari Baznas RI. Bukan tanpa alasan Baznas memberikan penghargaan kepada perancang busana kelahiran Jakarta tahun 1981 ini. Ternyata Ivan telah berbuat sesuatu yang luar biasa dan patut dicontoh. Di antaranya, melalui program CSR dari produk busana muslim karyanya, Mandjha Hijab, Ivan melakukan kegiatan sosial dengan merenovasi sejumlah sekolah, pesantren, dan membangun rumah Tahfiz Qur'an di Sawangan Depok, yang dapat menampung sekitar 80 santri. Ivan juga membuka kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk mendesain motif.

Program CSR Ivan juga merambah ke luar negeri. Keponakan desainer kondang Adjie Notonegoro ini membangun sebuah masjid di Distrik Butanjwa Hoima Uganda Barat, Afrika. Masjid yang diberi nama Masjid Indonesia tersebut dibangun Ivan untuk membantu kaum Muslim di Uganda dalam beribadah.

Juga membantu perjuangan rakyat Palestina. Caranya, dengan mendesain sorban Keffiyeh yang identik dengan perjuangan Palestina. Lalu, "Saya tambahkan ornamen bunga yang warnanya sama dengan bendera Palestina, lalu jadilah kerudung. Alhamdulillah diminati pasar dan bisa membasuh luka Palestina," katanya. □

DER



Ivan Gunawan



Melly Goeslaw

Ciptakan Lagu Dadakan untuk Palestina

SAAT menggelar konser di Stadion Axiata Arena Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (1 Juni 2024), penyanyi dan pencipta lagu **Melly Goeslaw**, secara mendadak menciptakan dan menyanyikan sebuah lagu untuk Palestina dengan melibatkan penonton secara live. Para penonton pun menyambut antusias dengan mengibarkan bendera Palestina.

"Lagu ini sebagai persembahan dua Negara (Indonesia dan Malaysia-red) untuk Palestina tercinta, bismillah. Saya pun berfikir lagu ini bukanlah saya yang buat atau siapapun, sebab detik itu Allah SWT. turunkan atau titipkan ilhamnya pada kami, so composed by Allah SWT for Palestine," ujar puteri seorang penyanyi lawas Indonesia Melky Goeslaw ini.

Lagu ini, menurut Melly, akan segera diproduksi dan dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia dan Malaysia dibayar dengan ikhlas, tanpa fee dan royalty. "Melalui sebuah karya adalah cara kami mencintai Palestina. "Semua bisa berkontribusi membeli karya ini yang 100% akan diperuntukkan untuk Palestina," kata artis berdarah Ambon, peraih penghargaan sebagai penata musik terbaik, pencipta lagu terbaik 2013-2017, pada 3 Juni 2024. □

DER

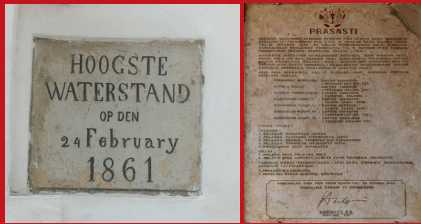


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Benteng Vastenburg Menanti Munculnya Keajaiban yang Mengubah Keadaan

BENTENG Vastenburg, bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Kota Surakarta. Posisinya sangat strategis sehingga banyak yang mengenali. Benteng ini berada di seberang Kantor Walikota Surakarta, yang sejarahnya merupakan kediaman Gubernur Belanda. Dan, dekat dengan Pasar Gede yang telah melegenda. Tepatnya beralamat di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah.

Benteng Vastenburg sudah eksis selama ratusan tahun, perkembangannya membersamai maju mundurnya Kota Surakarta. Sayangnya, bangunan Benteng Vastenburg makin menua, dan kurang mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Bahkan benteng ini nyaris kehilangan statusnya sebagai cagar budaya dan wisata sejarah.

Seolah-olah masyarakat Surakarta hendak melupakan nilai historis yang sangat mendalam dan tersimpan rapi di benteng ini. Kesan tersebut sangat kentara, mengingat fungsi serta keberadaannya kian bergeser dan terpinggirkan.

Saat ini, lokasi di mana benteng berada, lebih dikenal sebagai kawasan parkir, bagi kendaraan-kendaraan besar dari luar kota. Di antaranya, bus-bus pembawa turis yang hendak bepergian ke pasar gede dan sekitarnya. Tetapi, ada juga beberapa bus pariwisata milik Pemkot Surakarta yang sengaja berhenti di sana. Juga mobil-mobil pribadi yang ditinggal begitu saja pemiliknya



di sana.

Padahal, jika kawasan tersebut ditata dan dikelola dengan benar maka bisa difungsikan dengan lebih baik lagi. "Asal pintu gerbangnya dibuka ada saja pengunjung

yang ingin masuk," kata salah satu penjual kopi di sekitar sana. Apalagi, jika ditambahkan beberapa sarana dan prasarana lain, baik fasilitas wisata pendidikan maupun wisata sejarah, pasti akan mendatangkan pengunjung.

Untuk kondisi sekarang, cerita Bapak penjual kopi itu, pintu gerbangnya hanya dibuka saat ada kegiatan, selebihnya selalu terkunci. "Tetapi kalau mau masuk, coba lewat pintu belakang, kebetulan sedang ada persiapan dan bersih-bersih menjelang kegiatan beberapa hari yang akan datang," katanya kepada *Majelis* saat berkunjung ke sana, bertepatan libur panjang perayaan Idul Adha 1445/2024 silam.

Begitu mendengar saran dari penjual kopi itu, *Majelis* pun bergegas menuju pintu belakang, mencoba masuk ke lokasi, untuk sekedar mengambil foto dari dalam benteng. Dan, benar saja, setelah mengambil jalan memutar, kami menemukan pintu gerbang benteng Vastenburg bagian belakang. Halaman belakang tidak kalah luas dibanding halaman depan. Bedanya, di sana lebih banyak ditumbuhi pohon dan rumput



FOTO-FOTO: STIMEWA

lebat. Dan, itu pertanda bahwa tempat tersebut belum banyak dijamah oleh masyarakat.

Tembok Tebal

Tak mau menyia-nyiakan waktu *Majelis* pun segera masuk ke dalam Benteng. Tidak ada yang istimewa, kecuali rasa kagum bahwa ternyata benteng tersebut sangat luas mencapai 7 hektar. Dalam hati, ada rasa syukur karena datang ke tempat tersebut disaat rumput liar yang ada di sana tengah dipotong. Sehingga luasnya areal benteng bisa dinikmati hanya dengan mata telanjang.

Iseng *Majelis* pun bertanya, sudah berapa lama memotong rumput di tempat

tersebut. Di jawab sudah empat hari, dan baru dapat setengahnya. Padahal terdapat lima mesin pemotong yang terus meraung-raung membat satu persatu batang rumput hingga nyaris tak tersisa. Dan, itu membuat kami semakin kagum.

Seperti juga kekaguman terhadap tembok yang menjadi benteng di sana. Tebalnya sekitar empat meter, dengan tinggi sekira 6 meter. Di bagian luar tembok, terdapat parit yang mengelilingi seluruh luas benteng, dalamnya sekitar 2 meter. Itupun sudah mengandung endapan, yang entah berapa meter ketebalan endapan tersebut.

Arsitektur dari bangunan ini nampak sekali bahwa orientasinya adalah untuk per-

tahanan dan keamanan. Hal itu terlihat dari keberadaan parit yang mengitari seluruh wilayah benteng dan hanya ada dua jembatan lalu lintas keluar masuk yang berada di pintu gerbang depan maupun belakang. Praktis tidak ada sisi lain dari bangunan, itu yang bisa digunakan untuk akses keluar masuk selain hanya di pintu gerbang tersebut.

Benteng Vastenburg diperkirakan dibangun pada 1745. Seperti yang terdapat dalam situs Badan Otorita Borobudur, pembangunannya dilakukan atas perintah Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff, dengan tujuan sebagai pusat pengawasan terhadap Keraton yang berkuasa di Surakarta.

Pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, Vastenburg dijadikan sebagai markas TNI. Kemudian berganti menjadi pusat Brigade Infanteri 6/Trisakti Baladaya Kostrad dan kawasan latihan prajurit keraton. Tetapi pada 1980-an, benteng ini tidak lagi aktif.

Meski tidak banyak yang bisa dilihat dari keberadaannya, Benteng Vastenburg tetap saja patut untuk mendapat perhatian dan kunjungan wisata. Tempat ini menawarkan pengetahuan seputar sistem pertahanan. Mulai dari tembok, parit hingga arsitekturnya. Tempat ini juga cukup menantang bagi para pencari spot-spot instragamable, karena di dalam benteng terdapat dua pohon beringin yang siap memberikan kesan tersendiri. □

MBO



Maria Yohana Esti Wijayati
Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan

Pejuang Hak Pendidikan Anak dan Perempuan di Ruang Parlemen



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MARIA Yohana Esti Wijayati atau akrab disapa Mbak Esti adalah sosok wakil rakyat yang banyak berkecimpung di berbagai bidang. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari dapil Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta ini secara konsisten memperjuangkan hak pendidikan untuk anak-anak dari keluarga ekonomi menengah dan lemah. Selain itu, Mbak Esti juga seorang aktivis yang lantang menyuarakan keadilan terhadap hak-hak perempuan.

Bagi dia, hak akses pendidikan yang terjangkau serta layak untuk anak dan hak perlindungan sekaligus pemberdayaan perempuan adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Sebab, hak-hak itu merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar yang harus dijalankan oleh semua pihak, terutama pemerintah. Intinya, negara harus hadir dalam proses pencerdasan bangsa, sekaligus juga mengangkat harkat martabat perempuan.

Sebagai politisi perempuan, Mbak Esti juga dikenal memiliki karakter toleransi yang sangat kuat dalam hal menerima keberagaman, seperti perbedaan suku, agama, dan ras. Keberagaman, menurut Mbak Esti, merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus menjadi kebanggaan, dan bukannya menjadi sebuah masalah dalam hidup bermasyarakat.

Semua itu dia buktikan dalam kehidupan nyata. Baginya, karakter toleransi bukan hanya sekedar jargon. Contohnya, sebagai seorang penganut Katolik yang taat, Mbak Esti dikenal sangat dekat secara pribadi dengan kalangan dan komunitas Islam di Yogyakarta. Salah

satunya dengan Muhammadiyah, salah organisasi Islam terkemuka di Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan, Mbak Esti diketahui berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Ia bahkan beberapa kali mengunjungi dan bertemu dengan tokoh terkemuka Muhammadiyah dan seorang cendekiawan muslim, Buya Syafii Ma'arif (almarhum). "Figur Buya Syafii", menurut saya, adalah guru bangsa yang bersahaja sekaligus juga berdiri di atas semua golongan, serta senantiasa membela penindasan terhadap kaum minoritas," katanya.

Selain dengan Muhammadiyah, Mba Esti juga dikenal di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Ia beberapa kali mengunjungi Kiai Hasan yang merupakan Pimpinan Ponpes Assalafiyah Mlangi, Sleman, Yogyakarta. Dia juga pernah bersilaturahmi dengan para kiai di Ponpes Wahid Hasyim, Sleman, Yogyakarta. Berkat didikan orangtua dan pengaruh lingkungan tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan itulah yang menumbuhkan karakter yang melekat pada diri Mbak Esti.

Sejak Kecil Sudah Memahami Tiga Pilar Demokrasi

Maria Yohana Esti Wijayati, lahir pada 17 Juni 1968 di Sleman, Yogyakarta. Ayahnya Agustinus Prawoto adalah seorang guru Pendidikan Moral Pancasila dan seorang penatar P-4. Sang ayah juga seorang politisi Partai Nasional Indonesia (PNI). Dan, ayahnya ialah yang memperkenalkan politik dan sisi positif lain dari politik, serta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

perlu aktif dalam bidang kemanusiaan.

Adapun sang Ibunda adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan berjualan kecil-kecilan di rumah. Mbak Esti tumbuh sebagai anak dusun di lereng Merapi, tepatnya di Dusun Purworejo, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Walaupun anak dusun, Mbak Esti sering ditunjukkan buku-buku pidato Bung Karno oleh ayahnya. Beliau juga memberikan banyak pemahaman soal Pancasila kepada Esti kecil.

“Ya, ayah saya sering memberikan saya pemahaman politik bahkan pemahaman tentang tiga pilar demokrasi, yaitu: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Hal itu yang membuat saya sangat mengagumi sosok ayah. Saking mengagumi sosok ayah, ketika masih duduk di bangku SMP kalau ditanyakan cita-cita maka pasti saya jawab, ingin jadi guru dan anggota DPR,” katanya.

Istri dari Bambang Sigit Sulaksono dan Ibu tiga anak: Bernandus Setya Ananda Wijaya, Christian Adi Wijaya Laksana, dan Angelina Dewi Laksana Putri ini mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah

Dasar Negeri (SDN) Purworejo (lulus tahun 1980). Lalu, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri III IKIP (lulus tahun 1982), kemudian menamatkan sekolah lanjutan atas pada tahun 1984 di SMA Negeri II IKIP Pakem (sekarang SMA Negeri 1 Pakem). Selepas itu ia melanjutkan studi di PMIP IKIP Sanata Dharma (lulus tahun 1990).

Ikut Pemilu Pertama Pasca Reformasi

Melihat perjalanan hidupnya sejak kecil hingga dewasa, Mbak Esti sangat dekat dengan pemikiran Bung Karno. Maka, tak heran bila saat dewasa gairah politik dan organisasinya dilabuhkan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia mulai terjun di kancah politik praktis tepat setahun pasca reformasi. Tepatnya pada Pemilu 1999. Kala itu, dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, dari PDI Perjuangan.

Pada kontestasi pemilu legislatif pada Pemilu 1999 itu, Mbak Esti terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman. Dan, oleh



fraksinya, dia ditunjuk menjadi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman periode 1999-2004. Itulah awal mula kariernya di dunia politik praktis, dan sejak itu karier politiknya terus menanjak.

Pada Pemilu 2004, Mbak Esti naik kelas. Kalau pemilu sebelumnya dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman, lalu pada pemilu berikutnya (Pemilu 2004) dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi DI. Yogyakarta, dari partai yang sama (PDI Perjuangan). Hasilnya, dia terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DI Yogyakarta untuk periode 2004-2009 dan dipercaya menjadi Ketua Komisi C DPRD DI Yogyakarta. Dan, pada Pemilu 2009, Mbak Esti terpilih kembali menjadi anggota DPRD DI Yogyakarta periode 2009-2014.

Rupanya, pengalaman selama 15 tahun berkarier di wilayah Yogyakarta — satu periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman, dan dua periode anggota DPRD Provinsi DI Yogyakarta — agaknya cukup bekal baginya untuk terjun di kancah politik nasional. Pada Pemilu 2014 dia bertarung memperebutkan kursi DPR RI dari dapil DI Yogyakarta, juga dari PDI Perjuangan. Rupanya dewi fortuna tetap berpihak kepadanya, dan dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, dan ditempatkan di Komisi X. Begitu pula pada Pemilu 2019, Mba Esti kembali memperoleh mandat dari rakyat DI Yogyakarta untuk tetap menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024, dan bertugas di Komisi VIII.

Sepak terjangnya selama menjadi anggota legislatif di Senayan yang membidangi pendidikan, Mbak Esti berupaya keras mengawal isu pendidikan. Bukan hanya mengawal dari sisi bersuara keras, namun dalam aksi nyata. Tercatat, selama menjadi anggota Komisi X DPR RI, Mbak Esti telah mendistribusikan lebih dari 1.300 Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan telah membantu sekitar 300 ribu lebih siswa - siswi di sekolah negeri, dan juga siswa-siswi di sekolah swasta yang kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Saat bertugas di Komisi VIII DPR yang membidangi Agama, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Mbak Esti memberikan bantuan logistik dan peralatan berupa 200



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

paket sembako, 200 selimut, dan 200 terpal, untuk siaga darurat saat terjadi bencana hidrometrologi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. “Penanggulangan bencana tak hanya menjadi perhatian pemerintah, namun juga bagi seluruh masyarakat,” katanya pada saat penyerahan bantuan itu pada 29 Januari 2023.

Seputar pemberdayaan perempuan, Mbak Esti tentu sangat vokal. Dia mengatakan, perempuan perlu masuk di berbagai tingkatan pengambilan kebijakan untuk mengupayakan kesetaraan gender di daerah. “Perempuan bisa memberikan masukan kepada desa melalui rapat-rapat, seperti Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdus). Perempuan penting sekali mengikuti kegiatan seperti itu,” tuturnya.

Menurut Mbak Esti, jika perempuan mengikuti kegiatan pengambilan kebijakan maka mereka bisa memasukkan aspirasi untuk meminta desa memberikan kegiatan yang melibatkan kaum perempuan. Dari situ bisa ada alokasi dana desa yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan yang memberdayakan perempuan.

Dalam mengawal produk Undang-Undang, kiprah Mbak Esti sangat strategis dan memberikan dampak nyata di masyarakat. Saat menjadi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mbak Esti ikut mengawal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) hingga disahkan menjadi Undang-Undang.

Ia juga menjadi pengusul penambahan kata ‘pencegahan’ sebelum kata tersebut dimasukkan dalam nomenklatur judul Undang-Undang. Dalam menyusun draf Undang-Undang TPKS, Mbak Esti menggandeng organisasi perempuan Aisyiyah.

Ketika disinggung soal kuota perempuan 30% di ranah legislatif, dia mengatakan, sangat baik. Sebab, perempuan tidak lagi sebagai penganap angka atau yang penting ada dalam organisasi pemerintahan. “Namun, yang perlu saya tekankan adalah mereka perlu didampingi agar memiliki kapasitas untuk berkompetisi dan memenangkan kompetisi di ranah legislatif itu,” ujarnya.

Sebagai anggota MPR RI, Mbak Esti juga sangat aktif melaksanakan program kegiatan andalan MPR RI, yang diamanatkan UU yakni Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Salah satunya, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Mbak Esti kepada KPM PKH Kapanewon Cangkringan dan Ngaklik, Kabupaten Sleman, tanggal 22 Januari 2024.

Dalam kegiatan itu, dia menyampaikan tentang Empat Pilar MPR RI terkait Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Katanya kepada peserta, dalam kehidupan berbangsa, keempat pilar harus kokoh, karena berfungsi sebagai penangkal gangguan dan ancaman yang mengintai baik dari segi internal ataupun eksternal.

Dalam melanjutkan dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR atau sebagai Wakil Rakyat, Mbak Esti mengungkapkan,



setidaknya ada tiga modal yang membuatnya mantap. “Modal utama *kulina rekasa* (terbiasa hidup susah), *akeh kanca* (banyak teman) menjadi relawan, dan *ndilalah* (kebetulan) 15 tahun menjadi anggota Dewan cukup membantu saya berkomunikasi dengan masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya, ada satu hal yang lebih penting. Mbak Esti akan selalu berusaha tidak putus melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Rumah dan poskonya selalu terbuka untuk masyarakat. Karena terjaganya komunikasi dan silaturahmi yang sangat intens serta intensif di akar rumput itulah banyak warga masyarakat yang simpati dan bergabung di poskonya yang tersebar di Sidoagung, Nolagaten, Sleman, Kleben, Wirobrajan, dan Gunungkidul. Hal itulah yang membuat dia dipercaya rakyat hingga selama 15 tahun berturut-turut, dan akan bertambah lagi pada Oktober 2024 dia kembali dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Pada Pemilu 2024. Mba Esti kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan tetap dari PDI Perjuangan dapil Yogyakarta. Di dapil ini, total ada 136 caleg memperebutkan delapan kursi anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029. Dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mbak Esti berhasil meraih suara tertinggi dengan perolehan 257.923 suara. □

DER

Biodata

Nama Lengkap : **MY Esti Wijayati**
 Agama : Katolik
 Tempat, tanggal lahir : Sleman, 17 Juni 1968
 Suami : Bambang Sigit Sulaksono

Pendidikan

- SDN Purworejo I (1973 - 1980)
- SMPN III IKIP (1980 - 1982)
- SMAN III IKIP (1982 - 1984)
- F. PMIPA, IKIP Sanata Dharma (1984)

Karir

- Ketua Komisi C DPRD Kab.Sleman (1999 - 2004)
- Ketua Komisi C DPRD Propinsi DIY (2004 - 2009)
- Anggota DPRD Propinsi DIY (2009 - 2014)
- Anggota DPR-RI (2014 – 2014)

Tanda Penghargaan

- Jambore Nasional 81 dari Panitia Jambore Asia Pasifik
- Relawan Gempa dari Bupati Padang
- Politisi Muda dari ACWPL

DPD RI dan Pengawasan Keuangan Desa

DALAM sebuah diskusi, sejumlah anggota DPD RI menyebutkan bahwa kiprah DPD RI sebagai lembaga legislatif yang jauh lebih muda dibanding DPR RI, sudah menunjukkan kemajuan. Di luar perjuangannya memperkuat wewenang DPD RI melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, wewenang yang dimiliki DPD hingga saat ini, sudah dijalankan dengan baik. Apa yang sudah dijalankan DPD itu mendapat apresiasi masyarakat.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh CSIS yang dipublikasikan pada Desember 2023, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada DPD RI berada di atas DPR RI, yakni 60,4% berbanding 56,2%. Tentu ini hal yang positif dan perlu terus diperjuangkan agar DPD RI bisa makin baik dan makin berperan sesuai marwah pendiriannya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang diwakilinya.



Pengawasan Dana Desa

Salah satu peran besar yang diharapkan bisa makin dioptimalkan oleh DPD RI adalah turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peran pengawasannya. Pasal 22D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti." Hal yang paling urgen terkait peran DPD dalam hal pembangunan desa pada saat ini adalah pengawasan keuangan pedesaan karena berkenaan dengan pengawasan hubungan

pusat dan daerah serta pelaksanaan APBN.

Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasinya berjudul *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 dan 2023*, keuangan desa hampir tergantung sepenuhnya pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Dari total pendapatan pemerintah desa seluruh Indonesia yang pada 2022 total anggarannya sebesar Rp120 triliun dan tahun 2023 sebesar 121 triliun, kontribusi dana Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 97% baik tahun 2022 maupun 2023. Artinya, hanya kurang dari 3% pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa (PADes). Kecenderungan itu membutuhkan pengawasan ketat karena pada umumnya kucuran dana yang seolah-olah merupakan dana hibah itu, kurang dioptimalkan penggunaannya sesuai peruntukannya karena merasa mendapatkan dana murah, yakni dana yang tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkannya namun bisa mendapatkannya dengan nilai yang besar. Penerimaan TKD ini membutuhkan disiplin, integritas, keimanan yang kuat, serta pengawasan yang memadai. Meningkatnya tindakan korupsi dana desa barangkali juga menunjukkan ada kecenderungan melihat dana desa itu sebagai "dana murah" sehingga lalai penggunaannya bahkan diselewangkan.

Total Pendapatan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (2022 dan 2023)

No.	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)			Kontribusi (%)		
		Anggaran (2022)	Realisasi (2022)	Anggaran (2023)	Anggaran (2022)	Realisasi (2022)	Anggaran (2023)
1.	Pendapatan Asli Desa	3.103	2.836	3.216	2,58	2,39	2,65
2.	Pendapatan Transfer	116.593	115.107	117.733	96,89	97,07	97,03
2.1	Dana Desa	68.000	67.641	68.169	56,51	57,04	56,18
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	4.105	3.903	4.205	3,41	3,29	3,47
2.3	Alokasi Dana Desa	35.311	34.713	36.956	29,34	29,27	30,46
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	3.746	3.548	3.587	3,11	2,99	2,96
2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.430	5.302	4.816	4,51	4,47	3,97
3.	Pendapatan Lain-Lain	645	633	384	0,54	0,53	0,32
TOTAL		120.340	118.576	121.333	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS/Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 dan 2023

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak dana desa diluncurkan tahun 2015 hingga pertengahan 2023, terdapat 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 orang pelaku. Separuh dari para koruptor itu adalah kepala desa itu sendiri. Kita tentu prihatin dengan korupsi dana desa itu, sekaligus juga tergerak untuk terus meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa.

Kasus korupsi dana desa bukan satu-satunya masalah yang dihadapi desa. Berdasarkan data BPS, pendapatan asli desa (PADes) secara keseluruhan pada 2022 dan 2023 masing-masing hanya sebesar 2,39% (realisasi 2022) dari anggaran tahun tersebut dan sebesar 2,65% pada anggaran 2023. Desa yang memiliki PADes tinggi mengindikasikan desa tersebut telah mampu memanfaatkan

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI



potensi yang dimilikinya secara optimal sekaligus mengindikasikan tingkat kemandirian. Hanya saja, secara rata-rata, tingkat kemandirian desa di Indonesia berada pada kategori sangat rendah, yakni dengan rasio 2,46%. Bahkan, provinsi dengan tingkat kemandirian desa terbaik, yakni Jawa Timur, hanya memiliki rasio kemandirian desa rata-rata 7,45% atau masih kategori sangat rendah. Untuk bisa menjadi desa yang memiliki kategori kemandirian sedang membutuhkan rasio kemandirian antara 50% hingga 75%. Jadi, masih sangat jauh dari harapan. Tentu kita berharap, dengan adanya dana desa, pelan-pelan desa akan berkembang menjadi desa dengan tingkat kemandirian yang semakin baik. Agar prosesnya sesuai harapan pengawasan pelaksanaan keuangan desa harus terus ditingkatkan.

Upaya pengawasan penggunaan dana desa dilakukan DPD RI melalui Komite IV yang bekerja sama dengan mitra kerjanya, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam rapat dengar pendapat (RDP) BPKP dengan Komite IV DPD RI pada pertengahan 2023, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan bahwa di antara faktor yang mengakibatkan kurang maksimalnya penyaluran dan penyerapan dana desa, antara lain kapasitas SDM aparatur desa, regulasi terkait, permasalahan hukum di desa, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

DPD sendiri, melalui Komite I, sudah banyak melakukan kajian. Di antaranya membuat kajian tentang permasalahan implementasi UU Desa. Dari kajian tersebut DPD RI setidaknya menemukan delapan permasalahan (lihat Majalah *Senator* edisi Juli 2023, “*Delapan Permasalahan Pelaksanaan UU Desa*”):

1. Perangkat desa masih kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur yang menjalankan tugas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Sehingga kreativitas dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kearifan lokal belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Pengisian perangkat desa yang baru belum berdasarkan kompetensi dan prosedur yang ada.
3. Minimnya pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
4. Pemanfaatan potensi dan aset desa (BUMdesa) untuk peningkatan ekonomi masyarakat di desa masih belum optimal karena keterbatasan SDM pengelola BUMDesa.
5. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BPD dalam menjalankan tupoksinya, maka perlu diatur secara jelas pemberian honorariumnya.
6. Dukungan APBD kabupaten terhadap penetapan dan penegasan batas desa yang masih minim.

7. Keuangan desa yang bersumber dari dana desa, kebijakan dan regulasinya sering terlambat dan sering berubah sehingga tidak dapat cepat disikapi karena minimnya kapasitas pengelola.
8. Serapan dana desa yang masih rendah karena lambatnya pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran dana desa (ADD) dalam APBD, dan lambatnya penetapan Perdes tentang APBDesa karena kurang sejalannya kepala desa dengan BPS serta minimnya SDM pengelola keuangan desa yang sangat bergantung pada pendamping lokal.

Penguatan DPD RI

Kiprah DPD RI terkait desa itu menunjukkan bahwa DPD RI sudah melaksanakan kewenangannya dengan baik. Memang agak disayangkan jika selama ini informasi menyangkut DPD RI kurang bergaung di masyarakat. Media-media *mainstream* kurang tertarik untuk memberitakan kiprah DPD RI secara lembaga. Dalam sebuah diskusi menyebutkan bahwa di DPD RI banyak tokoh-tokoh besar nasional. Sayangnya, ketika ia mengemukakan pendapatnya sebagai anggota DPD RI, yang terekspose di media adalah sosok pribadinya bukan lembaga yang diwakilinya, yakni DPD RI.

Sebenarnya, jika para tokoh nasional itu berbicara dalam forum-forum tertentu dengan mengatasnamakan DPD RI sesuai keanggotaannya dan dikutip sebagai anggota DPD RI, punya andil untuk ikut menguatkan peran DPD RI. Ini mungkin hal yang simpel, namun di era informasi saat ini, mengomunikasikan hal-hal demikian akan mendorong konduite DPD RI.

Selain itu, banyaknya kajian DPD RI yang dipublikasikan secara luas, juga menjadi salah satu cara untuk mendorong penguatan DPD RI. Tentu membutuhkan kajian lebih lanjut, rutin, dan mungkin beragam program lanjutan agar kajian-kajian DPD RI bisa lebih bergaung. Sebagai salah satu ide, terkait desa, mungkin DPD RI bisa membuat kajian yang dikemas dalam bentuk penghargaan kepada desa-desa terbaik, misalnya, “Penghargaan 20 Desa Terbaik berdasarkan Tingkat Kemandirian”, atau “20 Desa Pariwisata Terbaik”, dan lain-lain. Demikian juga bisa menyelenggarakan seminar terkait performa desa.

Bentuk penghargaan dan seminar itu bisa bermakna pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan desa, sekaligus memberi apresiasi pada mereka yang berhasil. Bentuk kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan BPKP, pihak swasta, atau pihak lain. Ini adalah upaya DPD untuk meningkatkan imejnya di masyarakat yang berarti bentuk “Penguatan DPD RI” dalam memperkokoh kewenangan yang sudah dimilikinya. Mudah-mudahan hal ini juga bisa meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada DPD RI yang saat ini sudah baik. □

Buku Mencerdaskan Kehidupan Bangsa...

Amandemen Demi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Bagi MPR, pendidikan adalah soal penting sehingga sektor ini perlu mendapat perhatian serius dan sungguh-sungguh. Demi dunia pendidikan, MPR menambah pasal-pasal terkait wajib sekolah dan anggaran yang membiayainya. Perlu political will dari semua pihak.

BEBERAPA waktu lalu, mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri melakukan aksi menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Aksi yang muncul menjadi isu nasional dan mendapat berbagai respon dari masyarakat, akademisi, dan institusi lainnya. Di tengah prokontra kenaikan UKT, Universitas Muhammadiyah Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, malah memperkenankan mahasiswanya untuk membayar uang kuliah dari hasil bumi (pertanian).

Meski akhirnya Mendikburistek membatalkan kenaikan UKT, muncul pertanyaan, sejauh mana kehadiran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan di tanah air. Pertanyaan ini wajar, sebab dalam amanah UUD NRI Tahun 1945, pada Pembukaan, ditegaskan salah satu tugas dari pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga wajar kalau seluruh komponen bangsa berhak difasilitasi untuk merasakan pendidikan yang adil dan merata.

Terkait mencerdaskan kehidupan bangsa, MPR telah memberikan jalan terhadap masalah ini. Lewat buku yang berjudul: *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Pendidikan Nasional Menurut UUD NRI Tahun 1945*, lembaga negara yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, itu mengurai berbagai hal tentang pendidikan, mulai dari sejarah, sistem pendidikan nasional, kurikulum, hingga pembiayaannya.

Buku setebal xii + 217 halaman itu terbagi dalam lima bab ditambah dengan halaman berbagai sambutan, daftar gambar, table, dan para penyusun buku. Dalam sambutan, halaman vii, dikatakan bangsa yang makmur bukanlah mereka yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, melainkan mereka yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Berangkat dari alasan yang demikian maka MPR melakukan pengkajian tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Alasan melakukan pengkajian adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari semua paparan di buku, intinya pada Bab IV, Subbab 2, *Pembiayaan Pendidikan*, halaman 153. Di halaman itu dijelaskan bahwa tata kelola pembiayaan pendidikan, antara lain dengan melaksanakan Pasal 31 ayat (3) UUD. Ditambahkan, di dalam makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD Alinea IV bahwa bangsa

ini adalah bangsa yang menganut negara kesejahteraan (*welfare state*).

Konsekuensi dari *welfare state* ini adalah pemerintah harus membiayai sektor-sektor yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pendidikan nasional. Hal ini, menurut paparan di buku itu, merupakan best practice di negara-negara kesejahteraan lain di dunia, seperti Belanda dan Jerman yang APBN-nya fokus pada pembiayaan lima sektor, yaitu: (1). Pendidikan; (2). Kesehatan; (3). Pertahanan; (4). Administrasi Negara; dan (5). Infrastruktur.

Lima alasan itulah yang membuat MPR dalam amandemen menambah Pasal 31 UUD dari semula 2 ayat menjadi 5 ayat. Diungkap di buku itu, penambahan ayat di pasal tersebut

menekankan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah membiayai pendidikan, ayat (2): *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai*. Ayat (4), *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*. Ayat (5), *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*.

Dalam buku tersebut juga disinggung bagaimana upaya peningkatan kualitas guru, yang harus dilakukan tidak hanya melalui sertifikasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui sistem pengadaan, penempatan, pemberdayaan, dan pengembangan profesi, serta pembinaan guru yang harus bersih dari praktik oportunistik dan kompromistik.

Ditegaskan, politik anggaran pendidikan dan kebijakan pelaksanaannya harus dibarengi dengan *political will* yang kuat dari semua elit pemimpin bangsa, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk menegakkan Amanah UUD, khususnya di masalah pendidikan. □

AWG





MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PIJAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHRINEKA TUNGGAL IKA



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI